



**PERAN NMA (NAGA MOTHER'S ASSOCIATION) DALAM PROSES
PERDAMAIAN DI NORTHEAST INDIA**

***THE ROLE OF NMA (NAGA MOTHER'S ASSOCIATION) TO PEACE
PROCESS IN NORTHEAST INDIA***

SKRIPSI

**Diajukan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk
menyelesaikan studi pada Progam Ilmu Hubungan Internasional (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Sosial**

Oleh:

**Narita Anggraini
NIM 070910101121**

**JURUSAN ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER**

2015

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda Surti Rahayu dan Ayahanda Ir. Sayid Anwar, ST yang tercinta;
2. Kakak saya, Epissa Restu Wardhani dan Adhyta Harfan yang tercinta;
3. Guru-guru saya dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi;
4. Almamater saya, Universitas Jember.

MOTTO

Act as if what you do makes a difference. It does.)*

*Almost always, the creative dedicated minority has made the world better.**)*

*All mankind is divided into three classes: those that are immovable, those that are movable, and those that move.***)*

*) William James. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/w/william_james.html. [03 April 2011]

**) Martin Luther King, Jr.
http://www.brainyquote.com/quotes/authors/m/martin_luther_king_jr.html. [03 April 2011]

***) Benjamin Franklin. http://www.brainyquote.com/quotes/authors/b/benjamin_franklin.html. [03 April 2011]

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Narita Anggraini

NIM : 070910101121

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: *Peran NMA (Naga Mother's Association) dalam Proses Perdamaian di Northeast India* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada instansi mana pun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 Januari 2015

Yang menyatakan,

Narita Anggraini

NIM 070910101121

SKRIPSI

**PERAN NMA (NAGA MOTHER'S ASSOCIATION) DALAM PROSES
PERDAMAIAN DI NORHEAST INDIA**

Oleh
Narita Anggraini
NIM 070910101112

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dra. Sri Yuniarti, M.si

Dosen Pembimbing Anggota : Drs. Supriyadi M.si

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “Peran NMA (Naga Mother’s Association) dalam Proses Perdamaian di Northeast India” telah diuji dan disahkan pada:

hari : Senin
tanggal : 27 April 2015
waktu : 12.00 WIB
tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Alfian Jamil, M.Si
19500408 197603 1 001

Sekretaris I

Sekretaris II

Dra. Sri Yuniarti, M.si
NIP 196305261989022001

Drs. Supriyadi M.si
NIP 195803171985031003

Anggota I

Anggota II

Drs. Djoko Susilo, M.Si
19590831 198902 1 001

Dr. Muhammad Iqbal, S.sos, M.si
197212041999031004

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A.
NIP 195207271981031003

RINGKASAN

Peran NMA (Naga Mother's Association) dalam Proses Perdamaian di Northeast India; Narita Anggraini, 070910101121; 2011: 132 halaman; Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Konflik selama kurang lebih 60 tahun yang dihadapi Northeast India menyebabkan korban yang tidak sedikit bagi masyarakat Northeast India khususnya perempuan dan anak-anak di wilayah tersebut. Peran perempuan yang sangat minim karena budaya di Northeast India membuat para perempuan tidak dapat berbuat banyak untuk mengurangi adanya korban yang terus berjatuh baik dari pihak militer pemerintah india, para pemberontak, maupun masyarakat sipil khususnya anak-anak dan perempuan. Diskriminasi, pembunuhan secara brutal, penyerangan sepihak terjadi di mana-mana menimbulkan trauma yang dalam bagi sebagian anak-anak. Sebagian lainnya dipaksa menjadi militan dan memegang senjata pada usia muda, anak-anak diambil paksa dari ibu-ibu mereka dan terpaksa menjalani latihan keras sebagai pemberontak. NMA (Naga Mother's Association) sebagai organisasi masyarakat sipil non pemerintah muncul di tengah masyarakat sebagai grup ibu-ibu dari suku naga yang sadar bahwa peran perempuan sangat berarti di dalam konflik. Dimulai dari kegiatan menampung korban kekerasan dan kebrutalan konflik, NMA mencoba mewadahi peran perempuan dalam proses perdamaian dengan memakai peran alami seorang ibu. Kampanye pertama "shed no more blood" dilakukan oleh NMA karena banyak mayat bergelimpangan dari berbagai pihak dan sulit untuk dikenali. Para mayat dikuburkan dengan layak dan didoakan dengan cara yang baik di depan para pemberontak dan militer pemerintah india. Dengan begitu, NMA menyatakan bahwa setiap jiwa manusia berharga. Dimulai dari kampanye tersebut NMA mengembangkan perannya sebagai Peace building grassroot level agent

PRAKATA

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Peran NMA (Naga Mother’s Association) dalam Proses Perdamaian di Northeast India”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata 1 (S1) pada Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini didorong atas rasa keingintahuan penulis mengenai Peran NMA (Naga Mother’s Association) dalam Proses Perdamaian di Northeast India. Penulis akan membahas secara detail mengenai Peran NMA (Naga mother’s Association) beserta data-data lain yang bisa menguatkan analisis.

Proses jalannya penulisan skripsi ini bukan semata-mata karena pengerjaan secara individu tetapi juga karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA, Ph.D selaku PD I Bidang Akademik
3. Drs. Bagus Sigit Sunarko, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional;
4. Dra. Sri Yuniati, M.si, selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Drs. Supriyadi, M.si, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bantuan, kritikan, dan motivasi kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;
6. Drs. Supriyadi, M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis;

7. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, khususnya para dosen di Jurusan Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan bermanfaat;
8. Segenap civitas akademika FISIP Universitas Jember yang telah membantu penulis selama menempuh studi di kampus FISIP Universitas Jember;
9. Teman-teman jurusan Ilmu Hubungan Internasional terutama angkatan 2007. Terima kasih yang mendalam penulis sampaikan untuk pengalaman-pengalaman berharga dalam suka duka bersama;
10. Mama saya Surti Rahayu, Bapak saya Sayid Anwar, Kakak saya Epissa dan Adhyta, dan keluarga besar di Waru-Sidoarjo, yang selalu memberi semangat dan telah memberikan doa, dukungan dan bantuan yang sangat banyak dalam proses pengerjaan skripsi dari awal sampai akhir;
11. Teman-teman kos Kalimantan yang selalu ada dalam suka duka dan Syofan Saddam yang terkasih selalu memberikan do'a serta semangat.
12. Teman-teman seperjuangan: (humaltike, linnia, dyah meyta, bunga ayu, ahmed, maria, aay)
13. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Semoga semua amal baik mendapat balasan kebaikan dari Allah dan semoga kita semua bisa selalu berkumpul dalam kemuliaan. Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini sehingga penulis mohon maaf sebesar-besarnya, dan selalu siap menerima segala saran dan kritik. Penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 26 Januari 2015

Penulis

Narita Anggraini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Ruang Lingkup Pembahasan.....	5
1.2.1 Batasan Materi	6
1.2.2 Batasan Waktu	6
1.3 Rumusan Permasalahan.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Kerangka Dasar Teori	7
1.5.1 Perspektif Feminisme Radikal	9
1.5.2 Konsep Grassroot Level Peace Building (Conflict Transformation)	12
1.6 Argumen Utama.....	17

1.7	Metode Penelitian.....	18
1.7.1	Metode Pengumpulan Data	18
1.7.1	Metode Analisis Data.....	18
1.8	Sistematika Penulisan	21
BAB 2.	NAGA MOTHER’S ASSOCIATION	17
2.1	Sejarah Terbentuknya NMA	17
2.2	Mekanisme Kerja NMA.....	18
2.3	Upaya NMA dalam Proses Perdamaian.....	20
2.3.1	Kampanye Berpuasa di Manipur.....	21
2.3.2	Kampanye Bugil di Manipur	22
2.3.3	NMA Memasuki Identitas Politik	22
2.3.4	Aksi Duduk di Gerbang Mao.....	23
2.3.5	Upaya perdamaian: Dialog NMA dengan NSCN-IM	24
2.3.6	Proses perundingan di luar negara: dialog dengan NSCN-IM	25
2.3.7	Kampanye “listen your mother before you kill your brother”	26
2.3.8	Kampanye Perdamaian: Shed No More Blood.....	27
2.3.9	Perundingan “kitchen politic”: NMA dengan NSCN-IM dan NSCN-K	29
2.3.10	Upaya perdamaian NMA Pasca Konflik.....	31
2.3.11	Mempertahankan Perdamaian	33
BAB 3.	KONFLIK DI NORTHEAST INDIA	37
3.1	Sejarah Konflik di Northeast India	37
3.1.1	Etnis di Northeast India.....	37
3.1.2	Pembagian Wilayah di Northeast India.	39
3.1.3	Konflik Northeast India Pasca Kemerdekaan India	44

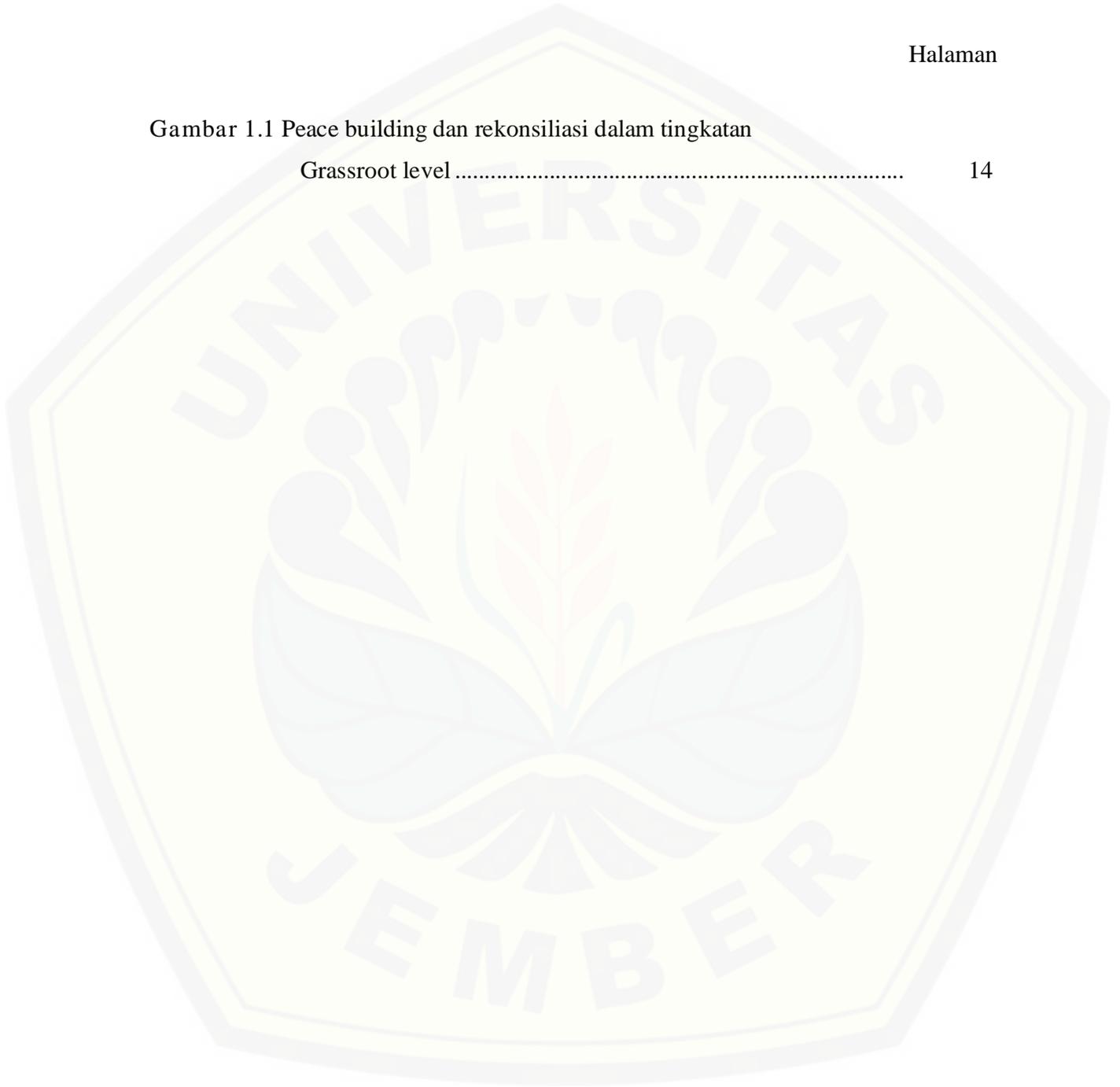
3.1.3.1 Pemberontakan di Nagaland.....	45
3.1.3.2 Pemberontakan di Assam	55
3.1.3.3 Pemberontakan di Manipur	73
3.1.3.4 Pemberontakan di Tripura	80
3.1.3.5 Pemberontakan di Meghalaya	84
3.1.3.6 Pemberontakan di Mizoram	87
3.1.3.7 Pemberontakan di Arunachal Pradesh.....	89
3.1.3.8 Pemberontakan di Sikkim.....	91
3.2 Dampak Gencatan Senjata di Northeast India	92
3.3 Kondisi Wanita dan Anak-anak dalam Konflik di Northeast India	96
BAB 4. PERAN NMA (NAGA MOTHER’S ASSOCIATION) DALAM PROSES PERDAMAIAN DI NORTHEAST INDIA	99
4.1 Local Peace Commissioner.....	99
4.1.1 Kampanye Shed no more blood	99
4.1.2 kampanye listen your mother before you kill your brother	99
4.1.3 Negosiasi antara NMA dan NSCN-IM.....	100
4.1.4 Demonstrasi NMA kepada ASPFA	102
4.1.5 Dialog pembebasan sandra dengan Meira Paibis.....	103
4.2 Prejudice Reduction Actor: Kitchen politic	103
4.3 Grassroot Trainer: seminar Journey of Conscience.....	104
4.4 Phycosocial Work Post-war Trauma	105
BAB 5. KESIMPULAN	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN	110

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1	Persentase Etnis di Northeast India..... 38
Tabel 3.2	data pembagian wilayah hutan di Assam-Nagaland 40
Tabel 3.3	wilayah yang ditempati etnis Naga dan non-Naga..... 42
Tabel 3.4	Fatalities in insurgencies and terrorist conflicts in India's Northeast, 1992-2001..... 92
Tabel 3.5	Fatalities in Terrorist Violence in India's Northeast: 2005-2013 95

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Peace building dan rekonsiliasi dalam tingkatan Grassroot level	14



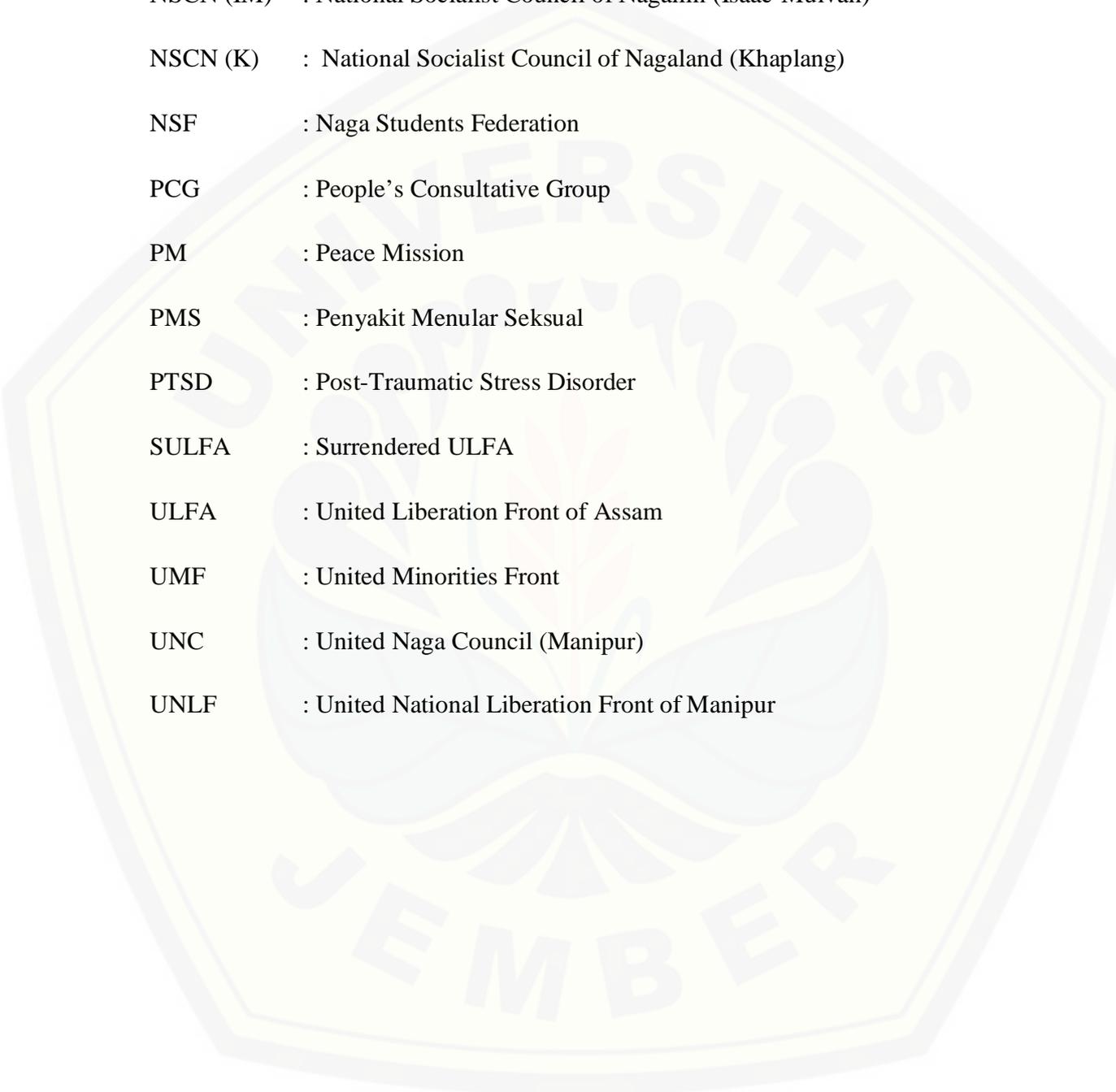
DAFTAR SINGKATAN



AAGSP	: All-Assam Gana Sangram Parishad (All Assam Council of People's Movement)
AASU	: All-Assam Students Union
ABSU	: All-Bodo Students Union
ADC	: Autonomous District Council
AFSPA	: Armed Forces (Special Powers) Act, 1980
AFSPA	: Armed Force Special Power Act
AGP	: Asom Gana Parishad (Assam People's Council)
AIDS	: Acquired Immune Deficiency Syndrome
AJYCP	: Asom Jatiyatabadi Yuba Chhatra Parishad
BLT	: Bodo Liberation Tigers
BNLF	: Bodo National Liberation Front
BTC	: Bodoland Territorial Council
CNBC	: Council of Nagaland Baptist Churches
CRG	: Calcutta Research Group
DGHC	: Darjeeling Gorkha Hill Council



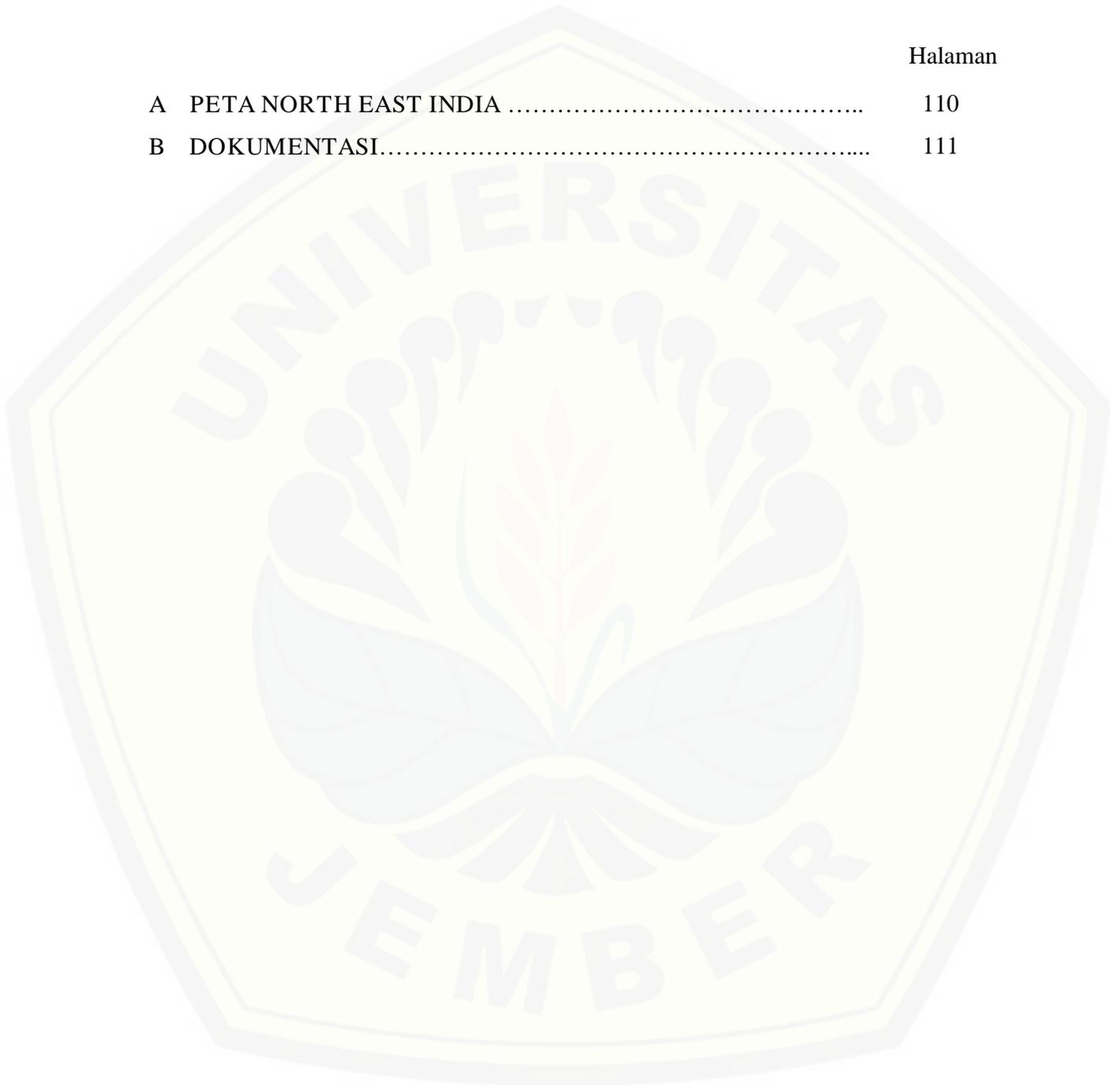
FGN	: Federal Government of Nagaland
FGN	: Federal Government of Nagaland
GNLF	: Gorkhaland National Liberation Front
GOI	: Government of India
HIV	: Human Immuno Deficiency Virus
HPC	: Hmar People's Convention
IUD	: Intravenous User of Drugs
KLO	: Kuki Liberation Organization
KNO	: Kuki National Organization
LSM	: Lembaga Swadaya Masyarakat
MNF	: Mizo National Front
MNF	: Mizo National Front
MOU	: Memorandum of Understanding
NMA	: Naga Mothers Association
NNC	: Naga National Council
NNP	: Naga National Party
NPC	: Naga People's Convention
NPFNK	: Naga People's Friends Network Korea



NSACS	: Nagaland State AIDS Control Society
NSCN (IM)	: National Socialist Council of Nagalim (Isaac-Muivah)
NSCN (K)	: National Socialist Council of Nagaland (Khaplang)
NSF	: Naga Students Federation
PCG	: People's Consultative Group
PM	: Peace Mission
PMS	: Penyakit Menular Seksual
PTSD	: Post-Traumatic Stress Disorder
SULFA	: Surrendered ULFA
ULFA	: United Liberation Front of Assam
UMF	: United Minorities Front
UNC	: United Naga Council (Manipur)
UNLF	: United National Liberation Front of Manipur

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A PETA NORTH EAST INDIA	110
B DOKUMENTASI.....	111



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

NMA (Naga Mother's Association) adalah sebuah NGO (non government organization) lokal di India. Organisasi ini dibentuk oleh seorang perempuan yang bernama Neidonuo Angami.¹ Pada mulanya, organisasi ini merupakan sebuah perkumpulan ibu-ibu yang secara sukarela menampung anak-anak dan perempuan korban konflik kekerasan di wilayah Nagaland, Northeast India. NMA terbentuk pada tahun 1984 sebagai respon kepedulian masyarakat sipil khususnya perempuan terhadap banyaknya korban konflik yang terjadi di Northeast India.²

Sejak akhir tahun 1940 Northeast India merupakan wilayah yang sarat dengan konflik. Pada sejarahnya hal ini dikarenakan perbatasan geografis yang dibuat oleh Inggris pada masa penjajahan untuk kepentingan ekonomi dan strategi pertahanan keamanan terhadap China dan Burma tanpa mempertimbangkan pergerakan suku asli di masing-masing wilayah.³ Letak geografis Northeast India yang jauh dari pemerintahan pusat India membuat distribusi dan perkembangan ke wilayah tersebut sangat minim, sehingga masyarakat Northeast India merasa terdiskriminasi oleh pemerintah India secara ekonomi. Perbedaan etnis antara Masyarakat India mainland dan Northeast India juga menjadi alasan untuk membuat batasan hak yang tidak adil bagi masyarakat Northeast India dalam pendidikan, hukum dan politik.⁴

¹PeaceWomanAcrossTheGlobe(http://www.1000peacewomen.org/eng/friedensfrauen_biographiengefunden.php?WomenID=1289; diakses 20 april 2013)

²Northeast India merupakan bagian teritori Negara India yang berada di wilayah timur laut wilayah India. Letak Northeast India berada di ujung timur laut terluar wilayah India yang berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, Nepal dan China. Wilayah tersebut terdiri dari 8 negara bagian yaitu: Sikkim, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh dan Assam. Secara geografis Northeast India merupakan wilayah yang terisolasi dari pemerintahan pusat Negara India di New Delhi. Satu-satunya jalan yang menghubungkan wilayah Northeast India ke pemerintahan pusat India adalah melewati negara bagian Sikkim yang disebut Koridor Siliguri atau leher ayam. (Subir.Bhaumik..“Pemberontakan di Timur Laut India: Konflik, Pemilihan dan Perubahan”, East West Center Washington Working Papers No10.Washington: East West Center. 2007.hal.2.)

³Masing-masing suku memiliki tanah warisan yg di wariskan turun temurun dangan batasan wilayah tertentu yg tidak dipertimbangkan oleh Inggris sehingga pasca kemerdekaan India hal ini menjadi rumit dikarenakan batasan wilayah yang ditentukan Inggris memotong banyak batasan wilayah yang sudah ditentukan oleh suku-suku yang berada di Northeast India. Bhaumik, Subir.2007.“Pemberontakan di Timur Laut India: Konflik, Pemilihan dan Perubahan”, East West Center Washington Working Papers No10.Washington: East West Center, hal.4.

⁴ Ditinjau dari segi etnis dan budaya, masyarakat Northeast India jauh berbeda dengan masyarakat india pada umumnya. Masyarakat India mainland mayoritas adalah etnis dravida sedangkan masyarakat Northeast India mayoritas adalah etnis mongol-tibet. Menurut sejarah, Northeast India adalah wilayah rute migrasi terbesar sejak

Konflik di Northeast India sejak 1960-2011 telah berlangsung selama lebih dari 60 tahun. Pemberontakan terjadi di negara-negara bagian menuntut kemerdekaan dan wilayah perbatasan yang lebih luas. Konflik etnis antar negara bagian juga meletus ketika banyak terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak di masing-masing perbatasan.

Konflik telah dimulai pada awal tahun 1950 setelah serah terima wilayah India oleh Inggris di Nagaland, pemberontakan sudah mulai terjadi di kawasan Northeast India. NNC (Naga National Council) adalah kelompok pertama yang mengadakan pemberontakan di wilayah Nagaland. Di Mizoram pemberontakan baru terjadi pada tahun 1960. Gerakan Nasional Kemiskinan Miso (Miso National Famine Front - MNFF) mencoba mengambil alih kota di bukit Miso. Manipur adalah negara bagian yang paling keras sepanjang konflik di Northeast India. Tuntutan kelompok pemberontak di Manipur beragam, tetapi kemerdekaan dari Negara India adalah tuntutan utama.

Di Assam, pemberontakan memiliki corak yang berbeda. Ketika kelompok pemberontak lain sedang menuntut hak-haknya terhadap Negara India, kelompok pemberontak di Assam mempermasalahkan garis batas antara negara bagian Nagaland dan negara bagian Assam. Puncaknya terjadi pada Februari tahun 1983, kelompok yang menamakan dirinya All Assam Student Union (AASU) dengan prinsip anti imigran melakukan kekerasan terhadap kaum muslim. Korban jiwa sebanyak 1800 muslim di Desa Neville, Nagaland. Sikkim dan Arunachal Pradesh tidak begitu sarat dengan konflik meski ada beberapa konflik antarsuku di wilayah tersebut.⁵

Terhitung dari tahun 1960 sejak diserahkannya wilayah India oleh Inggris, konflik kekerasan di Northeast India adalah yang paling lama. Jumlah korban jiwa sejak tahun 1992-2001 adalah 12.181 jiwa dari setiap wilayah di Northeast India baik masyarakat sipil, militer pemerintah India, dan kelompok pemberontak.

Nasib masyarakat sipil terutama para perempuan di Northeast India yang berada di tengah-tengah wilayah konflik terintimidasi oleh kelompok-kelompok pemberontak. Perempuan dan anak-anak adalah sasaran para kelompok yang bertikai. Kelompok

abad ke 12 sehingga etnis dan budayanya menjadi beragam. (Kojam, Shri Radha Binod. 2010. "Dampak aktivitas Pemberontak di Timur Laut India terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi dan Solusinya". washington: east west center. hal:120)

⁵ Sikkim adalah wilayah Northeast India yang paling dekat dengan Pemerintah India, wilayahnya kecil dan dapat dikontrol. Arachunal Pradesh pada mulanya merupakan distrik utama di wilayah Northeast India. Inggris menempatkan administrasinya di wilayah tersebut pada masa penjajahan. Maka dari itu pembangunan dan kesejahteraan tidak menjadi masalah bagi masyarakat di Arachunal Pradesh. (www.hindustantimes.com/rssfeed/Guwahati/NEI-Centre-peace-talks-to-begintoday/Article1-660389.aspx. Diakses 25 Februari 2013)

pemberontak memanfaatkan para perempuan dari etnis tertentu sebagai objek kekerasan seksual untuk memicu konflik terhadap kelompok etnis yang dimaksud. Para perempuan yang diperkosa seringkali hamil dan tidak mengetahui bapak dari anak yang dikandung, sehingga memicu kemarahan para suami dan laki-laki di wilayahnya. Hal ini mengakibatkan kekerasan baru bagi para perempuan yang diperkosa karena laki-laki berpikir mereka mengandung atau memiliki anak dari kelompok musuh. Para anak laki-laki dan pemuda dipaksa menjadi militan untuk kelompok-kelompok pemberontak. Pemerintah melakukan perlindungan dengan cara mengungsikan mereka di tempat yang aman. Pengungsi yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak ditempatkan di kawasan kota-kota di India mainland tetapi kesejahteraan dan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintahan India hanya menjadi bentuk lain dari diskriminasi di kalangan masyarakat India mainland. Pemerksaan dan penyiksaan terhadap perempuan juga sering terjadi di kamp-kamp pengungsian yang dilakukan oleh masyarakat mainland.

Pemerintah India mengusahakan adanya perdamaian di kawasan Northeast India dengan membentuk kelompok-kelompok perdamaian seperti NPC (Naga People's Convention), PM (Peace Mission), PCG (People's Consultative Group), PCPI (People's Committee of Peace Initiative). Di beberapa level konflik, cara ini berhasil tetapi kekerasan masih tetap terjadi. Perdana menteri India Manmohan Singh turut menyumbangkan idenya dengan memaparkan mengenai cara yang "out of the box" untuk meredam konflik kekerasan di Northeast India tetapi tak ada satupun cara dari pemerintah yang bisa meredam kekerasan di wilayah tersebut.

NMA pada mulanya adalah sebuah organisasi yang tidak berkecimpung di bidang peace process. Para ibu-ibu di wilayah Nagaland yang diketuai oleh Neidonuo Angami menampung dan membantu para korban kekerasan akibat konflik kekerasan. Korban kekerasan yang didominasi oleh kaum perempuan dan anak-anak tercatat pada tahun 2006-2011 adalah 1618 jiwa.⁶ Para perempuan korban pemerksaan seringkali dibuang oleh keluarganya karena dianggap "kotor". NMA, selaku perkumpulan perempuan merasa harus menampung dan melindungi mereka secara fisik dan psikis. Selain itu NMA juga merawat anak-anak hasil perkosaan yang seringkali dibuang atau dititipkan secara langsung.

NMA mengambil bagian dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah India maupun Kelompok pemberontak. Hal ini tidak berjalan dengan mulus, mengingat perempuan di wilayah Northeast India merupakan gender di bawah kekuasaan laki-laki. Kemunculan

⁶ Research Associate, Institute for Conflict Management
(http://www.satp.org/satporgtp/sair/Archives/sair11/11_34.htm#assessment2: diakses pada 20 april 2013)

organisasi perempuan di tengah-tengah sistem patriarki yang kuat merupakan usaha yang tidak mudah. Meski demikian, NMA terus melakukan komunikasi dengan pemerintah dan kelompok pemberontak. Kinerja NMA beragam, walau bernama Naga Mother Association, NMA tidak hanya memiliki lingkup wilayah di sekitar Nagaland tetapi juga di seluruh Northeast India, biasanya NMA memasuki kelompok-kelompok lokal yang telah terbentuk sehingga dapat membantu peran ibu-ibu atau wanita dalam kelompok tersebut.

Beberapa peristiwa yang dilakukan oleh NMA yaitu, Pada tanggal 15 Juli 2004, dua belas perempuan dari kelompok ibu-ibu Manipuri yang juga dalam bergerak atas nama NMA, diketuai oleh Meira Paibis, menanggalkan pakaian di depan kantor pusat paramiliter Assam Rifles di Imphal, ibukota negara bagian Manipur. Mereka mengangkat tinggi-tinggi poster yang ditulis dengan tinta berwarna merah darah: 'Tentara India, Perkosa Kami'. Ibu-ibu tersebut mengutuk kasus pemerkosaan dan tewasnya Manorma Devi yang berumur 33 tahun dalam tahanan, yang mana dituduh oleh petugas keamanan sebagai bagian dari kelompok pemberontak. Irom Chanu Sharmila salah satu anggota NMA muncul dan tumbuh menjadi legenda hidup sebagai 'Perempuan besi dari Manipur' di tengah-tengah konflik antara rakyat dan pemerintah India mengenai perjuangan ibu-ibu menuntut keadilan. Pada 2 November 2000, sepuluh orang warga sipil yang menunggu di halte bus di Malom dekat Imphal ditembak oleh pasukan keamanan karena diduga sebagai pemberontak. Kejadian ini merupakan perwujudan rutin dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dibawah AFSPA (Armed Force Special Power Act).⁷ Sebagai balasan, Sharmila yang berumur 21 tahun memutuskan untuk berpuasa sampai mati untuk memprotes kekerasan negara setelah pembantaian di Malom.⁸ Sejak akhir tahun 2008, protes puasa pengikut Gandhi telah menjadi simbol pertahanan moral perempuan Manipur melawan militerisasi negara. Puncak perjuangan NMA adalah ketika ikut berpartisipasi dalam perjanjian dengan para pemberontak, di ibukota negara bagian Kohima, NMA yang masuk dalam berbagai organisasi memainkan

⁷AFSPA (Armed Forces Special Power Act) adalah militer bentukan parlemen India untuk menjaga (menertibkan) daerah di India yang berpotensi konflik, di bentuk pada tanggal 11 september 1958. Pembentukan militer ini menuai banyak kritik karena kebrutalannya dalam menangani konflik sehingga menjadi kekerasan dan pembunuhan. Pada akhirnya AFSPA di ketahui sebagai pemasok senjata dan pendukung terhadap suatu kelompok pemberontak di Manipur. Asian Legal Resource Centre, "INDIA: AFSPA mendukung pemberontakan bersenjata di Manipur", Pernyataan pers, 26 Juli, (2010). www.alrc.net/doc/mainfile.php/alrc_st2010/624/. Diakses 22 Februari 2013.

⁸ Malom merupakan sebuah kota di wilayah Manipur. Pada tanggal 2 november 2000, terjadi penembakan oleh AFSPA terhadap 10 orang warga sipil yang sedang menunggu bus di halte. Kasus tersebut tidak pernah usut oleh pemerintah dan tidak ada persidangan yang adil bagi pelaku penembakan walaupun alasan penembakan tergolong pelanggaran karena tidak adanya bukti bahwa para korban adalah pelaku pemberontakan di Manipur. North East Network, Kekerasan Terhadap Perempuan di Timur Laut India: Sebuah Penyelidikan, (India: North EastNetwork,2004).<http://ncw.nic.in/pdfreports/Violence%20against%20women%20in%20North%20East%20India%20-%20An%20Inquiry.pdf>. Diakses 21 Februari 2013.

peran utama pemantauan dan advokasi pada dialog antara Menteri Dalam Negeri Pemerintah India dan Thuingaleng Muivah, Sekretaris Jenderal NSCN-IM. Pegawai pemerintah terkejut karena Muivah mengundang anggota organisasi kemasyarakatan sipil Naga ke pertemuan tingkat tinggi ini. Termasuk di antaranya Naga Ho Ho, Asosiasi Ibu-ibu Naga (Naga Mother's Association, NMA) dan perwakilan yang didominasi perempuan dari Gerakan Rakyat Naga untuk Hak Asasi Manusia (Naga People's Movement for Human Rights). Sebelumnya, pemerintah telah mengadakan perundingan, tapi secara terpisah dengan perwakilan masyarakat sipil termasuk lawan bicara perempuan. Perundingan Kohima tahun 2010 merupakan pertanda yang cukup signifikan bagaimana perempuan-perempuan Naga telah mengubah peran publik mereka : tidak lagi pasif hadir sebagai penanda kelompok budaya, mereka juga berpartisipasi sebagai lawan bicara yang seimbang.⁹ Interaksi mereka memperlihatkan bagaimana pemberontak bersenjata nasionalis dan –lebih enggan- agen pemerintah menyetujui perempuan sebagai pencipta perdamaian mendapatkan pengakuan dan legitimasi dalam perundingan damai.¹⁰

Penulis tertarik mengambil bahasan ini dari sudut pandang feminisme melalui peran NMA di Northeast India dalam proses perdamaian karena kelompok perempuan yang berada di daerah konflik dan patriarki ini dapat tumbuh dan berkembang. NMA yang pada mulanya merupakan perkumpulan ibu-ibu yang membantu korban konflik saja akhirnya dapat memosisikan diri setara dengan laki-laki dan berpartisipasi aktif untuk melindungi kaumnya dan menyumbangkan suaranya dalam proses perdamaian di Northeast India.

Dengan melihat kondisi di Northeast India dan perjuangan MNA yang cukup kompleks tersebut, maka penulis mencoba menuangkannya dalam sebuah penelitian berjudul: "Peran NMA (Naga Mother's Association) Dalam Proses Perdamaian di Northeast India."

1.2 Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam membahas suatu fenomena, perlu adanya suatu pembatasan/ruang lingkup pembahasan yang jelas supaya pembahasan tidak terlalu luas dan mengambang. Oleh karena itu, perlu diarahkan agar sesuai dengan pokok permasalahan yang dimaksud serta mempermudah di dalam pengumpulan dan pemilahan data/informasi. Untuk itu, penulis menggunakan dua batasan, yaitu batasan materi dan batasan waktu.

⁹ Rana, R. (2005). *Silencing International Obligations and the Armed Forces Special Powers Acts, 1958, Article 1671*, Institute of Peace and Conflict Studies: New Delhi.

¹⁰ "one step back, two steps forward", Naga Woman Movement for Human Rights: 25 years, Kohima, Nagaland: NPHMR. 2000. Hal 104

1.2.1 Batasan Materi

Batasan materi bertujuan untuk menunjukkan ruang pembahasan suatu peristiwa atau objek yang akan dianalisis. Batasan materi skripsi ini berkisar pada: peran dalam kaitannya dengan upaya-upaya NMA (Naga Mother's Association) dalam menciptakan kondisi damai (tidak adanya peperangan atau kekerasan) di wilayah Northeast India. Tapi penulis tidak menutup kemungkinan jika ada hal-hal lain sebagai data yang mendukung untuk dibahas dalam skripsi ini.

1.2.2 Batasan Waktu

Batasan waktu bertujuan untuk menunjukkan rentang waktu terjadinya peristiwa yang akan dibahas. Dalam penulisan karya ilmiah, batasan waktu akan memperjelas kapan masalah yang dikaji terjadi. Dalam hal ini penulis menetapkan batasan waktu ketika NMA (Naga mother's Association) memulai langkah besar pada tahun 1997 dengan mengadakan perundingan konflik dengan pemberontak dan pemerintah setelah gencatan senjata yang terjadi, mengadakan kampanye dan aksi keras menolak pemberontakan, hingga tahun 2011 ketika perundingan tertinggi dan berlangsung di luar Negara terjadi dengan dampak berkurangnya korban jiwa sampai dengan titik terendah di Northeast India. Namun dalam penulisan ini, penulis juga mengambil beberapa peristiwa atau momen yang terjadi sebelum tahun 1997 sebagai peristiwa pendukung.

1.3 Rumusan Permasalahan

Suatu penelitian berawal dari suatu peristiwa/fenomena yang terjadi. Dari peristiwa itu kemudian dirumuskan suatu permasalahan yang akan dijadikan objek penelitian, yaitu tujuan penelitian ini. Permasalahan akan memberikan arah bagi pelaksanaan penelitian, sehingga perlu dirumuskan dengan jelas dan tegas tanpa mengurangi arti penting pokok permasalahan tersebut. Dalam hal ini, diharapkan akan ditemukan suatu jawaban dari permasalahan yang dikaji. Sehingga tidak semua kajian bisa disebut sebagai masalah.

Dalam karya tulis ini, rumusan masalah yang penulis ajukan adalah:

“Bagaimana Peran NMA (Naga Mother's Association) dalam Proses Perdamaian di Northeast India?”

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan peran NGO lokal dalam kaitannya dengan Perempuan (feminisme) yaitu NMA (Naga Mother's Association) di kawasan konflik (Northeast India) untuk membantu menciptakan suatu perdamaian.

1.5 Kerangka Dasar Teori

Dalam suatu penulisan ilmiah, perlu ditetapkan suatu kerangka dasar pemikiran. Kerangka dasar pemikiran bisa berupa konsep-konsep atau teori yang disusun secara sistematis untuk membantu dalam penulisan dan pemahaman analisis yang dilakukan. Teori dapat membantu kita dalam menjelaskan dan meramalkan fenomena politik dan dengan demikian juga membantu kita dalam pembuatan keputusan praktis.¹¹

“Teori adalah suatu gagasan atau kerangka berpikir yang mengandung penjelasan, ramalan, atau anjuran pada setiap bidang penulisan. Dalam hal ilmu pengetahuan empiris (termasuk ilmu politik), teori mengacu pada kaitan logis pada seperangkat proposisi yang memastikan adanya hubungan antara variabel-variabel dengan maksud menjelaskan atau meramalkan atau keduanya.”¹²

Pada hakikatnya, teori merupakan hal yang sangat diperlukan dalam sebuah penelitian ilmiah karena dapat membantu menganalisis data-data yang relevan dengan pokok permasalahan serta menjembatannya dengan hipotesis.

Teori digunakan untuk membantu kita dalam menentukan tujuan serta arah penelitian dan dalam memilih konsep yang tepat untuk membentuk suatu hipotesis.¹³ Teori adalah suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Berteori adalah mendeskripsikan apa yang terjadi. Menjelaskan mengapa itu terjadi, dan mungkin juga yang meramalkan kemungkinan berulangnya kejadian itu dimasa depan.¹⁴ Sedangkan konsep adalah abstraksi yang mewakili suatu objek, sifat suatu objek, atau suatu fenomena tertentu.¹⁵

Dalam analisa permasalahan pada penulisan ini, penulis menggunakan perspektif Feminisme Radikal Kultural dan Konsep Grassroot Level Peace Process

1.5.1 Perspektif Feminisme Radikal kultural

Feminis Kultural Radikal menyatakan bahwa lebih baik menjadi perempuan/feminin dibandingkan menjadi laki-laki/maskulin. Perempuan disarankan untuk tidak mencoba menjadi seperti laki-laki.¹⁶

¹¹ Mohtar Mas' oed.. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta : LP3ES. 1990

¹² J. C Plano, dkk. Kamus Analisa Politik. Jakarta: CV Rajawali. 1985

¹³ Koentjoroningrat. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2000.

¹⁴ Moehtar Mas' oed.. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. (Jakarta : LP3E. 1990. hlm: 185

¹⁵ Ibid. hal. 21

¹⁶ Tong, Rosemarie Putnam. 2008. Feminist Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Femins. Yogyakarta: Jalasutra. hal. 30

Analisis tentang Penindasan Utama terhadap Gender (Maskulin dan Feminin)

Gayle Rubin salah satu feminis radikal menganggap bahwa system gender menjadi sebuah kesatuan yang mengatur perubahan transformasi sosial dari seksualitas biologis menjadi produk aktivitas manusia.¹⁷ Misalnya faktor kromosom, anatomi dan hormon lalu direka menjadi seperangkat dari identitas ‘maskulin’ dan identitas ‘feminin’.misalnya laki-laki dikodratkan menjadi aktif dan agresif, sedangkan sebaliknya perempuan pasif dan pasrah atau menerima. Rekaan seperti berdampak di satu sisi, memberdayakan laki-laki, namun sebaliknya, di sisi yang lain, tidak menguntungkan perempuan. Selama ini perilaku sosial budaya masyarakat selalu dikait-kaitkan dengan kodrat biologis atas dasar turunan dari rekaan tersebut.¹⁸

Pemikiran Feminis Kultural Radikal : French dan Daly.

Marylin French dalam bukunya “Beyond Power” menyatakan bahwa perbedaan atribut-atribut perempuan dan laki-laki lebih karena kodrat biologis ketimbang ciptaan budaya. Ia percaya bahwa seksisme adalah salah satu model dari isme-isme lain selain rasisme dan kelasisme.. Menurutnya, terdapat suatu “jarak” yang menjadikan jurang terbuka lebar antara manusia dan alam. Keinginan untuk menguasai alam/perempuan melahirkan patriarki, sebuah sistem hirarkis yang nilai-nilainya berdasarkan’kekuasaan terhadap (power-over).¹⁹

Mary Daly, mengidentifikasi bahwa nilai-nilai maskulin tradisional sebagai sebuah ancaman bagi perempuan. Karena terminology di bawah sifat-sifat feminine yang positif seperti cinta, kelembutan, memelihara dan berbagi, bisa dibelokkan oleh sistem patriarchal menjadi kesalahan yang sering dilakukan. Ia mengajak perempuan untuk mengatakan ‘tidak’ pada moralitas pengorbanan, dan mengatakan “ya” pada etika diri. Dalam tahap ini perempuan berdiri sendiri dalam menanggapi tubuhnya, kebutuhan keinginan dan minat dirinya.²⁰

Konsep feminis radikal kultural dipakai oleh penulis karena NMA sebagai pencipta perdamaian memiliki potensi biologis dari wanita dan secara kultur penuh dengan pengorbanan, kepasrahan, kepasifan dapat memakai cara-cara tersebut dalam suatu tindakan

¹⁷ Ibid. hal. 33

¹⁸ Ibid. hal 46

¹⁹ Ibid. hal 47

²⁰ Ibid. hal 59

nyata sebagai seorang perempuan yang tidak meniru maskulinitas laki-laki untuk menciptakan perdamaian.

Kaum feminis radikal kultural tidak perlu mengangkat senjata, tidak perlu memakai cara-cara keras dan maskulin untuk mencapai tujuan mereka, mereka tetap menjadi seorang perempuan dengan segala kelebihan dan kekuarangan mereka baik secara kodrat maupun budaya menggunakan cara pasif, lembut, penuh keperempuanan di dalamnya. Dialog-dialog yang dilakukan oleh NMA selalu bersifat kompromif, kampanye yang diadakan lebih condong pada kesadaran hati, bahkan ancaman kepada jendral-jendral pemberontak yang dilakukan NMA memanfaatkan sifat biologis wanita demi menciptakan perdamaian.

Pada akhirnya, penulis menginginkan cara-cara feminis radikal-kultural dapat dianggap sebagai sebuah aktivitas yang signifikan dalam proses perdamaian, salah satunya mengorganisir perdamaian, dan pengakuan perempuan secara transnasional. Hal inilah yang membuat partisipasi perempuan terlihat di dalam riset yang sensitif dengan gender memiliki relevansi kebijakan dan efek materialis. Para penganut feminis radikal kultural beranggapan bahwa cara-cara feminis dikenal sebagai aspek fundamental di dalam aktifitas perdamaian, mereka akan dianggap setara dalam pembuatan kebijakan.

1.5.2 Konsep Grassroot Level Peace Building (Conflict Transformation)

Konsep peacebuilding pada dasarnya menggambarkan perubahan yang sangat signifikan dalam kaitannya dengan penanganan konflik, yakni dari strategi yang berorientasi pada penanganan konflik menjadi strategi yang berorientasi pada upaya untuk membangun perdamaian.²¹ Berbagai konflik yang berkembang setelah perang dingin memiliki karakter yang cenderung sangat kompleks, dan oleh karenanya memerlukan pemahaman yang lebih baik dan strategi yang lebih komprehensif. Kompleksitas konflik setelah perang dingin tidak dapat dipahami semata-mata sebagai produk dari perbedaan kepentingan ataupun identitas. seperti yang ditunjukkan oleh Galtung (1969), misalnya, konflik terjadi karena interaksi dari tiga komponen: kontradiksi (perbedaan), sikap dan perilaku. kompleksitas konflik setelah perang dingin juga muncul dalam karakternya yang sangat khas, yakni cenderung berkepanjangan, berulang-ulang dan disertai dengan kekerasan. konflik dengan karakter ini dikenal dengan *protracted social conflict* dan, seperti halnya Galtung, *protracted social*

²¹[http://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding dan Resolusi Konflik dalam perspektif](http://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspektif) (diakses pada 3 Juni 2014)

conflict tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan ataupun kontradiksi, melainkan juga oleh upaya-upaya dari kelompok-kelompok komunal untuk memperjuangkan kebutuhan-kebutuhan dasar mereka seperti keamanan, pengakuan, akses terhadap institusi-institusi politik serta untuk partisipasi ekonomi (azar 1991,33).dalam kaitannya dengan upaya-upaya untuk menangani konflik, berkembang berbagai strategi atau pendekatan yang berbeda, yang disebabkan oleh perbedaan asumsi dan pemahaman tentang konflik: pencegahan konflik, resolusi konflik, manajemen konflik dan transformasi konflik.

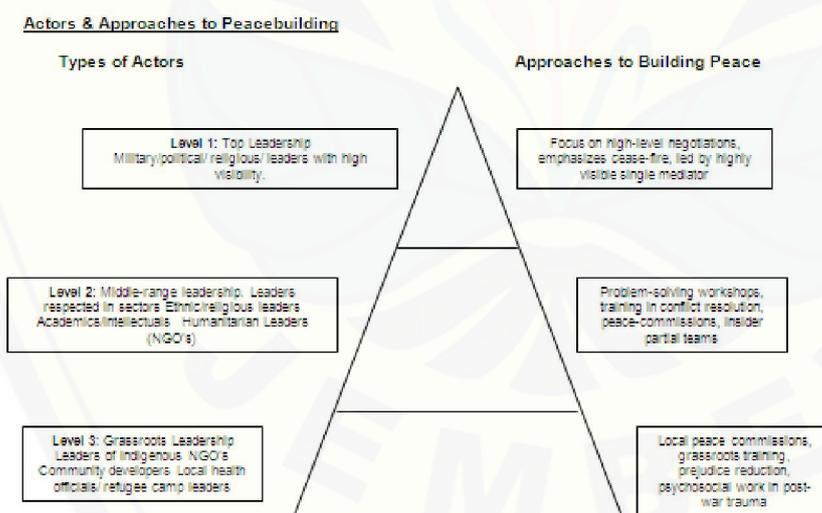
Bagi beberapa ilmuwan, penanganan konflik melalui resolusi konflik dan manajemen konflik bukanlah upaya-upaya yang didasarkan pemahaman tentang konflik yang memadai (Lederach 2003). Para penggagas strategi transformasi konflik berusaha untuk menghindarkan diri dari dikhotomi ekstrim dalam memahami konflik, yakni yang melihat konflik sebagai fenomena jangka pendek dan yang melihat konflik sebagai bagian integral dari hubungan sosial. Pendukung transformasi konflik berargumen bahwa konflik pada hakekatnya bersifat dialektik dan dinamis: [1] konflik merupakan bagian integral dalam hubungan sosial manusia, tetapi [2] konflik yang muncul juga mengubah sumber-sumber yang mendasari terjadinya konflik. Jadi, berbeda dari pandangan pendukung resolusi konflik, hubungan kausal dalam konflik tidak berlangsung dalam satu arah, melainkan timbal balik. Memperhatikan hubungan sebab akibat yang timbal balik ini, transformasi konflik dianggap lebih alamiah sebagai upaya untuk menangani konflik. Transformasi konflik memahami konflik tidak semata-mata dalam artian yang negatif atau destruktif, melainkan juga melihat potensi positif konflik. Transformasi konflik dilakukan dengan mengubah persepsi baik dalam kaitannya dengan isu, tindakan ataupun pihak lain dalam konflik. Melalui transformasi konflik, perbedaan ataupun ketidak-sesuaian bukan hanya tidak harus berujung pada konflik terbuka, tetapi bahkan juga meningkatkan saling pengertian serta memperkuat kohesi sosial. Terciptanya saling pengertian yang lebih baik dan kohesi sosial yang semakin kuat merupakan indikator bagi penanganan konflik yang berhasil. Konsep peacebuilding pada dasarnya cenderung mengakomodasi strategi penanganan konflik melalui transformasi konflik.

Grassroot level Peace building adalah keterlibatan "grassroot" yang diperankan oleh organisasi, komunitas, asosiasi dalam tatanan bawah atau masyarakat, hal ini bisa di

wakili salah satunya oleh organisasi non-pemerintah (NGO).²² Konsep Peacebuilding sering melibatkan persepsi peace process yang luas, dibandingkan dengan pendekatan konvensional (tradisional) pada resolusi konflik.

Dalam hal tujuan dan sasaran peace process, Lederach berpendapat bahwa perspektif grassroot berfokus pada corak perubahan sosial, hal tersebut merupakan link penting antara kekhawatiran jangka pendek terkait dengan pengalaman langsung dari konflik dan tujuan jangka panjang ketika masa depan, di mana konflik tersebut dapat dicegah. Lederach mengarahkan perubahan paradigma jauh dari kekhawatiran dengan penyelesaian masalah dan menuju kerangka acuan yang berfokus pada perdamaian dan membangun kembali hubungan (rekonsiliasi). Konsep ini muncul dari kekhawatiran dengan beberapa konsep sebelumnya yang menurutnya belum bisa menjawab permasalahan penyelesaian konflik secara paradigmatis. Ia menemukan bahwa misalnya konsep resolusi konflik membawa kecemasan tersendiri dengan bahaya kooptasi yang ditimbulkannya yaitu ke arah yang akan membawa kekakuan makna konflik dimana orang-orang akan menjadikannya sebagai isu kepentingan dan legitimasi. Dan ini menurutnya tidak jelas benar karena resolusi konflik tidak sejalan dengan advocacy. Resolusi konflik baginya tidak dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi sebagai akibat dari resolusi konflik tersebut.²³

Gambar 1.1 Peace building dan rekonsiliasi dalam tingkatan Grassroot level



Source: Jhon Paul Lederach, *Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington, D.C: United State Institute of Peace Press, 1997. Hlm 39

²² John Paul Lederach. *Building Peace. Sustainable Reconciliation in Divided Societies*. Washington. 1997. hlm: 67

²³ Ibid. hal. 25

kata “grassroot” menunjukkan sebuah tingkat yang merupakan dasar dari lapisan masyarakat. Menurut Richmond, aktor-aktor non-pemerintah dan lembaga memainkan peran penting dalam penciptaan perdamaian karena mereka cenderung memiliki akses tak terbatas ke zona konflik, jauh melampaui tokoh yang merupakan pejabat politik, ekonomi ataupun media.²⁴ Selama situasi konflik, kehidupan sebagian besar orang ditandai oleh masalah sehari-hari, mungkin bahkan kebutuhan mendasar untuk makan, minum dan tempat berlindung. Dalam analisis ini, untuk mengidentifikasi pada tingkat ini: aktor yang dapat membantu upaya transformasi konflik. Pada tataran grassroot level kita tidak bisa selalu berharap untuk menemukan indikator dengan visibilitas superregional seperti di mid-level, atau kekuasaan yang besar dan mempengaruhi seperti di top level. Namun, kita bisa menemukannya dengan karakteristik sebagai berikut:

- Hubungan mereka dalam masyarakat (horisontal dan vertikal); NMA merupakan NGO dan bagian dari masyarakat, mereka adalah istri sekaligus ibu yang sehari-harinya berada di tengah masyarakat.
- Perspektif mereka pada konflik (apakah mereka melihat 'gambaran besar' dan mereka melihat konsekuensi langsung dari keputusan); NMA yang beranggotakan para perempuan dalam masyarakat dan hidup ditengah-tengah konflik tentu lebih mengerti tentang konflik tersebut dari perspektif mereka.
- Kebebasan mereka untuk bergerak (dengan asumsi untuk saat ini bahwa kebanyakan orang hanya akan mengambil tindakan yang tidak terlalu membahayakan posisi mereka dalam masyarakat). Kebebasan NMA di lingkungan mereka sendiri tidak terbatas, meski konflik yang terjadi membatasi gerak-gerik mereka tetapi dalam menuangkan aspirasi, mereka tidak mendapat kesulitan dalam memobilisasi anggotanya.

Lederach menyatakan 4 hal utama dari sasaran grassroot peace building adalah:

- Local peace commission (komisi perdamaian lokal)
Komisi perdamaian lokal adalah suatu organisasi formal atau informal dalam skala lokal yang berupaya untuk mencegah, mengurangi dan menekan konflik kekerasan yang telah terjadi dengan cara kampanye, demonstrasi, negosiasi, mediasi, fasilitasi dan sebagainya. NMA sedikitnya telah melakukan 28 Mediasi untuk pemerintah dan

²⁴ Ibid.hal.33

kelompok pemberontak dan 33 negosiasi dengan para pemberontak untuk menekan skala konflik di Northeast India.

- Prejudice reduction (pengurangan prasangka)

Prejudice reduction actor adalah sebuah cara atau upaya pembinasan stereotype terhadap kelompok-kelompok yang bersengketa, semisal etnis tertentu atau gender tertentu, dalam hal ini NMA banyak memberikan aspirasinya terhadap pemerintah dan kelompok pemberontak dengan menghapus stereotype yang melekat pada perempuan di Northeast India serta perbedaan etnis pada India mainland dan Northeast Indian.

- Grassroot training (pelatihan masyarakat dalam level grassroot)

Grassroot training adalah pelatihan atau pendidikan terhadap masyarakat dalam tataran grassroot untuk lebih memahami mengenai hak-hak, peranan, upaya yang bisa dilakukan sebagai masyarakat dalam peace process. NMA mengadakan dialog dan seminar bagi sebagian besar kaum perempuan yang belum mengerti peranan mereka dalam proses perdamaian di Northeast India.

- Psychosocial work post-war trauma (psikososial trauma pasca perang)

Membantu memulihkan korban kekerasan dan ketakutan pasca perang (konflik berkepanjangan) dalam hal ini secara psikososial, yang artinya bagaimana mereka dapat kembali bersosialisasi dan sembuh secara mental akibat dari trauma pada saat terjadi kekerasan. NMA sendiri terbentuk karena mempunyai misi untuk melindungi, menampung dan membantu para korban kekerasan terutama perempuan. Secara psikis dan fisik perempuan yang menerima perlakuan tidak adil seperti diperkosa atau disiksa pada saat konflik terjadi sehingga membutuhkan NMA sebagai pendamping untuk bangkit kembali.

1.6 Argumen Utama

Pembahasan dalam suatu permasalahan yang bersifat ilmiah dirasakan perlu mengikutsertakan hipotesis dalam suatu permasalahan yang akan dibahas, apalagi setelah mengupas kerangka dasar teori sebelumnya dari hipotesis ini. Adapun definisi hipotesis menurut Sutrisno Hadi dapat diuraikan sebagai berikut:

“Dugaan yang mungkin benar atau salah, dia akan ditolak kalau salah atau palsu dan akan diterima kalau fakta membenarkannya. Penolakan dan penerimaan hipotesis dengan begitu akan tergantung pada hasil-hasil penyelidikan terhadap fakta-fakta yang dikumpulkan. Hipotesa juga dapat

dipandang sebagai konklusi yang bersifat sementara. Sebagai konklusi hipotesis tentu tidak dapat dibuat semena-mena melainkan atas dasar pengetahuan. Pengetahuan ini sebagian besar dapat diambil dari hasil-hasil dan problematika yang timbul dari penyelidikan yang mendahului dari renungan-renungan atas dasar pertimbangan-pertimbangan yang masuk akal ataupun dari hasil penyelidikan.”²⁵

Oleh karena itu, untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan pada akhir penulisan ini, maka penulis menganggap perlu menyusun suatu hipotesis dari problematika yang penulis ketahui sampai saat ini, yaitu:

Mendeskripsikan Peran NMA (Naga Mother’s Association) dengan melakukan upaya-upaya perdamaian berdasarkan grassroot level peacebuilding yaitu:

1. local peace commissioner,
2. prejudice reduction actor,
3. grassroot trainer,
4. psychosocial work post-war trauma.

1.7 Metode Penelitian

Dalam menerangkan dan memahami suatu fenomena, peneliti harus menghubungkan fenomena yang satu dengan yang lainnya, diperkuat data-data untuk selanjutnya dianalisa. The Liang Gie dalam bukunya yang berjudul Ilmu Politik mengemukakan pengertian dari metode penelitian adalah:

“cara atau langkah yang berulang kembali, sehingga menjadi pola untuk menggali pengetahuan tentang suatu gejala. Pada ujung awalnya ini merupakan cara atau langkah untuk mengumpulkan data-data atau langkah untuk memeriksa kebenaran daripada pernyataan mengenai gejala tersebut.”²⁶

Dengan demikian, metode penelitian dibagi menjadi dua, yaitu: tahap pengumpulan data dan tahap analisis data.

²⁵ Hadi Sutrisno. 1989. Metodologi Research. Yogyakarta: Andi Offset.

²⁶ The Liang Gie. Ilmu Politik: Suatu Pembahasan Tentang Pengertian, Kedudukan Lingkungan dan Metodologi. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik UGM. 1984.

1.7.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan, penulis menggunakan data kepustakaan (Library Research), karena data yang diperoleh bersifat sekunder. Dalam melakukan studi literatur, penulis mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis dengan tidak hanya mengandalkan buku-buku ilmiah saja, tetapi dari artikel-artikel, majalah, surat kabar, serta berbagai data dan informasi baik cetak maupun elektronik yang menunjang jalannya penulisan. Berbagai fasilitas yang digunakan penulis dalam pengumpulan data antara lain:

- 1) Perpustakaan FISIP Universitas Jember
- 2) Perpustakaan pusat Universitas Jember
- 3) Situs internet
- 4) Koleksi Pribadi

1.7.2 Metode Analisis Data

Metode analisa data merupakan langkah berikutnya setelah data terkumpul, kemudian data diolah dan dianalisis, yang selanjutnya akan ditarik kesimpulan dari hasil analisis tersebut. Dalam tingkatan ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagaimana umumnya penelitian kepustakaan dan karena tidak menggunakan statistik sebagai pokok analisis. Menurut Norman K. Denin, metode kualitatif berbeda dengan metode kuantitatif seperti yang diuraikan di bawah ini:

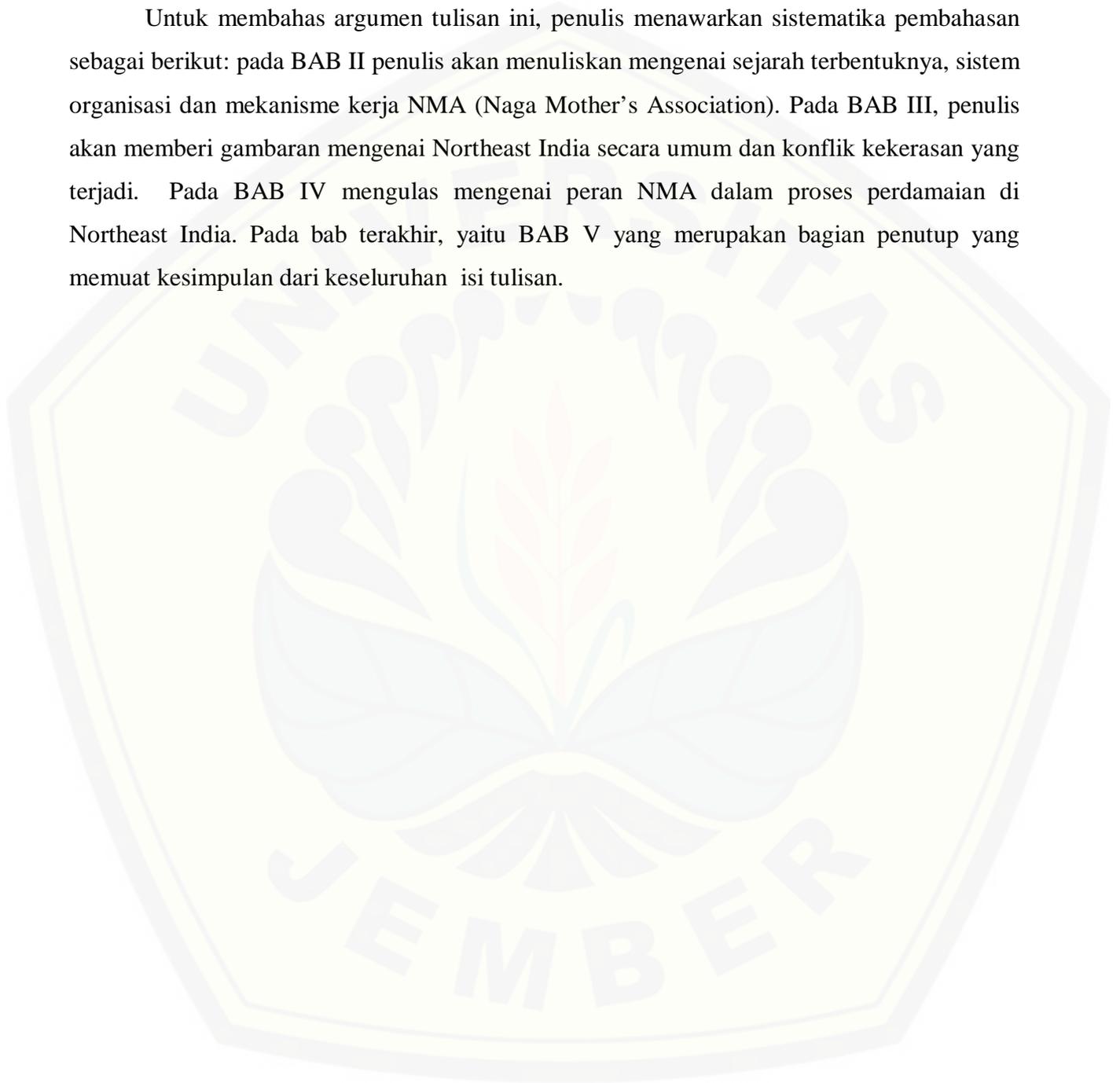
“The world quali implies an emphasis on processes and meaning that are not rigorously examined or measured (if measured at all), in term of quality, amount, intensity, frequency. Qualitative researches stress the socially constructed nature on reality in the intimate relationship between the researcher and what is studied, and the situational constraint that shape inquiry. Such researchers emphasize the value-laden nature of inquiry. They seek answers to question that stress how social experiences is created and given meaning. In contrast, quantitative studies emphasize the measurement and analysis of causal between variables not process. Inquiry is purposed to be within and value-free framework.”²⁷

²⁷ Norman. K. D. dan Yvona S. Lincoln (ed). Handbook of Qualitative Research. USA: Sage Publication.1994.

Dengan menggunakan prinsip berpikir secara ilmiah ini, penulis berusaha menganalisis data secara berkorelasi sehingga diharapkan dapat diperoleh suatu jawaban sebagai pemecahan atas permasalahan yang ada dan yang paling mendekati kebenaran ilmiah.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk membahas argumen tulisan ini, penulis menawarkan sistematika pembahasan sebagai berikut: pada BAB II penulis akan menuliskan mengenai sejarah terbentuknya, sistem organisasi dan mekanisme kerja NMA (Naga Mother's Association). Pada BAB III, penulis akan memberi gambaran mengenai Northeast India secara umum dan konflik kekerasan yang terjadi. Pada BAB IV mengulas mengenai peran NMA dalam proses perdamaian di Northeast India. Pada bab terakhir, yaitu BAB V yang merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi tulisan.



BAB 2. NAGA MOTHER'S ASSOCIATION

2.1 Sejarah Terbentuknya NMA

NMA adalah organisasi voluntir non-pemerintah yang terbentuk pada 14 Februari tahun 1984. Organisasi ini muncul sebagai respon dari seorang wanita yang bernama Neidonuo Angami dan kawan-kawan perempuannya yang peka terhadap masalah kesejahteraan masyarakat Nagaland pada umumnya, wanita dan anak-anak pada khususnya.

Pada mulanya, Neidonuo Angami dan beberapa ibu-ibu di kawasan Nagaland secara sukarela berperan membantu korban kekerasan rumah tangga yang didominasi oleh anak-anak dan perempuan. Kekerasan tersebut seringkali di lakukan oleh suami-suami yang terpengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang. Konflik yang terjadi merupakan konflik internal keluarga. Neiduno mulai mencari akar dari masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak di kawasannya dengan memantau perkembangan sosial di Nagaland yang sudah banyak di masuki alkohol dan obat-obatan. Fokus awal masalah sosial di kawasan Nagaland termasuk menyadarkan masyarakat akan bahaya penyebaran AIDS/HIV telah menjadi program kerja para ibu-ibu naga ini. Selain itu, peredaran alkohol dan obat-obatan yang merupakan akar masalah kekerasan bagi anak-anak dan perempuan pun menjadi sorotan NMA.

Pada akhir tahu 1970an masalah sosial seperti kekerasan dalam rumah tangga akibat alkohol dan obat-obatan terlarang bukanlah satu-satunya masalah yang menyebabkan kekerasan di Nagaland. Sejak tahun 1960 konflik yang terjadi di Northeast India membawa dampak buruk terhadap wanita dan anak-anak. Dampak buruk seperti kekerasan fisik, pemerkosaan, dipaksanya anak-anak menjadi militan, korban target konflik, dan bermacam-macam kondisi lainnya.

NMA memfokuskan program kerja mereka kearah yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat Nagaland pada saat itu terutama bagi perempuan dan anak-anak. NMA membantu Korban konflik yang tidak memiliki siapapun untuk membantu mereka. Anak-anak yang kehilangan orangtua mereka karena gencatan senjata dari konflik baik dengan pemerintah maupun suku yang bertikai tidak memiliki tempat tinggal dan biasanya sering kali terluka atau cacat fisik dan mental. Korban perkosaan yang menjadi target provokasi antar suku yang bertikai biasanya hamil dan diusir dari suku yang bersangkutan karena dianggap mengandung anak musuh sehingga tidak memiliki rumah untuk pulang. Banyak korban dengan bermacam-macam kondisi akibat dari konflik terutama perempuan dan anak-anak.

Tempat penampungan bagi perempuan dan anak-anak korban konflik semakin sempit dikarenakan banyaknya korban yang bertambah secara signifikan dari hari ke hari. NMA melihat kondisi konflik di Northeast India yang berkepanjangan merugikan semua pihak. Mereka memulai mengarahkan program kerja mereka kearah perdamaian, sehingga tidak lagi jatuh korban.

Program kerja awal dari NMA mengenai perdamaian adalah dengan menyuarakan aspirasi mereka terhadap konflik yang terjadi baik kepada pemerintah maupun kelompok pemberontak dan suku yang bertikai. Penyuaran itu sangatlah sulit di wilayah Nagaland karena posisi wanita yang tidak begitu diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.

Upaya NMA dalam proses perdamaian di Nagaland meluas pada tahun 1994. Banyak perempuan yang ingin berpartisipasi dalam proses perdamaian dengan cara-cara mereka sendiri. NMA tidak hanya beroperasi di Nagaland seperti bagaimana mereka tumbuh, tetapi menyebar ke wilayah wilayah lain yang memiliki perempuan-perempuan tangguh. NMA dari segala wilayah bersatu berkampanye, ikut terlibat dalam dialog, mediasi, membantu korban konflik, dan ikut serta menjadi negosiator serta memfasilitasi dialog antara para pemberontak dan pemerintah.

2.2 Mekanisme Kerja NMA

Aktifis perempuan untuk perdamaian Northeast India merupakan aktifis yang luar biasa. Mereka adalah kelompok perempuan pertama di Asia Selatan yang memfasilitasi gencatan senjata. Mereka bernegosiasi dengan seluruh pelaku bersenjata dalam konflik India-Naga: faksi saingan dari kelompok bawah tanah bersenjata dan angkatan bersenjata bahkan pemerintah negara bagian India.

Mereka berada dalam posisi budaya asli mereka di mana perempuan tidak diizinkan untuk bertemu dengan masyarakat desa satu sama lain atau berbicara di depan umum. Tidak ada wanita yang memiliki hak untuk menduduki posisi di pemerintah daerah atau negara, bahkan hanya untuk berbicara tentang parlemen nasional India.

Maka dari itu, ketika wanita berhasil memiliki peran dalam proses perdamaian diharapkan dapat menemukan hak mereka untuk memiliki posisi di meja perundingan perdamaian dan diintegrasikan ke dalam struktur representasi politik, seperti parlemen. Wawasan mengungkapkan dalam kemungkinan untuk menangani masalah partisipasi politik, pengorganisasian keamanan, ketertiban, dan komunikasi politik dan pengambilan keputusan

bisa membuka pada saat ini, jika pemikiran kita politik tidak dibatasi oleh wacana kedaulatan.

NMA tidak memiliki struktur dan prosedur peraturan yang rigid. Dalam faktanya, NMA beroperasi bersama macam-macam organisasi lain yang telah terbentuk ataupun komunitas perempuan yang ada pada tiap suku dalam skala lokal di Northeast India. Mobilisasi NMA tercakup dalam agenda-agenda bersama yang mengutamakan human integrity atau human right di wilayahnya.¹

Anggota NMA terdiri dari perempuan-perempuan yang memiliki keinginan untuk didengar, tidak ada syarat khusus selain menjadi seorang perempuan yang berani mengemukakan pendapat di depan umum. NMA menyebut dirinya sebagai panggilan bagi semua ibu-ibu dari semua wilayah di Northeast India untuk bersatu. Hanya jaringan kuat dari sekian banyak perempuan di Northeast India yang dapat menciptakan perdamaian. NMA memakai kata “mother” di dalam organisasinya dan bukan memakai kata “woman”, Paula Barnajee salah satu anggota NMA menjelaskan, dalam situasi konflik seperti di Northeast India ini, sangat sulit membentuk suatu wadah politik untuk perempuan. Motherhood adalah salah satu wadah yang secara natural sudah terbentuk untuk para perempuan di bumi ini, dan yang kita lakukan hanya melegalkan nama ibu atau perempuan dalam politik dan negosiasi publik.²

Setiap organisasi diharapkan memiliki arah yang jelas maka dari itu NMA juga memiliki pemimpin yang terbentuk untuk memastikan arah tujuan dari organisasi ini dalam jalan yang semestinya:

1. Neidonuo Angami (1984-1991)
2. Sano Vamuzo (1991-2005)
3. Khesilie Chisi (2005-2010)
4. Abeiu Meru (2010-sekarang)

Pemilihan pemimpin didalam NMA tidak berlangsung secara terstruktur tiap 5-8 tahun sekali (tergantung musyawarah dari para anggota). Pemimpin dipilih sendiri dari dan oleh para anggota yang memiliki agenda mengenai perbaikan kesejahteraan yaitu mencakup perdamaian, keamanan, ketentraman masyarakatan Northeast India. Kriteria lain adalah dapat

¹ Rita Manchanda: *We Do More Because We Can. Naga Women in the Peace Process*. Kathmandu, 2004: 14.

² Paula Banerjee: *Between Two Armed Patriarchies: Women in Assam and Nagaland*. In: Manchanda, Rita (Hg.): *Women, War and Peace in South Asia. Beyond Victimhood to Agency*. Sage Publ. New Delhi/ Thousand Oaks/ London 2001: 169.

memobilisasi para perempuan dengan memunculkan dampak positif pada perbaikan keadaan, sebagaimana suara mereka mencapai para perempuan di seluruh wilayah Northeast India.

2.3 Upaya NMA dalam proses perdamaian

Ketika negara menjadi lebih represif dan konflik semakin termiliterisasi, Meira Paibis muncul sebagai garis depan protes terhadap militerisasi. Pada tahun 1970an, kaum perempuan biasa di Manipuri – pedagang, nelayan dan petani – membentuk patroli malam lokal yang dikenal sebagai Nisha Bandh untuk memberantas penyalahgunaan narkoba dan alkohol pada saat munculnya kebijakan lisensi bebas negara. Perempuan-perempuan tersebut berubah menjadi aktivis (sebelum terbentuk NMA) melawan militerisasi negara karena kejadian pada April 1980: unit paramiliter (Central Reserve Police Force) melakukan pembalasan atas ledakan bom dengan melakukan operasi penyisiran brutal di Lamjing, menyerang, menangkap, menyiksa dan memperkosa warga. Sejak saat itu, Meira Paibis, dengan obor bambu yang menyala, menjadi patroli malam untuk lingkungan sekitarnya; menyalakan alarm pada operasi pencarian dan penjagaan oleh kekuatan keamanan negara; melindungi laki-laki muda dari rekrutmen oleh kaum pemberontak; meningkatkan peringatan akan “penghilangan”; bergerak ke kantor polisi dan markas tentara; atau bekerja sama dengan pemimpin pemberontak untuk memastikan pembebasan orang yang direkrut atau disandera. Meira Paibis dapat dikenali dengan sarung (phaneks) merah muda dan syal (inaphies) putih, berbaris di jalan, menantang tembakan lathi dan gas airmata, atau duduk dalam protes diam. Walaupun para ibu percaya bahwa pemberontak, yang disebut Kelompok Bawah tanah (Underground Groups - UG) itu ‘salah arah’, agen pemerintah telah mencap para perempuan sebagai ‘Ibu para pemberontak’. Ironisnya, beberapa kelompok Meira Paibis, karena peran publik mereka, dicurigai baik oleh angkatan bersenjata maupun kaum pemberontak.³ Protes perempuan tersebut mendapat inspirasi dan legitimasi sosialnya dari sejarah panjang perempuan Meiti melawan ketidakadilan. Pada tahun 1904, para perempuan pemberontak melawan perintah Agen Politik Inggris (British Political Agent) untuk memaksa para lelaki lokal untuk membangun ulang rumah rekannya yang terbakar dalam protes yang dikenal sebagai Nupi Lal I. Pada tahun 1939-40, Nupi Lal II membuat para perempuan berhasil memobilisasi pelarangan ekspor beras pada saat kelaparan. Sebagian dari kekuasaan

³ Loitongbam, Babloo, “Perempuan dalam Konflik Bersenjata”, di Dutta, Anuradha dan Ratna Bhuyan (Ed.), Perempuan dan Perdamaian: Bab-bab dari Timur Laut India, (New Delhi: Akamsha Press, 2008), hal.23.

perempuan Meitei tersebut berasal dari kontrol mereka terhadap perdagangan dan penjualan yang memberikan mereka kekuasaan sosial ekonomi.

2.3.1 Kampanye Berpuasa di Manipur

Irom Chanu Sharmila dipelihara dan tumbuh menjadi legenda hidup sebagai 'Perempuan besi dari Manipur' ditengah-tengah cerita rakyat mengenai perjuangan ibu-ibu menuntut keadilan. Pada 2 November 2000, sepuluh orang warga sipil yang menunggu di halte bis di Malom dekat Imphal ditembak oleh pasukan keamanan karena diduga sebagai pemberontak. Kejadian ini merupakan perwujudan rutin dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dibawah AFSPA. Sebagai balasan, Sharmila yang berumur 21 tahun memutuskan untuk berpuasa sampai mati untuk memprotes kekerasan negara setelah pembantaian di Malom. Sejak kejadian tersebut, protes puasa pengikut Gandhi telah menjadi simbol pertahanan moral perempuan Manipur melawan militerisasi negara. Selama 10 tahun Sharmila berada dalam tahanan polisi di rumah sakit, dipaksa makan melalui infus, dan telah menjadi simbol mobilisasi nasional melawan AFSPA. Sharmila telah berulang kali meminta agar Laporan Komite Reddy mengenai AFSPA dirilis, bahkan melarikan diri ke Delhi pada tahun 2007 untuk meminta secara langsung ke pembuat kebijakan. Namun, Menteri Dalam Negeri Kesatuan, Shivraj Patil, terlalu sibuk untuk memperhatikan tindakan pembangkangan sipil Irom Sharmila. Kekuatan elit Delhi tetap tidak berubah, namun Sharmila yang terbaring lemah di Jantar Mantar (tempat protes demokratis yang terkenal) merupakan magnet bagi pembela hak asasi manusia. Pada akhirnya, surat kabar The Hindu membocorkan rekomendasi laporan tersebut, membeberkan bahwa Komite Reddy telah meminta agar AFSPA dihapus.⁴ Pada bulan November 2010, pada tahun ke sepuluh berpuasanya Sharmila, pembela hak asasi dari seluruh negeri yang terinspirasi dengan kebenaran keberanian moralnya, berkumpul di Imphal dan sekali lagi menuntut berakhirnya AFSPA.⁵

⁴ meminta agar AFSPA dihapus karena "Undang-undang ini terlalu panjang, terlalu kosong dan tidak pantas". Ditambahkan juga bahwa Undang-undang ini "telah menjadi simbol penekanan, objek kebencian dan sarana diskriminasi." (Anuradha dan Ratna Bhuyan (Ed.), Perempuan dan Perdamaian: Bab-bab dari Timur Laut India, (New Delhi: Akamsha Press, 2008), hal.48).

⁵ Tentara menolak gerakan untuk mengubah apalagi mencabut Undang-undang. Pada tahun 2010 Menteri Dalam Negeri menyarankan untuk mengubah Undang-undang tersebut. Jendral Ketua V K Singh secara langsung menanggapi dengan menyatakan secara terbuka bahwa perubahan terhadap AFSPA akan mengurangi kemampuan operasional angkatan. (Ibid. hal 54)

2.3.2 Kampanye Bugil di Manipur

Aktivitas kelompok Meira Paibis tetap berada di grassroot level, dengan sedikit usaha untuk terlibat dengan dialog politik yang lebih besar mengenai konflik atau perdamaian di Manipur. Setiap daerah mempunyai kelompok dan ketua otonomi, dan tidak ada badan yang lebih tinggi untuk memberikan kesatuan organisasi. Menurut Pradip Phanjoubam, editor yang berpengaruh di Imphal Free Press Journal:

“Semua kelimpahan tenaga, bakat dan usaha tersebut masih terlalu mentah untuk bisa berubah menjadi alat yang diperlukan untuk membentuk ruang yang terhormat dan seimbang dalam tawar menawar dan negosiasi untuk kekuasaan dalam situasi politik modern.”⁶

Bahkan ketika otoritas moral Meira Paibis berada dipuncaknya setelah protes bugil ditahun 2004, anggota perempuan dari komite koordinasi Apunba Lup memainkan peranan yang pasif, membiarkan para laki-laki untuk berbicara bagi mereka. Lebih dari itu, gerakan Meira Paibis telah menua dan terdapat jurang yang besar antara gerakan perempuan yang tradisional dan modern. Seperti pengamatan Phanjoubam lebih lanjut, Meira Paibis mempunyai tenaga dan intuisi tetapi kelompok perempuan modern “mempunyai kepala namun tidak ketahanan” untuk berdiri secara mandiri.⁷ Kelompok perempuan modern ini menarik perempuan profesional yang terpelajar, sering bersosialisasi dengan budaya LSM dan berbasis dilingkungan kota.⁸ Lebih dari itu, kekuatan ekonomi perempuan, dimana Meira Paibis mendapatkan otoritasnya, semakin menjadi lemah seperti terlihat dari meningkatnya jumlah perempuan kepala rumah tangga yang hadir di pasar tradisional Ima, pusat kekuatan ekonomi perempuan.

2.3.3 NMA Memasuki Identitas Politik

Tantangan lebih jauh dalam aktivitas perdamaian NMA adalah kegagalan untuk beranjak dari perbedaan identitas politik. Manipur adalah daerah dengan etnis plural yang telah mengalami ketegangan antara kelompok yang berbeda. Meira Paibis mewakili hanya

⁶ Phanjoubam, Pradip, “Tantangan-tantangan Sebelum Pergerakan Perempuan di Manipur”, di Dutta, Anuradha dan Ratna Bhuyan (Ed.), Perempuan dan Perdamaian: Bab-bab dari Timur Laut India, (New Delhi: Akansha Publishing House, 2008), hal 101.

⁷ Pradip Phanjoubam.2008.Northeast India in woman’s perspective.hal 21

⁸ Aksi Perempuan untuk Pembangunan, Manipur Women’s Gun Survivors Network. (<http://www.mcrg.ac.in/PP51.pdf>) diakses 21 juli 2014

masalah Meitei dan dianggap sebagai konservatif, tradisional dan tidak secara konsisten mengakui tekanan perbedaan ini. Pembagian bukit / lembah secara tradisional telah berakibat adanya suku Naga, yang mendominasi wilayah bukit, menginginkan persatuan semua teritori suku Naga tanpa melihat batas negara bagian, dan suku Kuki yang menginginkan kampung halaman etnis. Secara kontras, Meitei dengan tegas menginginkan untuk menjaga keutuhan teritori semua Manipur. Selama bertahun-tahun, perbedaan tuntutan ini mengakibatkan ketegangan, yang terakhir di pertengahan 2010, ketika organisasi Naga memaksakan blokade ekonomi selama 2 bulan yang melumpuhkan jalur utama ke Manipur, yang melewati daerah sekitar negara bagian Nagaland, 2 warga Naga yang protes dibunuh oleh polisi Manipuri yang membubarkan demonstrasi. Valley Rose, aktivis perempuan Naga dan editor harian Tangkhul, menanyakan:

”Apakah kita benar-benar berbicara mengenai perdamaian atau kita berbicara mengenai kelompokku dan kelompokmu? Dan apakah kita tidak menciptakan lebih banyak perbedaan antara komunitas yang berbeda dengan aktivitas-aktivitas ini?”⁹

Karena kompleksitas plural di Manipur, ada kebutuhan kritis bagi perempuan-perempuan dari berbagai komunitas – Naga, Meitei, Kuki – untuk bergabung di atas usaha terpisah dari perempuan-perempuan Naga-Kuki atau Naga-Meitei yang telah berusaha untuk membuka dialog untuk mengurangi ketegangan. Juga ada kebutuhan untuk pengasingan antara organisasi tradisional Meira Pabis dan organisasi perempuan yang ‘modern’ untuk berubah secara politis. Akhirnya, walaupun mengakui akan lingkungan yang beresiko tinggi, Meira Paibis harus menegaskan otonomi mereka dan berbicara melawan pelanggaran hak asasi manusia di semua pihak, termasuk baik angkatan bersenjata maupun pemberontak.

2.3.4 Aksi Duduk di Gerbang Mao

Pada bulan Januari 2009, ratusan tentara paramiliter mengepung kemah kelompok bersenjata Naga yang terbesar, Dewan Sosialis Nasional Nagaland – Isak Muiyah (National Socialist Council of Nagaland, NSCN – IM) dekat desa Shirui di Manipur, memperangkap penduduk sipil. Selama lima belas hari, perempuan Naga melakukan aksi duduk menuntut penarikan paramiliter tersebut – tekanan tersebut berhasil dan kekerasan dapat dihindari.

⁹ Rose, Valley, “Peran Perempuan Suku dalam Pembangunan Perdamaian di Manipur”, dalam Dutta, Anuradha dan Ratna Bhuyan (Ed.), Perempuan dan Perdamaian; Bab-bab dari Timur Laut India, (New Delhi: Akansha Publishing House, 2008), hal.191.

‘Kami hanya melakukan tugas kami sebagai penjaga keamanan’ demikian yang dikatakan perempuan-perempuan tersebut kepada komandan yang frustrasi.

2.3.5 Upaya perdamaian: Dialog NMA dengan NSCN-IM

Sembilan bulan kemudian di ibukota negara bagian Kohima, perempuan-perempuan Naga dari berbagai organisasi memainkan peran utama pemantauan dan advokasi dalam dialog antara Menteri Dalam Negeri Pemerintah India dan Thuingaleng Muivah, Sekretaris Jenderal NSCN-IM. Pegawai pemerintah terkejut karena Muivah mengundang anggota organisasi kemasyarakatan sipil Naga ke pertemuan tingkat tinggi ini.¹⁰ Termasuk diantaranya Naga Ho Ho, Asosiasi Ibu-ibu Naga (Naga Mother’s Association, NMA) dan perwakilan yang didominasi perempuan dari Gerakan Rakyat Naga untuk Hak Asasi Manusia (Naga People’s Movement for Human Rights). Sebelumnya, pemerintah telah mengadakan perundingan, tapi secara terpisah dengan perwakilan masyarakat sipil termasuk lawan bicara perempuan. Perundingan Kohima tahun 2010 merupakan pertanda yang cukup signifikan bagaimana perempuan-perempuan Naga telah merubah peran public mereka tidak lagi pasif hadir sebagai penanda kelompok budaya, mereka juga berpartisipasi sebagai lawan bicara yang seimbang. Interaksinya memperlihatkan bagaimana pemberontak bersenjata nasionalis dan –lebih enggan-nya- agen pemerintah menyetujui perempuan pencipta perdamaian mendapatkan pengakuan dan legitimasi dalam perundingan damai. Perjuangan rakyat Naga adalah konflik etnis-nasionalis yang tertua menantang proyek integrasi sesudah penjajahan Kesatuan India. Lebih dari 60 tahun, konflik antara India dan pemberontak ‘nasionalis’ Naga telah dibentuk oleh kekerasan antara suku Naga dan ketegangan antar etnis Naga Meitei. Penggantian politik telah memecahkan warga Naga tetapi gagal memecahkan konflik India yang berlarut-larut. Pada akhirnya perjuangan warga Naga adalah tuntutan untuk persatuan dan penentuan nasib sendiri dari warga 40 suku yang mendiami bukit Naga di timur laut India dan barat laut Burma. Tetapi kekerasan saat ini lebih didorong oleh perkelahian antara faksi Naga dari pada antara kelompok bersenjata Naga dan pemerintah. Konstitusi untuk identitas Naga yang sama melampaui identitas suku yang beragam terancam oleh mobilisasi dan pembagian garis suku. Saat ini, mayoritas dari 2300 kematian yang berhubungan dengan pemberontakan antara tahun 1992 dan 2006 merupakan akibat dari perkelahian antar faksi

¹⁰ Secara tradisional ‘masyarakat sipil’ merujuk ke aksi kolektif sukarelawan lingkungan yang mempunyai kesamaan minat, tujuan dan nilai. Namun di daerah Naga, seperti juga di banyak daerah timur laut, pergerakan sesuai garis persaudaraan dan suku sehingga solidaritas sosial warga Naga dan organisasi masa warga Naga berdasarkan identitas tertentu. Gereja juga memainkan peran yang kuat: lebih dari 90 persen warga Naga adalah Kristen. (ibid. hal 35)

antara kelompok yang bermusuhan NSCN-IM dan Dewan Nasional Sosialis Nagaland-Khaplang (National Socialist Council of Nagaland- Khaplang, NSCN-K).

2.3.6 Proses perundingan di luar negara: dialog dengan NSCN-IM

Dialog antara NSCN-IM dan pemerintah Kesatuan tetap menemui jalan buntu. Sekitar 70 perundingan telah menghasilkan sedikit atau tidak ada kemajuan dalam hal-hal yang inti. Pemerintah bersikeras untuk penyelesaian dalam ‘empat sisi konstitusi India’ yang berarti konsisten dengan gambaran negara bagian India saat ini. Warga Naga menuntut integrasi menjadi ‘Greater Nagaland’ dari wilayah bukit Naga yang berdampingan dengan negara bagian Manipur. Pada bulan Juli 1997, pemerintah Kesatuan menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan NSCN-IM. Manipur telah menghentikan perpanjangan gencatan senjata ke daerahnya untuk mengesahkan tuntutan Naga atas tanah di negara bagiannya. Setelah gencatan senjata tahun 1997, perundingan damai diadakan di Paris dan Amsterdam sesuai kesepakatan – pada ‘tingkat yang tertinggi’ dan diluar negara – antara Perdana Menteri (belakangan diwakili oleh utusan Perdana Menteri) dan Ketua NSCN-IM Isak Chishi Swu dan Sekretaris Jenderal Thuingaleng Muivah. Perundingan yang terakhir diadakan tanggal 27 Februari 2011 di New Delhi antara Perdana Menteri Manmohan Singh dan Muivah dan Swu.¹¹ Bersamaan dengan perundingan ‘meja tinggi’, pemimpin NSCN-IM melakukan serangkaian konsultasi warga; yang paling terstruktur adalah ‘Konsultasi Bangkok’ pada tahun 2002 (Januari dan Juni). Disini, mereka berbicara dengan organisasi sosial Naga, gereja-gereja dan kelompok-kelompok perempuan mengenai negosiasi formal. Sebagai gantinya, mereka mendengar kritik yang jujur dan ide-ide mengenai apa yang penting bagi rakyat, dan perubahan apa yang terjadi ketika pemimpin-pemimpin berkelahi di hutan selama lima dekade. Seperti yang dinyatakan Muivah pada saat konsultasi Januari, ‘tidak ada kesepakatan dapat terjadi tanpa pengertian penuh dari rakyat’; tidak ada kesepakatan sembunyi-sembunyi akan dilakukan.¹² Kesepakatan damai dalam konflik Naga mendapat banyak pengkhianatan, sehingga membuat transparansi sangat penting. Kelompok masyarakat sipil, seperti Asosiasi Ibu-ibu Naga (Naga Mothers’ Association, NMA) dan afiliasi Manipur, Kesatuan Perempuan Naga Manipur (Naga Women’s Union of Manipur, NWUM) telah memainkan peran penting sebagai penjaga proses perdamaian pro rakyat.

¹¹ “Ketua NSCN-IM mendarat di Manipur”, Assam Tribune, 2 Maret, (2011).www.assamtribune.com/scripts/detailsnew.asp?id=mar0311/oth05. Diakses 3 Maret 2011

¹² Rita Manchanda. Kita Melakukan Lebih Karena Kita Bisa: Perempuan Naga dalam Proses Perdamaian, (Kathmandu: South Asian Forum for Human Rights, 2004), hal.67.

2.3.7 Kampanye “listen your mother before you kill your brother”

Peran perempuan pencipta perdamaian Naga menjangkau lintasan antara konflik dan proses perdamaian. Perempuan-perempuan itu menjadi penjaga perdamaian bernegosiasi dengan tokoh negara dan non negara untuk menjaga komunitasnya; memobilisasi dan menuntut keadilan atas kekejaman, terutama kekerasan seksual; memediasi untuk membuka jalur komunikasi antara pihak yang terpecah karena konflik; memantau dan menjaga gencatan senjata; melebarkan dasar dukungan untuk jalan perdamaian; dan memegang tanggung jawab protagonist kepada rakyat yang atas namanya perdamaian dibuat. Organisasi perempuan yang berorientasi kesejahteraan telah berubah menjadi gerakan ibu-ibu yang kuat dan terlibat politik. Perempuan Naga telah muncul sebagai garis depan protes terhadap pelanggaran dan ketidakadilan terhadap hak asasi manusia, seperti terwujud dalam berlarut-larutnya massa perempuan Naga dalam ‘aksi duduk’ di Gerbang Mao pada bulan Mei 2010.¹³ Bahwa ‘aksi duduk’ ini ada akhirnya bermetamorfosis menjadi kebuntuan antar etnis Naga-Meitei, memperlihatkan batas gerakan ibu-ibu pada dua belah pihak untuk melampaui identitas afiliasi yang eksklusif. Namun bagaimanapun juga, perempuan Naga dikenal sebagai aktivis politik yang potensial, menegaskan hak mereka sebagai lawan bicara yang seimbang dalam proses rekonsiliasi antara pihak Naga dan negara. Narasi mengenai konflik Naga memperlihatkan perempuan yang melindungi pejuang lelaki, berbaring di jalan untuk menghalangi truk yang penuh dengan lelaki muda yang akan diinterogasi brutal, mengamankan pelepasan sandera dari kelompok militan yang tak terhitung dan diatas semuanya itu, menghentikan kekerasan faksional. Seperti yang dideskripsikan perempuan di desa Jotsoma di wilayah Kohima:

“Ketika tentara India datang, adalah perempuan yang maju kedepan antara tentara dan penduduk desa. Hanya perempuan yang dapat ikut campur tangan. Kami terus menerus harus berbicara dengan tentara. Kami kaum ibu harus pergi ke pihak yang berperang,

¹³ Gerbang Mao adalah batas antara Nagaland dan Manipur dan dihuni oleh suku Mao Naga. Krisis ini berkobar karena Pemerintah Kesatuan menarik persetujuan Sekretaris Jendral NSCNIM Thuingaleng Muivah untuk mengunjungi desa leluhur di Manipur setelah absen selama 4 dekade. Perempuan Naga melakukan protes aksi duduk tak terbatas yang berakibat jam malam dan naiknya ketegangan dimana Batalion Pertahanan India pemerintah Manipur memaksa memukul para perempuan, menggunakan gas air mata dan membunuh dua mahasiswa. Federasi Mahasiswa Naga melakukan blokade dan menutup akses ke Manipur. (Ibid.hal 66)

ke kamp mereka dan memohon mereka untuk tidak saling membunuh dan mengganggu penghuni desa.”¹⁴

Selama aksi duduk di Gerbang Mao pada Mei 2010, para perempuan bergabung dengan pemerintah lokal untuk mencegah konfrontasi antara penduduk yang emosi dan polisi bersenjata Manipur. Sanksi sosial untuk aktivitas perdamaian perempuan Naga berakar pada peran tradisional mereka sebagai pencipta perdamaian antara desa dan suku yang berperang – sebagai demi atau pukrelia yang maju ditengah pertempuran dan menghentikan kekerasan. Peran demikian diberikan oleh Neidonuo Angami, presiden NMA saat itu, yang maju diantara 2 pihak yang bertikai di wilayah Phek tahun 1998 dan meminta mereka untuk “dengarkan ibumu sebelum membunuh saudaramu”. Penekanan atas keibuan sebagai strategi mobilisasi mendapatkan pengesahan sosial, me-depolitisasi NMA dan mendukung klaimnya sebagai non partisan.

2.3.8 Kampanye Perdamaian: Shed No More Blood

Fokus utama dari usaha perdamaian perempuan di Nagaland adalah kekerasan antar faksi yang berkembang pesat antara tahun 1980 dan 1990an. Sebagai tanggapan terhadap tingginya pembantaian yang meninggalkan mayat tak dikenal di pasar, NMA memimpin ritual duka bersama dengan gereja-gereja. Dengan memberikan pemakaman yang bermartabat kepada setiap korban dalam acara suku, mereka memberikan pernyataan bahwa setiap hidup adalah berharga. Pada tahun 1994, NMA meluncurkan kampanye ‘Hentikan semua pertumpahan darah’. Tim Perdamaian non-partisan meminta pusat wilayah untuk menghentikan kekerasan, mengapai pihak yang terpisahkan oleh suku. Pada tahun 2003, NMA memperbaharui permintaan untuk menghentikan pertumpahan darah – pernyataan yang menyedihkan atas berlanjutnya pembunuhan antar faksi. ‘Sebagai ibu, kami tidak memihak’, tegas Nuidonuo Angami di wilayah Tuensang, berbicara lebih dulu ke kader NSCN-IM yang ‘sombong’ dan kemudian ke kader Khaplang yang ‘defensif’, memampukan mereka untuk mengeluarkan frustasinya atas kurangnya kesatuan dan mengurangi prasangka lawan yang dibangun atas kurangnya dialog dengan yang lainnya.¹⁵ Dengan banyaknya kekerasan terus

¹⁴ Diskusi kelompok terfokus dengan para perempuan di desa Jotsomo bulan Mei 2003, dikutip di Rita Manchanda, (2004), http://icp.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxiu/wp10_5_ang.pdf diakses 3 juli 2014

¹⁵ Pada bulan April 2003, Rita Manchanda menemani Presiden NMA ke wilayah Tuensang untuk misi perdamaian dan rekonsiliasi, berusaha untuk menjembatani ketidakpercayaan antara 2 kelompok kader dari NSCN-IM dan NSCN-K. Lihat Manchanda, Rita (2004), hal.48.

muncul dari pihak yang bertentangan, NMA dan NWUM memperjuangkan untuk tetap membuka jalur komunikasi antar faksi yang berlawanan. Pada tahun 1999 kelompok-kelompok perempuan melakukan perundingan tidak langsung antara pemimpin NSCN-IM dengan NSCN-K. Empat perempuan dari NMA dan NVUM berjalan menyebrangi perbatasan Myanmar menuju pusat NSCN-K untuk bertemu pemimpinnya, S.S. Khaplang. Walaupun Khaplang menolak untuk gencatan senjata, dia setuju untuk tidak menghalangi proses perdamaian dan menahan diri. Sekembalinya, perwakilan NMA dan NVUM memberi penjelasan ke 16 orang pemimpin puncak NSCN-IM.

Para perempuan Naga yang secara tradisional tidak dipercaya untuk membawakan pesan, menjadi lawan bicara yang dipercaya. Ketika usaha yang berulang kali untuk membuat pemimpin puncak NSCN bertemu muka gagal, pada tahun 2002 perempuan NMA dan NWUM memainkan peran kunci dalam memutuskan isolasi S.S Khaplang, memujinya atas detilnya konsultasi rakyat Bangkok terhadap proses perdamaian. Usaha tambahan yang kurang terkenal tapi lebih signifikan dari ibu-ibu Naga adalah mematahkan ketidakpercayaan dan prasangka antara pihak lokal yang bertikai. Dalam proses ‘bukan perang/bukan damai’ yang berlarut-larut dan menemui jalan buntu, terjadi kekerasan faksi, persekongkolan agen pemerintah melawan pemberontakan. Hal ini memotivasi kelompok sosial Naga untuk memperbaharui usaha melalui forum rekonsiliasi, badan tinggi yang didirikan tahun 2008 di Chiang Mai, Thailand. Dalam konteks Forum, NMA, NWUM, gereja-gereja, Naga Ho Ho, NSF, NPMHR dan kelompok lainnya telah dapat membujuk pemimpin faksi untuk menahan perang saudara dan secara signifikan meminta mereka meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses perdamaian. Inisiatif inovatif seperti ‘Rekonsiliasi Sepak Bola’ juga membantu menurunkan ketegangan dan mengurangi kekerasan dengan mendorong pertemuan yang sportif antar suku yang berlawanan. Para perempuan Naga dengan terang mencela bukan hanya agen pemerintah tapi juga pemberontak, karena melecehkan hak asasi manusia. Dalam pertemuan dengan S.S. Khaplang tahun 2002, NMA dan NWUM meminta penjelasan atas pembunuhan aktivis hak asasi manusia Shelly Maring. Mereka juga mengangkat isu yang disebut ‘bawah tanah’ Meitei yang telah mengungsi di kampnya, menikmati perlindungannya.¹⁶ Para perempuan menuntut untuk tahu apakah dia mengetahui bila mereka menutup konstruksi jalan layang yang mana akan sangat bermanfaat bagi masyarakat.¹⁷ Para perempuan Naga secara khusus membahas kekerasan seksual, bekerja melalui jaringan suku

¹⁶ Komunikasi antara Rita Manchanda dan Gina Shankham dari Kesatuan Perempuan Naga Manipur, Senapati, 4 Mei 2003. http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxiu/wp10_5_a ng.pdf diakses 3 Juli 2014

¹⁷ Ibid. hal 24

dan gerakan bawah tanah perempuan. Setelah kejadian pemerkosaan yang melibatkan kader NSCN-IM pada tahun 1999 di desa Jotsoma, NMA bekerja sama dengan perempuan dari suku Chakesang dan pemimpin perempuan NSCN-IM untuk mengamankan keadilan. Pada puncak konflik, para perempuan merancang strategi ‘politik dapur’. Contohnya, jika kader dari suku mereka mempertimbangkan untuk menyerbu kemah dekat desa, maka para perempuan akan mengundang mereka makan untuk mendiskusikan secara terbuka mengenai konsekuensinya, seperti serangan balas dendam dan penutupan yang berlarut-larut atas institusi pendidikan dan toko-toko, dan artinya bagi desa mereka, untuk mencoba menghalangi mereka dari rencana penyerangan mereka. Para perempuan juga mencoba membujuk mereka untuk tidak melakukan jam malam yang berlarut-larut. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Yangerla Ao dari organisasi perempuan Suku Ao, Watsu Mongdang kepada pejuang Naga yang telah memprovokasi kekerasan yang berakibat penutupan sekolah dan bisnis:”Siapa yang kamu perjuangkan? Bukan untuk 60 atau 70 orang kalian, tapi untuk kami”.¹⁸ Setelah gencatan senjata ditandatangani tahun 1997, beberapa pelanggaran mengakibatkan adanya saling menyalahkan yang mengancam keberadaan kesepakatan. NMA dan NWUM bergabung dengan 22 anggota masyarakat sipil Komite Aksi secara independen memonitor gencatan senjata. Presiden NMA Angami mendeklarasikan, ”Kedua belah pihak dapat memutuskan untuk menghentikan gencatan senjata. Tetapi untuk siapa mereka berbicara? Kita semua adalah pemangku kepentingan dalam proses ini.”¹⁹ Komite Aksi mendorong keikutsertaan pengamat independen dalam mekanisme gencatan senjata formal. Walaupun dalam perundingan di Amsterdam bulan September 2001 pemerintah dan NSCN-IM telah sepakat untuk mengikutkan empat anggota yang mewakili LSM, tidak ada perubahan yang direalisasikan. Walaupun demikian, lobi Komite menghasilkan perubahan dalam ‘Aturan Dasar’ gencatan senjata. Aturan awalnya disetujui tahun 1997 berpusat untuk memastikan keamanan dari dua kekuatan yang bertikai. Dalam dokumen formal yang disetujui tanggal 13 Januari 2001, aturan tersebut dirubah bahwa kekuatan kedua belah pihak tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada hak milik masyarakat sipil atau mencederai masyarakat sipil.

2.3.9 Perundingan “kitchen politic”: NMA dengan NSCN-IM dan NSCN-K

Pada tahun 1997 ketika dimulai proses perdamaian formal, hanya ada sedikit dukungan publik untuk melakukan negosiasi damai sebelum terdapat keseruan diantara empat

¹⁸ Ibid. hal 30

¹⁹ Ibid. hal 52

kelompok Naga yang bertikai: kelompok NSCN-IM dan K, dan juga sisa Dewan Nasional Naga (Naga National Council, NNC) yang mempelopori gerakan Naga dan terpecah menjadi NNC (Adino) dan NNC (Pangar). Masyarakat sipil Naga, termasuk kelompok perempuan, memainkan peran yang signifikan dalam memenangkan pengakuan populer dan pengesahan dari NSCN-IM untuk bernegosiasi atas nama warga Naga, sambil menjangkau berbagai faksi untuk membangun kesatuan. NMA dan NWUM telah dituduh menjadi bagian dari NSCN-IM oleh beberapa anggota kelompok Khaplang, mempertanyakan pernyataan perempuan mengenai 'kami tidak memihak'. Dalam realitasnya dalam situasi ketegangan antar faksi, para perempuan sangat diterima karena mereka dipercaya oleh kedua belah pihak di tingkat lokal dan tingkat tertinggi antara pemimpin NSCN-IM dan K. Para perempuan NMA dan NWUM telah melobi pemerintah India dan pemimpin NSCN-IM untuk memegang teguh perdamaian, menekankan bahwa perdamaian bukan hanya milik pihak yang berperang tapi untuk semua warga Naga. Pada bulan Januari 2001, ketika Muivah ditangkap (karena pelanggaran paspor) di Bangkok dalam perjalanan untuk perundingan di Amsterdam, NMA dan organisasi sosial lainnya melakukan serangkaian protes, menuntut pemerintah untuk campur tangan dan secara serius memihak pada proses perdamaian. NMA dan NWUM juga berpartisipasi dalam konsultasi berlapis-lapis pada proses perdamaian. NSCN-IM mengundang mereka ke 'Konsultasi Bangkok' tahun 2002. Disana mereka bergabung dengan 45 organisasi kemasyarakatan sipil lainnya mengekspresikan kegelisahan dan aspirasi mereka mengenai perundingan resmi dan membuat pemimpin NSCN-IM bertanggung jawab untuk menegosiasi perdamaian bagi semua warga Naga. Pada pertemuan pertama, tidak ada perempuan dalam kelompok NSCN-IM. Namun pada saat konsultasi Juni ada enam pemimpin perempuan senior NSCN-IM dalam perundingan tersebut. NMA, sebagai sebuah strategi sadar, telah menahan diri untuk berkomentar dalam agenda politik untuk mendapatkan kepercayaan dari semua pihak. Kontrasnya, organisasi lainnya (NWUM di Manipur) mengejar agenda mengenai hak, berdebat atas hak perempuan untuk menikah, bercerai dan properti, dan perwakilan di Otoritas Suku Desa yang semuanya laki-laki, dan badan tinggi yaitu Dewan Kesatuan Naga Manipur (United Naga Council of Manipur).

Sebuah istilah yang digunakan oleh NMA untuk bentuk intervensi adalah 'dapur politik'. Para anggota NMA mengundang anggota kelompok pemberontak bawah tanah di wilayah suku mereka, di rumah mereka dan di dapur, jantung rumah suku Naga di mana api terbuka terbakar di tungku dan semua orang duduk di sekitar perapian, dalam suasana khidmad dan tenang mereka bicara terus terang dan mengkritik tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau akan menyebabkan hilangnya dukungan dari masyarakat atas kecurigaan

antar kelompok pemberontak. Pasca gencatan senjata antar faksi Kitchen politic dilakukan untuk memfasilitasi dialog antara pemimpin tertinggi pemberontak yang saling bertikai. NMA sangat bangga dalam melayani jamuan makan di pertemuan tersebut. Makanan adalah penanda budaya penting kenyamanan, kepastian dan keamanan.

Meskipun mereka bertemu dengan para pemimpin penting dari kelompok faksi (pemberontak) dari konflik bersenjata mereka menjawab pertanyaan jika mereka pikir NMA bersifat politis: "Tidak, Kami hanya sekelompok ibu, kita hanya perempuan yang melakukan apa yang biasanya kita lakukan!" Para wanita menggunakan bahasa relasional terstruktur untuk keluarga sehingga menggambarkan diri mereka apa adanya: Dalam hal ini mereka mengatur kelangsungan hidup dan perlindungan dari "semua anak-anak mereka".

2.3.10 Upaya perdamaian NMA Pasca Konflik

Perempuan Naga sangat menyadari bahwa perdamaian untuk Naga akan sulit dicapai bila konflik tetap terjadi dengan kelompok etnis disekitarnya. NMA dan NWUM telah memulai beberapa inisiatif untuk membuka dialog dengan kelompok Meira Paibis, gerakan perempuan yang berpengaruh di Manipur. NWUM, sebagai contoh, bekerja sama dengan Meira Paibis untuk menyelamatkan sandera yang ditangkap oleh kelompok militan Naga dan bergabung dengan protes Meira Pabis untuk solidaritas. Namun, perempuan aktivis Naga mengeluh bahwa solidaritas ini sangat berat sebelah. Faktanya, ketidakpercayaan antara Naga dan Meitei telah melebar selama dekade terakhir, diendapkan oleh reaksi kekerasan kelompok Meitei terhadap pemerintah India pada tahun 2001, untuk memperpanjang gencatan senjata India-Naga melebihi batas teritori Nagaland. Mereka melihat hal ini sebagai wacana untuk pemecahan teritori Manipur. Ketegangan Naga-Meitei tahun 2010 telah dengan efektif mendorong hubungan mereka ke dalam krisis. Pada bulan September 2010, perundingan tripartit putaran pertama dimulai antara Pemerintah India, Naga di Manipur dan Meitei.²⁰ Dua perempuan terlibat dalam perundingan ini, Gina Shankham dari Gerakan Rakyat Naga untuk Hak Asasi Manusia dan Grace Satsang dari Kesatuan Perempuan Naga Manipur. Namun yang membuat frustrasi, pada perundingan di bulan Desember, tidak ada perempuan yang terlibat. Pembagian antara kelompok etnis yang bersebelahan ini menjelaskan mengapa banyak komunitas etnis di timur laut bisa melawan AFSPA pemerintah yang represif, tapi mereka belum membentuk gerakan yang sama untuk melawannya. Namun,

²⁰ Kanglaonline, "Putaran pertama perundingan tripartit tentang tuntutan diadakan di Senapati", 3 Desember, (2010). <http://kanglaonline.com/2010/12/first-round-of-tripartite-talks-on-uncdemands-held-at-senapati/> Diakses 25 Februari 2013.

diluar wilayah itu sendiri, solidaritas antar komunitas sedang dibina – khususnya di universitas-universitas di New Delhi dimana sejumlah besar mahasiswa yang berpengaruh dan profesional muda dari daerah timur laut tinggal. Orang-orang ini dapat secara signifikan membangun politik yang lebih kooperatif dimasa depan. Perempuan Naga dari NPMHR berada di garis depan inisiatif ini, sehingga kadang-kadang membuat para lelaki dari komunitas lain (contohnya Meitei dan Kuki) menyesali kepasifan perempuan mereka.²¹ Tentu saja, para perempuan Nagaland masih menghadapi tantangan dalam mencapai tujuan mereka sebagai pencipta perdamaian. Naga Ho Ho, badan tinggi dari organisasi suku Naga di Nagaland, dan mitranya di Manipur, Dewan Kesatuan Naga, masih menolak untuk mengizinkan perempuan sebagai perwakilan formal. Tetapi perubahan generasi dalam kepemimpinan mereka telah membuka jalan, walaupun bukannya tanpa reaksi buruk.²² Masyarakat Naga tetap sangat patriarkal. Dalam politik formal, dewan perwakilan Nagaland belum mempunyai perwakilan perempuan walaupun perempuan merupakan juru kampanye paling aktif di akar rumput selama pemilihan umum. Pada pemilihan umum 2003, para perempuan berkampanye dari pintu ke pintu untuk Gerakan Rakyat Nasional pro perdamaian melawan Partai Kongres negara bagian Nagaland, yang dianggap sebagai penghindaran terhadap proses perdamaian. Institusi pemerintah India telah sangat kurang sensitif terhadap nilai aktivitas perdamaian perempuan dan pergeseran yang terjadi sehubungan dengan gender. Contohnya, adalah praktek yang umum bagi perempuan untuk menegosiasi kesejahteraan komunitas dengan pejabat lokal, namun Jenderal Purnawirawan R.V. Kulkarni, yang menjadi ketua Pengawasan Gencatan Senjata dari tahun 2001 sampai 2007, mengungkapkan kekagetannya bahwa perempuan dianggap sumber daya untuk mengurangi ketegangan dan mempertahankan perdamaian.²³ Lebih dari itu, ada kecenderungan untuk menghilangkan organisasi kemasyarakatan sipil sebagai juru bicara untuk NSCN-IM. “Mereka dipandu oleh orang lain,” katanya.²⁴

²¹ Sebagai contoh, ketika Grace Satsang dari NWUM dan tiga perempuan lainnya berjalan ke Myanmar untuk berbicara dengan S.S. Khaplang tahun 2001, pemberontak Meitei berkata kepada mereka, “Saya tidak berpikir bahwa perempuan Meitei akan datang. Mereka bahkan tidak berpikir untuk datang.” Lihat Satsang, Grace, “Perempuan Suku dan Inisiatif Perdamaian di Manipur” di Dutta, Anuradha dan Ratna Bhuyan (Ed.), *Perempuan dan Perdamaian: Bab-bab dari Timur Laut India*, (New Delhi: Akansha Publishing House, 2008), hal.194.

²² Di wilayah Pallel di Manipur, T. Shangnu dari NWUM memimpin usaha untuk mengurangi ketegangan antar suku pada saat pemilihan umum, juga bersama-sama menyelamatkan sandera dari militan atau pemuda yang dibawa oleh petugas keamanan. Beliau mengeluh bahwa “pria dan perempuan mengejek kami”, mengatakan “inilah perempuan yang kuat.” Diskusi dengan Rita Manchanda pada tahun 2004. (http://icip.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxiu/wp10_5_ang.pdf). Diakses 3 juli 2014

²³ Ibid hal 70

²⁴ Ibid hal 70

2.3.11 Mempertahankan perdamaian

Dalam Konflik di Northeast India, perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, mulai dari kekerasan fisik, psikologis, hingga kekerasan seksual, baik terjadi di dalam rumah, di kamp pengungsian maupun di tempat umum. Kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual membawa dampak yang buruk bagi kondisi kehidupan dan kesehatan perempuan baik secara fisik, mental, dan sosial. Kekerasan seksual misalnya, membawa konsekuensi serius seperti kehamilan yang tidak diinginkan, berbagai penyakit menular secara seksual (PMS) dan HIV/AIDS, depresi, dan stress dan gangguan mental yang seringkali juga diikuti dengan pemikiran dan tindakan bunuh diri. Korban juga sering juga dikucilkan dari lingkungan keluarga, kerabat, dan masyarakat. Data yang berhubungan dengan kasus tindakan kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, khususnya kasus-kasus perkosaan, aborsi secara paksa dan kehamilan yang tidak diinginkan yang dialami oleh para perempuan-perempuan usia muda di Northeast India.

Dr V.K. Nuh, Sekretaris Jenderal CNBC mengatakan dalam sebuah wawancara baru-baru ini di Kohima itu, benar-benar tidak aman bagi perempuan. Bahkan jika seorang gadis ingin melanjutkan studi lebih lanjut, dia takut bepergian sendirian. Menurut Daisy Mezhur, Sekretaris, Kesejahteraan Dewan Penasehat Sosial, Kohima, Masyarakat Northeast India akan melalui masa transisi yang jauh terlalu cepat bagi kita. Kami berlari sebelum kita bisa berjalan. Oleh karena itu ada begitu banyak kekacauan. Dalam seluruh proses perempuan terjebak dalam kekerasan terhadap perempuan. Mereka tumbuh dalam lingkungan tersebut dan kita bertanya-tanya mengapa.

Perempuan hidup di bawah tekanan yang ekstrim dan tekanan sehari-hari. Jika mereka mendengar dentuman keras maka mereka merangkak di bawah meja. Di malam hari, jika ada anggota keluarga masih keluar, mereka khawatir dan cemas. Di satu sisi mereka semua perlu bantuan profesional. Mereka hidup dalam ketakutan. Hal tersebut adalah semacam ketakutan psikosis dalam setiap satu dari kami. Kita semua adalah korban dalam satu atau lain cara. Saya merasa perlu berbicara dengan seseorang sebelum aku menjadi gila. Berbicara dari pengalaman sendiri tertangkap di api lintas antara pasukan keamanan dan Naga Fraksi bawah tanah dia bilang dia menjalani semacam delusi setelah kejadian itu. Dia pergi ke melihat psikiater tetapi persepsi umum adalah bahwa saya harus gila untuk melihat psikiater, itu memperburuk situasi. Selain kondisi rumah sakit jiwa yang mengerikan. Rumah Sakit Jiwa di Kohima dimulai dengan 25 tempat tidur pada tahun 1974 sebagai bagian dari Departemen Penjara dan diserahkan kepada Departemen

Kesehatan dan Kesejahteraan Keluarga pada tahun 1994 tetapi terus berfungsi sebagai bagian dari Kohima Jail sampai 1996. Pada tahun 1996 gedung baru disiapkan di situs baru di Aradura Hill dan rumah sakit dialihkan. Menurut data yang diterbitkan oleh departemen total 1.594 pasien luar yang dirawat dan 236 pasien dalam ruangan yang dirawat di sana Menurut P Ngully, seorang psikiater terkenal, banyak masyarakat Naga berada dalam cengkeraman Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD).²⁵

Ini dimulai pada 1950-an di puncak gerakan Naga independen negara ketika banyak desa dibakar oleh angkatan bersenjata India, banyak orang terluka dan tewas, gereja hancur dan wanita kekerasan seksual. Tanaman dibakar dan ternak hancur. Menurut temuan itu, pemandangan dari orang berseragam masih membangkitkan rasa takut dan teror di penduduk desa yang jarang melihat ada wajah lain dari India pembatasan tentara dan pasukan paramiliter yang mereka bergaul dengan pelecehan dan perilaku kekerasan. Kata Mrs Khrieleno Terhuja, Sekretaris NMA, Sekitar 1.956 kesulitan mulai di Kohima. Sekolah ditutup, dan banyak harus menghentikan studi mereka. Ada terputusnya kehidupan normal. Rumah dibakar. Rumah kami di Kohima serta rumah kami di desa kami (Khonoma) dibakar menjadi abu. Keluarga kami menjadi sasaran terutama karena paman kami (AZ Phizo) dan beberapa kerabat yang terlibat dalam pemberontakan di Nagaland.²⁶

Dr Ngully mengutip insiden Desember 1994, ketika penduduk sipil dari Kota Mokochung tertangkap dalam bentrokan antara faksi-faksi bawah tanah Naga dan Maratha Light Infantry. Sebuah studi Palang Merah melakukan beberapa 11 bulan kemudian mengungkapkan bahwa populasi menderita (24) gangguan stres. Dari 115 korban, 81 (70,43 persen) dapat didiagnosa menderita PTSD. Di antaranya, 95 persen terus mengalami berulang dan ingatan mengganggu acara; 88,95 persen menderita mimpi yang berhubungan dengan acara tersebut; 88,88 persen merasa seolah-olah peristiwa traumatis yang berulang; 95,06 persen ditemukan memiliki reaksi psikologis sebagian besar dalam bentuk palpitasi dan sesak napas; 65,43 persen ditemukan kurang dalam perasaan cinta setelah trauma; 96,60 persen memiliki kesulitan dalam konsentrasi dan 66,66 telah kehilangan kepercayaan diri dan mengembangkan rasa masa depan terancam. Kejutan memuncak dengan adanya fakta bahwa insiden tersebut terjadi selama musim meriah ketika orang tidak mengharapkannya. Peristiwa mengerikan termasuk menembak

²⁵ Narendra Chongtham, *Marrying into Violence: Domestic Violence in Manipur* Opinion 3, Article published in Manipur Update-January Issue (Volume I Issue II, January 2000)

²⁶ Support Services to Counter Violence Against Women in Assam A Resource Directory, 2002. Published by North East Network. Supported by UNIFEM

mati orang, penjarahan dan pembakaran. Selamat melihat dan merasakan penderitaan kematian, orang yang dibakar hidup-hidup di dalam gedung yang terbakar. Wanita dilucuti pakaian yang digulung menjadi bola, direndam dalam bensin dan dilemparkan ke pembakaran bangunan. Banyak perempuan diperkosa di bawah todongan senjata oleh tentara. (Masyarakat Palang Merah, n.d.) Orang-orang akan mengeluh sakit dan ketidaknyamanan akan penyakit yang tidak bisa didiagnosis. Orang-orang ini dipenuhi dengan kecemasan, khawatir, dan ketidakbahagiaan. Tidak ada sukacita atau semangat dalam hidup mereka.

pada bulan Februari 2003 mengatakan Ada tumbuh kesadaran bahwa kesehatan mental telah diberikan tempat yang sah di semua perencanaan pelayanan kesehatan karena masalah hidup, pernah dianggap berbeda dari gejala penyakit dan tidak jatuh di bawah domain psikiatri semakin menjadi bagian dari kejiwaan berlatih, karena mereka berhubungan dengan bidang psikologis, emosional dan sosial hidup, yang telah lanjut efektif disebabkan situasi konflik di negara bagian. Oleh karena itu NMA telah memasukkan ke dalam rencana-10 proposal untuk mendirikan sebuah Rumah Sakit Jiwa Negara untuk menambah Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kohima. Ibu Sano Vamuzo, pemimpin NMA pun menggambarkan dirinya sebagai penderita trauma setelah kejadian kekerasan berkata, saya tidak pergi untuk konseling. Semua orang menderita. Siapa yang akan memberi nasihat? Seorang korban penganiayaan berkata, aku pergi ke rumah sakit untuk pertolongan pertama namun tidak pergi untuk konseling apapun, karena tidak ada pusat konseling profesional yang tersedia, Meskipun teman-teman dan keluarga dan organisasi perempuan menawarkan bantuan dan menghibur saya. Seorang wanita yang saudaranya adalah salah satu dari lima pemuda yang telah diduga disiksa sampai mati oleh militer Pemerintah India. Ia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup dan mengalami trauma oleh insiden tersebut. Istri dan anak-anak mereka adalah orang-orang yang paling menderita, meskipun semua kerabat dan anggota keluarga menderita. Istri-istri almarhum telah berusia jauh meskipun mereka tidak benar-benar tua. Anak-anak mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak; mereka harus bekerja lembur di ladang. Kerabat juga harus berbagi beban mereka. Selama musim perayaan, ketika semua orang makan daging, anak-anak harus puas memakan sayuran karena mereka tidak mampu membeli apa-apa.

Saat ini konseling bagi penderita HIV-AIDS, pecandu Alkohol dan Penyalahgunaan Zat di wilayah Nagaland telah berada di dalam Nagaland State AIDS Control Society (NSACS) mereka memiliki 34 LSM termasuk NMA yang bekerja di bawah pratinjau dan

melaksanakan program yang diprakarsai oleh mereka. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh mereka adalah: klinik STD melekat pada semua rumah sakit sipil distrik di mana investigasi gratis dan obat-obatan yang tersedia untuk pengobatan STD; 9 konseling dan tes sukarela pusat; sebuah rumah sakit AIDS bekerja sama dengan NMA dan banyak program perawatan dan dukungan masyarakat. Mereka juga menjalankan dua puluh empat jam Helpline, bank darah serta penurunan pusat untuk orang yang hidup dengan HIV / AIDS. Ada 23 program intervensi yang ditargetkan dilakukan oleh 18 LSM di bawah NSACS sebagai berikut: Intravenous User of Drugs (IUD) Project Pengemudi truk, Project pekerja seks Commercial, Proyek Penjara Narapidana, Project Anak-anak Jalan, Project Sekolah Drop-Out. Sebuah proyek mengandung dan mencegah penularan ibu ke anak juga telah dimulai di rumah sakit kabupaten di mana semua wanita hamil bersama dengan pasangan mereka didorong untuk menghadiri klinik antenatal dan di sini dukungan yang diperlukan dan bimbingan dan obat-obatan yang disediakan untuk perempuan HIV positif. Sejumlah inisiatif menargetkan anak-anak sekolah telah diluncurkan dalam terang data penelitian yang sangat meresahkan. Ada juga program yang disebut HIV-TB Program koordinasi untuk memastikan pengobatan gratis lengkap untuk kasus TB di semua kabupaten.²⁷

²⁷ Ibid. hal 66

BAB 3. KONFLIK DI NORTHEAST INDIA

3.1 Sejarah Konflik di Northeast India

Northeast India merupakan bagian teritori Negara India yang berada di wilayah timur laut wilayah India. Letak Northeast India berada di ujung timur laut terluar wilayah India yang berbatasan dengan Bangladesh, Myanmar, Nepal dan China. Wilayah tersebut terdiri dari 8 negara bagian yaitu: Sikkim, Meghalaya, Manipur, Mizoram, Nagaland, Tripura, Arunachal Pradesh dan Assam. Secara geografis Northeast India merupakan wilayah yang terisolasi dari pemerintahan pusat Negara India di New Delhi. Satu-satunya jalan yang menghubungkan wilayah Northeast India ke pemerintahan pusat India adalah melewati negara bagian Sikkim yang disebut Koridor Siliguri atau leher ayam.¹

Sejak akhir tahun 1940 Northeast India merupakan wilayah yang sarat dengan konflik. Pada sejarahnya hal ini dikarenakan perbatasan geografis yang dibuat oleh Inggris pada masa penjajahan untuk kepentingan ekonomi dan strategi pertahanan keamanan terhadap China dan Burma tanpa mempertimbangkan pergerakan suku asli di masing-masing wilayah. Letak geografis Northeast India yang jauh dari pemerintahan pusat India membuat distribusi dan perkembangan ke wilayah tersebut sangat minim, sehingga masyarakat Northeast India merasa terdiskriminasi oleh pemerintah India.

3.1.1 Etnis di Northeast India

Keragaman etnis di Northeast India adalah salah satu penyebab terjadinya konflik. Ditinjau dari segi etnis dan budaya, masyarakat Northeast India jauh berbeda dengan masyarakat India pada umumnya. Masyarakat India mainland mayoritas adalah etnis dravida sedangkan masyarakat Northeast India mayoritas adalah etnis mongol-tibet. Menurut sejarah, Northeast India adalah wilayah rute migrasi terbesar sejak abad ke 12 sehingga etnis dan budayanya menjadi beragam.²

¹ (Subir.Bhaumik..“Pemberontakan di Timur Laut India: Konflik, Pemilihan dan Perubahan”, East West Center Washington Working Papers No10.Washington: East West Center. 2007.hal.2.)

² Devojit Phukan, Asom Nagaland Sima Samasya, Rashmi Phukon, Phukan Grantha Prakashan, Golaghat, December 2001.

Tabel 3.1: Persentase Etnis di Northeast India

Name of tribes	Percentage of total of ST Population (%)
Karbi	82.29
Garo	4.32
Kuki	2.82
Hajong	0.18
Mizo	0.16
Hmar	0.006
Dimasa	7.04
Khasi and Jaintia	2.26
Man-Tai	0.45
Synteng	0.29
Naga	0.02
Pawi	0.002

Source: “Statistical profile of the Hill area of Assam” prepared by G.N. Das from the institute of Research for Schedule tribes and Schedule castes of Assam

Suku Karbi bermukim di Karbi Anglong yang merupakan tanah di wilayah Assam merupakan tanah kuno dengan warisan budaya yang kaya dan tempat pertemuan orang dari ras yang berbeda, secara budaya dan peradaban. Tanah yang subur, sumber daya alam dan hutan yang kaya, keragaman flora dan fauna mendorong suku untuk menetap. Masyarakat dan kelompok-kelompok orang yang menetap dan berkontribusi dengan beragam budaya dan latar belakang ras akhirnya bercampur untuk bergabung menjadi satu komunitas baru.

Karbi Anglong dengan wilayah geografis 10.332 km persegi adalah kabupaten terbesar di daerah Assam dengan populasi 8,12,320. Sebagian besar penghuninya adalah keturunan Mongoloid Karbi, Dimasa, Garo, Khasi, Jaintia, Kuki, dan Rengma suku Naga juga beberapa percampuran Assamese, Bengali, Nepal dan etnis lainnya mendiami wilayah tersebut. Oleh karena itu kawasan tersebut menjadi melting pot bagi berbagai etnis yang berbeda budaya, ras dan bahasa.

Meghalaya adalah salah satu dari tujuh negara bagian timur laut yang didiami suku Garo. Luas total 22.429 sq.kms dan populasinya adalah 2.306.069. Etnis utamanya adalah Garo dan Khasi Jaintia. wilayah ini dibagi menjadi 3 bagian di Garo Hills, 4 bagian di Khasi Hills dan 1 bagian di Jaintia Hills. Namun, orang-orang Garo Hills dan Khasi Hills selalu terpisah oleh fitur geografis. Meghalaya adalah dataran tinggi yang terdiri dari pegunungan, batu dan hutan dan jalan komunikasi antara kedua daerah Tura dan Shillong. Tanpa

Meghalaya sebagai sebuah jalan penghubung Tura dan Shillong, orang-orang dari Tura harus pergi ke Shillong melewati Guwahati, ibukota Assam. Etnis Garo adalah percampuran etnis Bodo Tibet-Burman yang menetap di Garo Hills selama 400 tahun terakhir setelah digulingkan dari wilayah Koch dari Cooch Behar. Masyarakat Garo adalah dibagi menjadi 3 exogamous utama, 'kin-kelompok' atau Kachis, yaitu Marak, Sangma dan Mukmin. Kelompok tersebut dibagi lagi menjadi kelompok-kelompok seperti Areng, Shirra dan Ebang. Mereka adalah masyarakat yang matrilineal di mana kepala keluarga atau Nokma pada umumnya dikendalikan oleh laki-laki.³

Etnis Kukis, Scheduled Hill Tribes, keturunan Mongoloid dan kelompok linguistik Tibet-Burman.⁴ Kuki adalah sebuah istilah untuk sejumlah besar sub - suku dan klan yang menjalin hubungan erat antar sekutu . Mengacu pada 20 suku atau marga kelompok linguistik Kuki - Chin - Mizo diakui sebagai Terjadwal Suku di Manipur sebagai Kuki . Mereka adalah Aimol , Anal , Chiru , Chothe , Gangte , Hmar , Koirao , Koirang , Kom , Lamkang , MoYon , Mizo ,Paite , Purum , Ralte , Simte , Sukte , Thadou , Vaiphe dan Zou . mereka diyakini berasal di China dari mana mereka pergi ke Tibet sebelum mencapai Myanmar. Pada masa sekarang mereka menyebar dari Nagaland , North Cachar Hills , Karbi Anglong dan Manipur di India ke Bukit Chittagong Bangladesh dan beberapa bagian Myanmar . Menurut Ms Nazmeen Anarn migrasi mereka ke Karbi Anglong di distrik Sibsagar terjadi setelah the Kuki memberontak pada tahun 1917-1919 dan kelompok Karbi Anglong mendiami beberapa wilayah Hamren dan Singhason - Khanbomon di Bukit Diphu.

3.1.2 Pembagian Wilayah di Northeast India

Di sudut Timur Laut Republik India terletak negara bagian Assam dan Nagaland. Assam membentang dari lintang 24,1 ° N untuk 26,0 ° N lebarnya dan 89,67 bujur ° E untuk 96,04 ° E panjang dan mengakomodasi 2,64 persen dari penduduk negara itu. Negara bagian tersebut adalah Negara yang paling padat di Northeast India.

Tujuh Serikat Timur Laut (Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland dan Tripura) dikelilingi oleh Bhutan, Tibet dan China di utara, Myanmar di timur dan Bangladesh ke selatan.⁵ Assam memiliki perbatasan bersama dengan semua negara di wilayah ini serta dengan Bhutan dan Bangladesh. Pada awalnya, Assam termasuk

³ Ibid, hal. 25.

⁴ Ibid, hal. 30.

⁵ Bhattacharyya, Bhubaneswar, *The Troubled Border*, Shri Khagendra Narayan Dutta Baruah, Guwahati, 1995.

Negara bagian Mizoram, Nagaland dan Meghalaya. Wilayah tersebut bahkan lebih besar sebelum pembagian wilayah oleh kolonial. Sebuah wilayah besar dari sebuah negara bagian yang bersinggungan dengan Pakistan Timur. Namun, pada tahun 1980, wilayahnya dari 2,55,000 km persegi dikurangi menjadi 78.438 km persegi.

Masalah di wilayah Assam - Nagaland merupakan konflik etnis yang sudah lama. Hal ini terjadi pada tahun 1866 ketika Hills District Naga dibentuk. Sejak saat itu serangkaian konflik antara kedua Negara yang timbul semakin memuncak karena pembentukan Nagaland pada tahun 1963. Klaim dari Assam dan Nagaland atas saluran hutan sepanjang perbatasan sebenarnya adalah konflik perbatasan. Assam mengklaim bahwa perbatasan hutan termasuk dalam wilayahnya sebagaimana ditentukan pada tahun 1925 oleh Pemerintah Inggris. Etnis Naga melawan penguasa asing yang kemudian mencoba untuk memindahkan orang-orang etnis Naga di wilayah distrik Naga Hills, menurut etnis Naga mereka memiliki hak yang sah untuk dataran wilayah yang sangat luas dan berharga tersebut, dengan demikian konflik etnis di wilayah Assam dan Naga dimulai.

Perbatasan daerah Assam – Nagaland telah dibentuk menjadi enam sektor - A , B , C , D , E dan F tersebar di distrik Sivasagar , Jorhat , Golaghat dan Karbi Anglong di Assam. Pada 1872, Suaka Hutan Nambor dibentuk, Hutan Abhoypur dan Desoi juga kemudian dibentuk dalam wilayah distrik Sibsagar. Pada tahun 1887 , suku Diphu dan Rengma akhirnya memiliki Hutan yang termasuk dalam District Naga Hills di daerah yang dulu milik suku Nowgong yang sekarang dialihkan ke District Naga Hills pada tahun 1897. Hutan Doyang Suaka diresmikan pada tahun 1888 di distrik Sibsagar. Sektor A , B , C dan D jatuh dalam distrik Golaghat, Assam, tepat berada di zona perbatasan yang bersengketa di Assam – Nagaland. Daerah rawan konflik ini dibagi menjadi sektor A , B , C dan D.

Pasukan Netral dari pemerintah kolonial telah disiagakan di sektor-sektor ini untuk mempertahankan hukum dan ketertiban yang telah dibuat oleh pemerintah kolonial. Namun, sebagian besar hutan telah menjadi tempat tinggal beberapa suku lain yang melanggar batas wilayah, seperti terlihat Tabel 3.2 di bawah ini :

Tabel 3.2: data pembagian wilayah hutan di Assam-Nagaland

Name of forest	Sector	Total land (ha)	Encroached (ha)
1. Diphu Reserved Forest	A	18363.00	18053.00

2. South Nambor Forest	B	27240.00	2500.00
3. Rengma Nambor Forest	C	13921.00	11800.00
4. Doyang Nambor Forest	D	24635.77	23000.00
5. Desoi Valley Nambor Frt.	E/F	16381.45	13322.46
6. Desoi Nambor Forest	F	2797.15	1532.34
7. Tiru Hills Nambor Hills	F	5954.55	4794.15
8. Abhoypur Nambor Forest	F	6737.98	400.00
9. Gelehi Nambor Forest	F	5157.00	4000.00

Taken from: 'Brief Notes on Assam-Nagaland Border Areas of A, B, C and D sectors under Golaghat District' by J.C. Pegu, Deputy Commissioner, Golaghat. (Source : J.K. Pillai Commission Report, 1997)

Sektor tersebut meliputi area seluas 18,365,71 hektar milik daerah Negara bagian Assam sebagaimana tertera pada perjanjian yang di buat oleh pemerintah kolonial, tetapi para etnis Naga yang melanggar batas wilayah dan mendirikan 43 desa di dalamnya, hal ini terjadi karena kurangnya pantauan dari pihak pemerintah kolonial. Hanya 5 dari desa tersebut merupakan desa non-Naga, dari jumlah penduduk 22.750 jiwa, 18.050 jiwa merupakan etnis Nagas dan 4.700 non-Naga. Bersama-sama mereka menempati sekitar 17.500 dari total luas area sebesar 18,365.71. Dalam hal ini, etnis Naga menempati 16.950 ha dan non-Nagas 550 ha.⁶

Pada tahun 1984 dan 1987 Pemerintah Nagaland bahkan mendirikan posko-posko divisi etnis Naga di sektor tersebut dan pada tanggal 28 November 1991, mendirikan sebuah sub-divisi dengan papan tanda 'Homeland', sedangkan pemerintah Assam telah membangun sebuah posko sebagai penjaga wilayah perbatasan, tetapi karena berbagai alasan, posko tersebut tidak berfungsi sebagaimana semestinya.

⁶ Bhattacharyya, Bhubaneswar, The Troubled Border, Shri Khagendra Narayan Dutta Baruah, Guwahati, 1995. Hal: 27

Tabel 3.3: wilayah yang ditempati etnis Naga dan non-Naga

Sl. No. R.Forest	Sector	TL(In ha)	LO	LO
			Non-Nagas	Nagas
1. Diphu R. Forest	A	18,365.71	550	16,950
2. Nambor South RF	B	20,057.55	15,000	10,000
3. Rengma RF	C	13,921.68	9800	2000
4. Doyang RF	D	24,635.77	23,000	1000

* R: Reserved, TL: Total Land, LO: Land Occupied

Taken from: 'Brief Notes on Assam-Nagaland Border Areas of A, B, C and D sectors under Golaghat District' by J.C. Pegu, Deputy Commissioner, Golaghat.(Source : J.K. Pillai Commission Report,1997)

Setelah perjanjian Yandaboo dengan kaisar Burma di Februari 1826 rezim Inggris mengambil alih kendali politik Assam dan secara bertahap mengkonsolidasi kontrol administratif yang ada di dataran subur tersebut. Dalam wilayah ini hidup suku yang dianggap oleh Administrator Inggris, liar dan bermusuhan. Suku-suku yang menduduki saluran Bukit Assam secara kolektif dikenal sebagai Naga. Para penguasa Inggris tidak berhasil dengan mudah dalam mengambil kendali atas daerah mereka. Beberapa konflik mampu diredam dan akhirnya mereka berada bawah unit administratif tunggal District Naga Hills melalui ketetapan kolonial tertanggal 15 November, 1866 yang berbunyi:

"It is hereby notified that, with the sanction of the Government of India, the Lieutenant Governor has been pleased to abolish the subdivision of North Cachar in Assam, and to constitute a separate district, consisting of that part of the district of Nowgong which lies on the right banks of the river Doyang. The name of the district will, for the present be the Naga Hills, and its headquarters will be Samoogooting. It will be administered by a Deputy Commissioner under the control of the Commissioner of Assam."⁷

⁷ Nengsong, H. (2003). 'Public Interest Litigation: Naga Tribal Employees Association (MTEA)', Gauhati High Court: Guwahati. Hal: 93

Deskripsi wilayah yang termasuk dalam kabupaten baru dari 'Naga Hills' tidak jelas dan tidak memiliki kejelasan serta spesifikasi, namun ketentuan Pemerintah Inggris membuka jalan bagi dimasukkannya etnis non-Naga ke lahan yang luas di sepanjang kaki bukit ke Assam. Pemerintah Inggris berusaha untuk memperbaiki celah ketentuan perbatasan dari tahun 1866 melalui perintah lain tanggal 28 Juni 1875. Sementara itu industri teh berkembang dengan baik di Assam dan pemerintah kolonial melihat bahwa bisnis ini menguntungkan. Tugas pengelolaan kebun teh jatuh pada beberapa etnis Naga pada sektor lahan etnis non-Naga dan hal itu mendapat izin karena etnis Naga sangat terampil dalam bercocok tanam sehingga menguntungkan bagi pemerintah kolonial untuk mengembangkan tumbuhan teh di daerah tersebut.

Sejak masuknya perkembangan tanaman teh di kaki bukit Hills District Naga, administrasi Inggris merasa perlu untuk mengatur kembali batas-batas wilayah. Sebagai hasil perubahan yang dilakukan dalam garis batas dari waktu ke waktu termasuk pengalihan hutan di kaki bukit menjadi kontrol atas administrasi distrik Sibsagar Assam (Hadir Sibsagar, Jorhat dan District Golaghat). Pada tahun 1913, Dimapur masuk dalam wilayah District Naga Hills dan mengalami beberapa perubahan batas dari Distrik Naga Hills, beberapa etnis menerima apa yang di tentukan dan mendiami suatu wilayah bersama dengan etnis berbeda yang telah menetap sepanjang disengketakan Assam - Nagaland perbatasan di distrik Golaghat di Assam dan Wokha di Nagaland. Di sisi lain Assamese, para kelompok yang fasis tidak ingin berkumpul dengan kelompok etnis lain, terutama kelompok etnis non - Naga. Kelompok lainnya yang berada di wilayah tersebut adalah Bodos , Nepal , Muslim , Assamese , Garos dan Manipuris. Selain Nagas, ada dua suku besar yang dapat ditemukan di daerah tersebut yaitu Kabupaten Wokha Nagaland yang bersinggungan dengan Distrik Golaghat dari Assam. Kabupaten Wokha didominasi oleh Suku Lotha dan karenanya suku ini adalah kekuatan yang dominan di daerah tersebut, diikuti oleh suku Sema.

Percampuran etnis yang kacau tersebut memaksa beberapa kelompok untuk menerima dan bekerja sesuai dengan kemauan pemerintah kolonial, disisi lain ada beberapa kelompok yang tidak bisa tinggal dan menerima hal tersebut. Kelompok Naga sebagai etnis dominan dan terkuat mulai menimbulkan konflik dan menyerang beberapa kelompok agar meninggalkan wilayahnya. Kelompok dominan lain terhasut dan mulai mengobarkan konflik di beberapa tempat dengan alasan yang kurang lebih sama yaitu mengenai perbatasan dan dominasi lahan.⁸

⁸ Ibid. Hal:33

Pemerintah kolonial memang memiliki surat-surat sebagaimana kesepakatan untuk mengatur perbatasan di wilayah Northeast India, tetapi mereka tidak memberikan batas yang jelas dalam praktiknya, sehingga kelompok-kelompok etnis yang bercampur membatasi wilayah mereka sendiri dengan cara berperang, saling membunuh dan mendominasi lahan dengan cara mereka sendiri. Kelemahan pemerintah kolonial yang tidak memantau perkembangan dari perbatasan yang sudah di buat membuat konflik semakin tersulut dengan adanya perebutan komoditas teh sebagai tanaman yang menguntungkan.

3.1.3 Konflik di Northeast India pasca Kemerdekaan India

Pasca Perang Dunia II, Inggris memberi kemerdekaan untuk India pada tahun 1947. Bekas penjajahan Inggris yang mengkotak-kotakan daerah di Northeast India memberikan dampak yang besar sebagai penyebab konflik di Northeast India, hal ini dikarenakan pembagian lahan yang tidak sesuai dengan pergerakan suku-suku di Northeast India. Masing-masing suku memiliki tanah warisan yg di wariskan turun temurun dengan batasan wilayah tertentu yg tidak dipertimbangkan oleh Inggris sehingga pasca kemerdekaan India hal ini menjadi rumit dikarenakan batasan wilayah yang ditentukan Inggris memotong banyak batasan wilayah yang dimiliki secara turun temurun oleh suku-suku yang berada di Northeast India.

Perkembangan suku di wilayah Northeast menjadi semakin rumit dikarenakan distribusi ekonomi dan politik dari pemerintahan India tidak merata pasca kemerdekaan India. Lokasi Northeast India yang terisolasi dari pemerintahan pusat membuat wilayah tersebut jauh tertinggal baik secara ekonomi maupun politik. Kesejahteraan di wilayah Northeast india berada dalam skala terendah jika dibandingkan wilayah lain di India. Pemicu pemberontakan pasca kemerdekaan India masih berlangsung dan pemberontakan baru banyak muncul karena ketimpangan yang terjadi antara masyarakat mainland dan masyarakat Northeast India.

Negara-negara yang berbatasan dengan India juga punya peran dalam pemberontakan bersenjata di Northeast India sejak 1950-an. Para militan itu dilatih di kamp-kamp pelatihan militer di Tiongkok, Myanmar dan Bangladesh (dulu Pakistan timur). Keterlibatan asing dan pelatihan inilah yang membuat para militan memahami cara menggunakan senjata dalam berbagai aksi dan pertempuran. Kamp serupa kelak menjamur di Bhutan.

3.1.3.1 Pemberontakan di Nagaland

Akar separatisme di Nagaland terbentuk sebelum kemerdekaan negara India. Pada tahun 1929, ketika Gerakan Kemerdekaan India mendapatkan momentum dan Inggris harus meninggalkan India, para pemimpin Naga mendesak Inggris untuk tidak melampirkan wilayah Naga dengan India. Di bawah bendera "Naga Club", Naga mengajukan petisi kepada Komisi kemerdekaan India oleh Inggris bahwa mereka harus dibiarkan sendiri untuk menentukan masa depan mereka seperti di masa lalu dan tidak dipaksa untuk diperintah oleh India, yang, kata mereka, tidak pernah 'ditaklukkan' mereka. Dengan rekomendasi dari Komisi Kemerdekaan tersebut, pada tahun 1935 Pemerintah India menyatakan bahwa "Naga Hills District" diperlakukan sebagai "Wilayah yang Diistimweakan" pada tanggal 3 Maret 1935.⁹ Pada tanggal 19 Juli 1947, delegasi Naga bertemu Mahatma Gandhi di Bhangi Colony di Delhi dan mengatakan kepadanya bahwa mereka memutuskan untuk mendeklarasikan kemerdekaan mereka sehari sebelum India melakukannya, pada tanggal 14 Agustus 1947 Gandhi meyakinkan delegasi bahwa dalam kondisi apapun akan memaksa digunakan melawan Nagas, yang, menurut dia, yang bebas untuk tinggal dari Uni India, jika mereka menghendaki demikian.

Pemerintah India melarang NNC pada tahun 1972 di bawah Kegiatan Melawan Hukum (Pencegahan) Act of 1967 dan melancarkan operasi melawan pemberontakan besar-besaran. Pada tanggal 11 November 1975, Shillong Accord ditandatangani antara Pemerintah India dan Naga "organisasi bawah tanah" di mana para penandatangan diterima "tanpa syarat Konstitusi India". Namun demikian, kesepakatan damai ini tidak bisa menenangkan masalah Naga. Ada pemberontakan terhadap kesepakatan yang menyebabkan pembentukan Dewan Sosialis Nasional Nagaland (NSCN) pada tahun 1980 perpecahan di kelompok pemberontak terjadi karena perbedaan suku dan pada tahun 1988 sebuah kelompok pemabrontak baru dari suku Naga muncul. NSCN terkoyak menjadi dua faksi yaitu faksi Isak-Muivah (NSCN-IM) dan faksi SS Khaplang (NSCN-K). Kedua kelompok ini terus gerakan mereka dengan tujuan diakui pendirian Nagalim (lebih besar Nagaland) yang terdiri dari wilayah Naga dihuni Nagaland, Assam, Manipur, Arunachal Pradesh dan Myanmar.¹⁰

⁹ B.G. Verghese, *India's Northeast Resurgent: Ethnicity, Insurgency, Governance, Development*, New Delhi: Konark Publishers, 1996, hal. 21.

¹⁰ Ibid.hal 33

Pada tanggal 1 Agustus 1997, NSCN-IM dan pemerintah Uni menandatangani perjanjian gencatan senjata dan sejak diadakan lebih dari 80 putaran dialog (sampai November 2013) untuk menyelesaikan konflik. Kesepakatan gencatan senjata serupa telah ditandatangani antara NSCN-K dan pemerintah pada bulan April 2001, meskipun kedua belah pihak belum memulai proses dialog. Perjanjian gencatan senjata dengan kedua kelompok telah diperpanjang secara berkala. Pada proses dialog dengan pemerintah India dengan faksi Isak Muivah tersebut, gencatan senjata terjadi di bulan berikutnya.¹¹ Pemerintah India juga menandatangani kesepakatan gencatan senjata dengan faksi Khaplang pada 2001. Ironisnya, aksi kelompok militan tidak pernah berhenti sampai sekarang. Pemerasan dan kekerasan tetap terjadi. Selama India dan Naga berkonflik, banyak perempuan Naga yang diperkosa tentara India, orang-orang dibunuh dan rumah-rumah dibakar.

Sementara pengaruh NSCN-IM terlihat lebih membentang luas di tujuh kabupaten dari Nagaland, NSCN-K telah berhasil mempertahankan daerah pengaruhnya, terutama di daerah seperti Mokokchung, Tuensang dan Kantong di Dimapur. NNC, di sisi lain, tetap menjadi bayangan buruk kelompok bekas yang memprakarsai pemberontakan Naga.

Kelompok pemberontak baru, NSCN-Unifikasi, dibentuk pada November 2007 sebagai hasil dari 'perjanjian gencatan senjata' ditandatangani antara fungsionaris senior kedua IM dan K faksi pada tanggal 23 November 2007 bentrokan faksi menjadi urusan rutin antara NSCN-U dan yang NSCN-IM. Sebuah sekutu jelas NSCN-K, faksi penyatuan NSCN belum banyak aktif sejak tahun 2009 Namun, ada penurunan tajam dalam kematian dalam bentrokan faksi setelah penandatanganan Perjanjian Rekonsiliasi (COR) oleh para pemimpin puncak NSCN -im, NSCN-K, dan 'Pemerintah Federal Dewan Nasional Nagaland'-Naga (FGN / NNC) pada 13 Juni 2009.¹²

Di Nagaland, kelompok militan telah terus-menerus mengumpulkan 'pajak' dari semua sumber, termasuk departemen Pemerintah dan jaringan pemerasan menyebar di hampir semua desa 1317 Negara.¹³ Aturan gencatan senjata telah dilanggar dan militan bergerak bebas dengan tangan mereka di terbuka. Pusat dan peran Negara Pemerintah 'telah berkurang untuk menonaktifkan penonton. Sebaliknya, pada 27 November 2009, majelis legislatif Nagaland memutuskan untuk memberikan legitimasi kepada pemberontakan enam dekade-panjang terjadi di negara untuk "berkorban tanpa pamrih untuk penyebab umum dari

¹¹ Ibid. hal 53

¹² Ibid. hal 55

¹³ Ibid. hal. 55

Nagas" mereka. Resolusi, digerakkan oleh Kepala Menteri Neiphiu Rio, yang didukung oleh seluruh rumah 60-anggota, termasuk 19 anggota parlemen oposisi Partai Kongres.

Penyelundupan senjata selalu menjadi masalah dan NSCN-IM adalah pemasok senjata terbesar di Timur Laut. Pada 2013 sendiri, 25 senjata dealer ditangkap di 11 insiden. Penangkapan Wuthikorn Naruenartwanich alias Willy NARUE oleh polisi Bangkok pada 30 Agustus 2013 untuk pasokan senjata China ke NSCN-IM telah menjadi terobosan signifikan. NARUE, Thailand nasional, dilaporkan dijemput di permintaan India dan mengungkapkan "informasi penting" tentang rantai pasokan untuk menyelundupkan senjata dari Cina ke Timur Laut melalui Bangladesh. Dilaporkan bahwa NARUE adalah lawan utama dari Anthony Shimray, pemimpin NSCN-IM senior dan lengan germono kepala kelompok, yang ditangkap oleh Badan Investigasi Nasional (NIA) dari Patna di Bihar pada 2 Oktober 2010 Shimray adalah saat ini diajukan di penjara Tihar di Delhi. Perang Turf antar kelompok Naga telah mengakibatkan perpecahan lebih lanjut dari kedua NSCN-IM dan NSCN-K. NSCN-KK (Khole Kitovi), sebuah kelompok sempalan dari NSCN-K, dibentuk pada tanggal 7 Juni 2011; dan Zeliangrong United Front (ZUF), sebuah kelompok Naga berbasis Manipur, memisahkan diri dari NSCN-IM pada 25 Februari 2011.

NSCN-K menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Pemerintah Myanmar pada tanggal 9 April 2012 Perjanjian otonomi yang diberikan kepada NSCN-K di tiga kabupaten di negara ini: Lahe, Leshi dan Nanyun, yang jatuh di Sagaing - wilayah administrasi utara-barat Myanmar, yang berbatasan dengan Nagaland dan Manipur ke utara. Hal ini juga menyediakan anggota NSCN-K dengan kebebasan untuk bergerak 'bersenjata' di seluruh negeri.¹⁴

Pada tanggal 5 Desember 2011, 'Naga konkordan' dibentuk. Ini adalah deklarasi bersama yang ditandatangani oleh semua enam pemimpin-Isak Chishi SWU dan Thuingaleng Muivah dari NSCN-IM; 'General' Khole Konyak dan N. Kitovi Zhimomi dari NSCN-Khole-Kitovi; dan 'Brigadir' S. Singnya dan Zhopra Vero dari NNC setelah mereka memutuskan "pada prinsipnya" pada 26 Agustus 2011, untuk bekerja menuju pembentukan satu 'Pemerintah Nasional Naga'.

Sebagai upaya untuk rekonsiliasi antara Naga melanjutkan, konflik baru meletus antara Rengma Nagas dan Kukis yang tinggal di distrik Karbi Anglong Assam yang berbatasan Nagaland. Pada 28 Desember 2013, Naga Rengma Hills Protection Force (NRHPF) dieksekusi pembunuhan berdarah dingin dari sepuluh karbis, sembilan dari mereka

¹⁴ Phanjoubam, P. 'Manipur: The Search for Solutions', Faultlines 15; online version available at www.satp.org, Institute for Conflict Management: New Delhi. 2004

di dekat pusat komersial Nagaland ini Dimapur. Ini, bagaimanapun, tindakan balasan terhadap pembunuhan sembilan Rengma Nagas by KPLT yang (Macan Pembebasan Karbi Rakyat), kelompok Assam berbasis, di daerah Chokihola di Karbi Anglong pada tanggal 27 Desember 2013 mendatang Panggung ditetapkan untuk intra-suku bermusuhan. RNHPF dilaporkan melayang oleh NSCN (IM) untuk perlindungan Rengma Nagas.¹⁵

Rumitnya masalah lebih lanjut, Organisasi Nagaland Timur Rakyat memperbarui permintaan untuk 'Frontier Nagaland' negara terpisah tetapi keduanya Pusat dan Negara menolak permintaan. Dalam pertemuan yang diselenggarakan oleh Forum untuk rekonsiliasi Naga (FNR dibentuk pada bulan Mei 2008) pada tanggal 27 Februari 2014 di Dimapur, sama sekali 42 kelompok masyarakat memberikan dukungan penuh untuk proses rekonsiliasi Naga.

Inisiatif perdamaian di Nagaland bisa dilacak kembali ke September 1964 dengan pembentukan Misi Perdamaian dengan Jayaprakash Narayan, Bimala Prasad Chaliha dan Pdt Michael Scott sebagai anggotanya. Peace Mission dibentuk setelah terjadinya upaya kekerasan yang dilakukan oleh pemberontak untuk membawa penyelesaian politik setelah pembentukan negara bagian Nagaland pada tanggal 1 Desember 1963 Upaya perdamaian ini mengakibatkan penandatanganan Perjanjian penghentian operasional dengan pemberontak pada tanggal 6 September 1964 Tetapi kekerasan terus dan enam putaran pembicaraan antara Pusat dan para pemberontak gagal. 'Misi Perdamaian' pecah pada tahun 1967.

Gerakan masyarakat sipil di Nagaland secara tradisional efektif. Gereja telah menjadi pemain penting dalam pembuatan perdamaian di antara para pemberontak, hampir semuanya adalah Kristen, sejak awal konflik. Di Nagaland, Gereja memainkan peran penting dalam pembuatan perdamaian di antara para pemberontak, hampir semuanya adalah Kristen, sejak awal konflik. Pada bulan Juli 1997, Gereja Baptis menyelenggarakan Atlanta Perdamaian memenuhi di mana inisiatif kepemimpinan diterima NSCN untuk memulai proses dialog tanpa syarat. Pada tanggal 1 Agustus 1997, NSCN-IM dan pemerintah Uni menandatangani perjanjian gencatan senjata dan sejak diadakan lebih dari 80 putaran dialog (sampai November 2013) untuk menyelesaikan konflik. Kesepakatan gencatan senjata serupa telah ditandatangani antara NSCN-K dan Pemerintah pada bulan April 2001, meskipun kedua belah pihak belum memulai proses dialog.¹⁶

Butuh waktu empat tahun untuk NSCN-IM dan lawan bicara Pusat untuk memutuskan yurisdiksi gencatan senjata. Ketika para pemimpin pemberontak ingin itu

¹⁵ Laishram, B.S. (2004). 'Insurgency and the Collapse of Justice', IPCS Article 1491, Institute of Peace and Conflict Studies: New Delhi. Hal:77

¹⁶ Parrat, J. (2005). Wounded Land: Politics and Identity in Modern Manipur, Mittal Publications: New Delhi.

diperluas ke daerah-Naga dihuni luar Nagaland, Pusat menyatakan keengganan untuk melakukannya. Akhirnya, setelah bolak-balik antara New Delhi, Bangkok dan Amsterdam sekian kali sejak tahun 1997, bicara New Delhi untuk perundingan damai K. Padmanabhaiah mengumumkan di ibukota Thailand bahwa gencatan senjata telah diperpanjang satu tahun lagi, tanggal 1 Agustus 2001, dan bahwa , selanjutnya, gencatan senjata akan memiliki 'batas teritorial.' Pengumuman ini dibuat pada tanggal 14 Juni 2001 - setelah pertemuan dua hari dengan perwakilan NSCN-IM dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Muivah.

Isu perpanjangan gencatan senjata ke daerah-daerah di luar Nagaland, bagaimanapun, yang diajukan sebagai ancaman bagi proses perdamaian sebagai orang di Manipur mengambilnya sebagai serangan terhadap integritas teritorial mereka. Setelah kekerasan jalanan di Manipur di mana 19 orang tewas, pemerintah mencabut keputusan pada tanggal 8 Juli 2001 NSCN (IM), meskipun sebelumnya mengancam akan melanjutkan kekerasan jika perpanjangan yurisdiksi wilayah gencatan senjata ditarik, akhirnya menerima keputusan dan terus berpartisipasi dalam negosiasi. Tapi gencatan senjata tidak bisa menahan laju perolehan senjata oleh NSCN (IM).

Kepemimpinan kolektif NSCN (IM) datang ke New Delhi untuk melakukan pembicaraan pada bulan Januari 2003, pekerjaan tanah yang diletakkan dalam tiga putaran perundingan yang diadakan antara lawan bicara Pemerintah Uni dan kepemimpinan NSCN-IM.

- 18-20 Februari 2003 Malaysia: bicara khusus Union Pemerintah K Padmanabhaiah dan pemimpin NSCN-IM - Isak SWU dan Muivah - bertemu dalam upaya untuk memajukan proses perdamaian.
- 09-11 Juli 2003 Amsterdam: Sebuah komunike bersama yang ditandatangani di mana Pemerintah India diakui sejarah dan situasi Nagas unik. Kedua belah pihak sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama satu tahun dengan efek dari 1 Agustus 2002.
- 21-23 September 2003 Bangkok: Kedua belah pihak membahas berbagai 'isu-isu substantif dan menyetujui langkah-langkah untuk menjamin kelanjutan dari negosiasi. Kepemimpinan NSCN-IM mengajukan masalah seperti mengangkat larangan pada kelompok, penarikan UU Angkatan Bersenjata Kuasa Khusus dan surat perintah penangkapan terhadap mereka.¹⁷

¹⁷ Ibid. hal: 25

Pada bulan Maret 2002, kelompok pemberontak telah menempatkan tiga kondisi pada kunjungan kepemimpinannya ke India:

- Mengangkat larangan NSCN-IM;
- Penarikan surat perintah penangkapan terhadap para pemimpinnya; dan
- Pencabutan Angkatan Bersenjata Powers Act Khusus

Pemerintah Uni India menerima dua point pertama dan Pemerintah Nagaland telah menarik semua kasus tertunda terhadap kepemimpinan NSCN-IM untuk memfasilitasi proses perdamaian. Pada tanggal 16 Oktober 2003, Grup Pemantauan Hentikan-api (CFMG) dan Gencatan senjata Badan Pengawas (CSB) Ketua, Letjen (Purnawirawan) RV Kulkarni, menyatakan tujuh kamp yang ditunjuk di Nagaland, untuk masing-masing dua kelompok NSCN.

Selain proses perdamaian tingkat resmi, upaya perdamaian oleh organisasi masyarakat non-pemerintah dan sipil, dan Gereja telah luar biasa dalam Nagaland. Organisasi seperti Naga Hoho, dewan suku puncak dari Nagas, dan Asosiasi Naga Mothers '(NMA) telah bekerja ke arah rekonsiliasi antara faksi-faksi yang bertikai. Dewan suku milik suku-suku yang berbeda di Negara termasuk Ao Senden dan Sumi Hoho telah mencoba untuk membangun persatuan di antara NSCN-IM dan NSCN-K. Dalam dua pertemuan konsultatif dengan 73-anggota Naga delegasi dari bagian yang berbeda dari masyarakat, diselenggarakan oleh NSCN-IM di Bangkok, empat poin deklarasi diadopsi untuk "memperkuat strategi perdamaian" bahwa:

1. Didukung negosiasi politik yang sedang berlangsung antara Pemerintah India dan NSCN
2. Mengesahkan Naga Hoho, Gereja dan organisasi-organisasi berbasis massa untuk melanjutkan kepemimpinan mereka dari proses rekonsiliasi yang sedang berlangsung untuk mencapai pemahaman dan kesatuan di antara Nagas untuk memperkuat proses perdamaian
3. Membuat panggilan clarion untuk semua Nagas untuk datang ke depan untuk mendukung dan berpartisipasi dalam proses perdamaian sehingga masalah politik Indo-Naga dapat diselesaikan.
4. Mempercayakan Naga Gereja untuk mengadakan Hari Doa Nasional untuk tujuan di atas.¹⁸

¹⁸ Ibid hal29

Proses perdamaian Naga mengadakan kebuntuan bahkan setelah isu kedaulatan dijatuhkan oleh NSCN-IM. Solusi terbaik berikutnya yang Naga berpikir layak, yaitu, integrasi semua bidang Naga dihuni di timur laut dengan Negara yang ada Nagaland untuk membentuk unit politik-administratif, tidak diterima oleh kedua Pemerintah negara dan orang-orang di negara bagian Assam, Manipur dan Arunachal Pradesh. Pusat kini terjebak dalam posisi di mana ia tidak bisa mengatakan kepemimpinan NSCN-IM bahwa permintaan mereka untuk integrasi wilayah Naga dihuni di wilayah tersebut tidak bisa kebobolan, juga tidak dapat mencoba untuk menyelesaikan satu masalah yang mengganggu hanya untuk membuka beberapa bidang baru di wilayah yang sudah bergolak. Warga Nagaland juga telah mengambil inisiatif untuk membawa perdamaian di Negara. Untuk mengamankan 'perdamaian tanpa pra-kondisi', sebuah negara bagian gencatan senjata antara semua kelompok pemberontak Naga dinyatakan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh Gaon Buras '(kepala desa) Federasi Nagaland dan Dobashis (komunikator antara berbagai suku) Asosiasi Nagaland pada tanggal 24 Juli 2007. Pertemuan ini dihadiri oleh Naga Hoho (dewan puncak dari suku Naga), Nagaland Gereja Baptis Council (NBCC) dan lain-lain termasuk lima perwakilan dari NSCN-IM. NSCN-K dan NNC tidak menghadiri pertemuan itu.

Organisasi seperti Gerakan Naga Rakyat untuk Hak Asasi Manusia (NPMHR) yang secara berkala menyoroti dugaan pelanggaran oleh pasukan keamanan, dipandang sebagai menenangkan kepentingan NSCN-IM dan tidak memiliki pengaruh baik pada NSCN-K atau NNC. Beberapa pemimpin NSCN-IM dan NSCN-K bertemu di Niuland, dekat Dimapur tanggal 23 Nopember 2007 untuk menyatakan penghentian permusuhan antara kelompok pemberontak. Namun, kesepakatan itu segera ditolak oleh kedua kelompok pemberontak dan bentrokan terus berlanjut. Masalah seperti penyatuan wilayah Naga dihuni di Manipur, Assam dan Arunachal Pradesh tetap menjadi kendala dalam semua tiga putaran pembicaraan damai yang diselenggarakan pada tahun 2007.

Pada minggu pertama November 2007, sekelompok pekerja Gereja dari Inggris tiba di Nagaland untuk mendorong "rekonsiliasi" antara NSCN-IM dan NSCN-K. Sebuah tim dari Gereja Baptis Utara juga terlibat dalam menengahi perdamaian antara kedua faksi. Pendapat tertentu di komisi perdamaian sangat percaya bahwa kunci untuk membawa perdamaian di Nagaland adalah untuk menghentikan bentrokan antar faksi dan membangun persatuan di antara kelompok-kelompok militan. Dengan ide ini, antar-faksi 'gencatan senjata kesepakatan' ditandatangani oleh 'Kilonser' (Menteri Kabinet) C. Singson dari NSCN-K dan 'Kilo-Kilonser' (Menteri Dalam Negeri) Azheto Chophy dari NSCN-IM di Dimapur pada 23 November 2007. Tapi dengan pernyataan NSCN-IM bahwa deklarasi bersama dirancang

tanpa sepengetahuan 'otoritas yang lebih tinggi' kelompok mengakhiri banyak dicari 'unifikasi'. Pada bulan Juni 2008, pertemuan rekonsiliasi faksi Naga, Naga organisasi berbasis massa dan Hohos suku diselenggarakan oleh Naga Rekonsiliasi Forum dipimpin oleh pendeta Baptis Wati Aier, Baptist World Alliance dan kelompok Quaker yang berbasis di Inggris, di Chiang Mai di Thailand . Langkah ini gagal sebagai NSCN-K menolak tawaran yang dibuat oleh saingan NSCN-IM untuk dialog di luar negeri.¹⁹

Memperluas gencatan senjata yang ada dengan baik kelompok pemberontak tetap pusat untuk kebijakan manajemen konflik pemerintah di Nagaland. Perwakilan dari NSCN-IM dan pemerintah terus bertemu secara berkala untuk meneruskan negosiasi. Sejauh ini, bagaimanapun, sedikit keberhasilan telah dicapai untuk memecahkan kebuntuan atas permintaan kelompok pemberontak ini mengintegrasikan 'Naga dihuni' daerah Assam, Manipur dan Arunachal Pradesh dengan Nagaland. Baik pemerintah dan NSCN-IM, namun, pada tanggal 31 Juli 2007, setelah putaran dialog di Dimapur, mengambil keputusan untuk memperpanjang gencatan senjata tanpa batas. Sebuah babak beberapa pembicaraan telah terjadi sejak saat itu di Delhi, tapi tidak ada hasil konkret pembicaraan. Hal ini dilihat sebagai tanda bahwa pembicaraan damai berada di jalur dan bahwa-sisi Pemerintah India dua dan NSCN-IM-yang mempersempit perbedaan mereka.²⁰

Pada bulan Agustus 2009, Pemerintah Pusat akhirnya istilah K Padmanabhaiah sebagai lawan untuk melakukan pembicaraan dengan NSCN-IM. Pusat kemudian diangkat RS Pandey sebagai lawan baru pada tanggal 12 Februari 2010 lawan baru mengadakan pembicaraan dengan pimpinan NSCN-IM pada Maret 2010 di New Delhi, di mana NSCN (IM) delegasi mengajukan 30 tuntutan, termasuk kedaulatan untuk Nagaland , dan penyatuan semua bidang Naga yang didominasi negara-negara tetangga. Namun, permintaan untuk kedaulatan untuk Nagaland dan klaim teritorial atas bagian-bagian dari negara-negara tetangga yang kategoris ditolak. Dengan pengunduran diri RS Pandey dari jabatannya sebagai lawan berikutnya bergabung dengan partai politik, pemerintah saat ini tidak memiliki lawan untuk NSCN-IM.²¹

Untuk pertama kalinya pada tanggal 1 Juni 2010, Pusat dan NSCN (IM) mengadakan pembicaraan perdamaian di Kohima di Nagaland, di mana isu integrasi wilayah Naga dihuni, seperti yang dituntut oleh kelompok pemberontak, dibahas. Namun, Pusat mengesampingkan

¹⁹ Routray, B.P. 'Fuelling Dissent, Anti-Terror Laws in India's Northeast', *Peace and Conflict* 6(5) online, Institute of Peace and Conflict Studies: New Delhi. 2003. Hal: 57

²⁰ Ibid. hal: 59

²¹ Ibid. hal: 70

perubahan dalam batas-batas negara tanpa konsensus partai politik. Pada 4 Juni 2010, Muivah pindah ke Pftusero di distrik Phek pada "misi Goodwill". Pada bulan yang sama, ia mengunjungi desa Jotsoma dekat Kohima, Pughoboto di distrik Zunheboto, Tuensang dan Peren sebagai bagian dari misi perdamaian di mana ia mengadakan konsultasi dengan para pemimpin masyarakat sipil di Naga pembicaraan masalah.²²

Satu delegasi NSCN-IM, dipimpin oleh Ketuanya Isak Chisi SWU dan sekretaris jenderal Thuingaleng Muivah, bertemu dengan Perdana Menteri Manmohan Singh dan Uni Menteri Dalam Negeri P Chidambaram di New Delhi pada tanggal 2 Maret 2010. Para pemimpin Naga juga mengadakan serangkaian pertemuan dengan kemudian bicara untuk pembicaraan damai Naga, RS Pandey selama mereka tinggal di New Delhi. Kunjungan mengunjungi NSCN (IM) delegasi mengajukan 30 tuntutan, termasuk kedaulatan untuk Nagaland, dan penyatuan semua bidang Naga yang didominasi negara-negara tetangga. Namun, permintaan untuk kedaulatan untuk Nagaland dan klaim teritorial atas bagian-bagian dari negara-negara tetangga yang kategoris ditolak. Dengan pengunduran diri RS Panday dari jabatannya sebagai lawan berikutnya bergabung dengan partai politik, pemerintah saat ini tidak memiliki lawan untuk NSCN-IM.

Harapan dalam pembicaraan damai antara NSCN-IM dan Pemerintah India terus meskipun di tengah-tengah kebingungan. Pada tingkat atas NSCN-IM bertemu pada tanggal 25 Oktober 2012 di Dimapur diputuskan untuk berkonsultasi dengan orang-orang Naga sebelum tinta setiap perjanjian perdamaian dengan New Delhi.

Dalam gilirannya sampai sekarang belum pernah terjadi sebelumnya peristiwa di Nagaland, pada tanggal 2 April 2012, ribuan cinta damai Naga pemuda sukarela keluar di jalan-jalan Kohima, ibukota Nagaland ini, menuntut Pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap para militan. Organisasi pemuda di Kohima telah menghimbau kepada semua kelompok pemberontak pada 21 Maret 2012 untuk menghindari kekerasan. Hal ini diikuti oleh reli pada 2 April, yang diselenggarakan oleh Organisasi Pemuda Angami (AYO) dan didukung oleh beberapa organisasi Naga lainnya. Di sisi lain, Mei 2013, beberapa kelompok masyarakat sipil Naga, organisasi frontal, organisasi mahasiswa dan pemuda dan asosiasi bisnis di bawah naungan Naga Dewan membentuk Komite Aksi berlanjut Perpajakan (ACAUT) dengan resolusi untuk menentang pajak merajalela dan beberapa Koleksi oleh kelompok pemberontak Naga. Ribuan orang dari semua lapisan masyarakat mendukung kampanye dipelopori oleh ACAUT pada rapat umum pada 31 Oktober 2013 NSCN

²² Sachdeva, G. 2001. 'Second Generation Reforms in the Northeast', in North Eastern Council (ed.), Vision for the Northeastern Region in the New Millennium, Post Seminar Proceedings, North Eastern Council: Shillong.

kemudian menyatakan bahwa ACAUT tidak memiliki wewenang untuk 'mendikte masyarakat, dan sebagai kelompok revolusioner mandat NSCN memiliki 'hak pajak'.²³

Masalah internal berupa bentrokan antara kelompok pemberontak Naga telah menjadi subyek dari permainan bola politik dan tetap menjadi hambatan terbesar dalam membangun perdamaian di negara bagian. Ketika Pemerintah Pusat menegaskan bahwa bentrokan antara pemberontak kelompok pemberontak adalah hukum dan ketertiban masalah bagi Pemerintah negara, pemerintah negara selalu memainkan peran marjinal dalam memberikan kontribusi bagi proses perdamaian. Organisasi masyarakat sipil di Nagaland seperti Forum for Naga Rekonsiliasi, Naga Hoho dan banyak lainnya perempuan dan organisasi siswa telah memainkan peran penting dalam meletakkan dasar bagi munculnya perdamaian abadi di wilayah tersebut. Ini adalah aktor yang bekerja sebagai jembatan antara berbagai daerah yang terdiri Nagalim, di Nagaland, Arunachal Pradesh, Assam, Manipur dan bagian dari Myanmar; dan tanpa nuansa politis substansial. Mereka telah berhasil menjangkau masyarakat, baik Naga dan suku etnis lainnya, dan mempromosikan dialog dan pemahaman di tingkat masyarakat sipil antara peserta aspirasi masyarakat di wilayah tersebut, yang kelompok pemberontak politik terlibat dalam pembicaraan belum bisa dilakukan. Mereka telah bergabung upaya untuk berbicara dengan para pemimpin pemberontak untuk menghentikan pembunuhan perang saudara antara faksi pemberontak Naga dan pemerasan dan ancaman, dan untuk memasukkan lebih banyak perempuan dalam perundingan damai.²⁴

Kelompok pemberontak NSCN-K menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Pemerintah Myanmar pada tanggal 9 April 2012 Perjanjian otonomi yang diberikan kepada NSCN-K di tiga kabupaten di negara ini: Lahe, Leshi dan Nanyun, yang jatuh di Sagaing - wilayah administrasi utara-barat Myanmar, yang berbatasan dengan Nagaland dan Manipur ke utara. Hal ini juga menyediakan anggota NSCN-K dengan kebebasan untuk bergerak 'bersenjata' di seluruh negeri. Sementara pembicaraan antara Pemerintah India dan NSCN-IM telah dilakukan pada tanpa keberhasilan terlihat, proses negosiasi menerima sentakan lebih lanjut dengan pengunduran diri RS Panday pada 16 Desember 2013.

Sebuah solusi untuk masalah pemberontakan Naga tetap tidak pasti. Dengan lebih faksi datang ke kedepan, sehingga membuat jalan untuk lebih bentrokan, suara Naga pemberontak bersatu 'adalah tempat yang akan didengar'.²⁵

²³ Sharma, M. 2004. 'Critically Assessing Traditions: The Case of Meghalaya', Crisis States Programme Working Paper 52, London School of Economics: London. Hal: 78

²⁴ Ibid. hal: 80

²⁵ Ibid. hal: 92

3.1.3.2 Pemberontakan di Assam

Lima tahun setelah pemberontakan dimulai di wilayah Assam dengan pembentukan Front Persatuan Pembebasan Asom (ULFA) pada tahun 1979, militansi terus berkembang di wilayah tersebut. Namun, serangan kontra-pemberontakan Pemerintah dan upaya perdamaian telah terbayar dengan banyaknya korban gencatan senjata dari pihak kelompok militan sehingga mereka dapat memasuki tahap yang lebih “damai”. Hal ini dapat meredam gencatan senjata untuk sementara waktu tetapi ada hal-hal yang menjadi lebih sulit karena munculnya protes baru dalam faksi-faksi. Mereka menentang gencatan senjata dan perundingan damai yang dilakukan Pemerintah.

Dimulai dengan pembentukan Bodo Macan Pembebasan (BLT) pada tahun 1996, setelah melepaskan diri dari Relawan Angkatan Bodo (BVF) di bangun dari penandatanganan pertama Bodo Accord pada tahun 1993, banyak faksi yang memisahkan diri dari kelompok pemberontak telah datang. Ini biasanya diikuti Penundaan Operasi atau perjanjian Gencatan Senjata bahwa organisasi induknya telah mencapai dengan Pemerintah. Faksi sempalan utama termasuk sekarang aktif ULFA Independen yang dipimpin oleh Paresh Baruah dan Partai Nasional Demokrat Bodoland - Fraksi Songbijit (NDFB-S).

Selain dari kelompok sempalan, beberapa kelompok militan baru telah dibentuk baru-baru ini dengan tuntutan dan tujuan yang berbeda. Kekosongan yang diciptakan oleh kelompok pemberontak pada gencatan senjata dan perundingan damai juga diyakini telah membantu merek baru pemberontak untuk datang dan mengisi ruang-Maois tersebut. Partai Komunis India (Maois) bekerja di Assam di bawah nama terkemuka Komite Atas Assam (UALC). Pada 22 November 2013, Angkatan Bersenjata (Special Powers) Act (AFSPA) diperpanjang di Assam selama satu tahun dengan efek dari 4 Desember 2013, namun untuk pertama kalinya, Uni Kementerian Dalam Negeri dikutip kegiatan Maois di Negara sebagai salah satu alasan untuk memperpanjang UU ini.²⁶

Dengan ditandatanganinya perjanjian Suspensi Operasi antara faksi Ranjan Daimary dari NDFB dan Pusat dan Pemerintah Negara pada 12 September 2013, jumlah kelompok pemberontak di Assam berbicara perdamaian dengan pemerintah naik menjadi 13, 13 kelompok tersebut adalah: ULFA faksi pro-Bicara, NDFB-Progresif yang dipimpin oleh

²⁶ Ibid. hal 89

Govinda Basumatary, faksi Daimary NDFB-Ranjan, Karbi Longri Utara Cachar Hills Front Pembebasan (KLNLF), Kuki Tentara Revolusioner (KRA), Tentara Pertahanan Kukigram (UKDA), Konvensi Hmar Rakyat (D) (HPC-D), Tentara Pembebasan Kuki (KLA), Adivasi Cobra Militer Assam (ACMA), Birsa Commando Force (BCF), Santhal Tiger Force (STF), Semua Tentara Pembebasan Nasional Adivasi (AANLA) dan Tentara Adivasi Rakyat (APA). Di antara kelompok tersebut, Pemerintah telah menunjuk lawan hanya untuk dialog dengan faksi Pro-talk ULFA dan dua faksi dari NDFB.

Di sisi lain, menurut laporan pemerintah Assam disajikan di Majelis Negara pada 16 Desember 2013, enam kelompok militan baru muncul di Negara dalam dua tahun terakhir. Ini termasuk: Tentara Pembebasan Nasional Karbi (KNLA), Front Pembebasan Rakyat (UPLF), Dima Dalam Daogah-Action (DHD-A), Dima Jadi Naiso Army (DJNA), Front Pembebasan Nasional Bengali (NLFB) dan Front Pembebasan dimasa Kachari (UDKLF). Dua belas kelompok militan yang masih aktif di Assam, termasuk enam kelompok ini baru terbentuk, dan kelompok yang paling kejam di Negara adalah faksi Songbijit dari NDFB, yang memiliki 300 anggota dan Fraksi Paresh Baruah dari ULFA yang memiliki 240 kader. Kelompok-kelompok lain termasuk: Tiger Karbi Pembebasan Rakyat (KPLT) dengan 40 anggota, Organisasi Pembebasan Kamatapur (KLO) dengan sekitar 100 anggota, Muslim Macan Pembebasan Assam (MULTA) dengan 40 anggota, dan Assam Unit Harkat Ul Mujaheedin (HUM) dengan 40 anggota.

ULFA

ULFA, organisasi pemberontak besar pertama di Assam dibentuk perjalanan kembali pada 7 April 1979 oleh enam pemuda Assamese radikal pada pertemuan di Bait dari Rong Ghar, amfiteater terkenal dari royalti Ahom di distrik Sivasagar Assam timur, dengan tujuan untuk mendirikan sebuah "negara Assam sosialis" melalui perjuangan bersenjata. Organisasi beroperasi di latar belakang Assam agitasi populer yang dipimpin oleh All Assam Student United (AASU) terhadap masuknya ilegal dari Bangladesh. Agitasi AASU dipimpin berakhir dengan penandatanganan Assam Accord pada tahun 1985 dan selanjutnya Asom Gana Parishad (AGP) - partai politik regional yang dibentuk oleh pimpinan AASU yang penandatanganan Assam Accord-memenangkan pemilu untuk membentuk pemerintah di Assam.²⁷

Tahun-tahun berikutnya menyaksikan pengaruh ULFA di Negara mencapai perkembangan baru. ULFA mulai mengirimkan kader-kadernya untuk 'pelatihan militer

²⁷ Baruah, S. (2002). 'Gulliver's Troubles: The State and Militants in India', Economic and Political Weekly, 12 October, Mumbai. Hal 87

lanjutan di tangan Tentara Kachin Independence (KIA), an-Yangon anti kelompok pemberontak di Myanmar, dari tahun 1988 dan seterusnya. Pada tahun 1985, ULFA mendirikan rumah aman di Desa Damai di distrik Moulvi Bazaar di Bangladesh, berbatasan Meghalaya. Kekuatan militer kelompok ini diyakini telah meningkat sebagai hasil dari hubungan dengan Dewan Sosialis Nasional Nagaland-Isak-Muivah (NSCN-IM) yang membantu dalam mengamankan senjata dan memberikan pelatihan kepada para kader. Rincian pemerintahan di Assam menyebabkan deklarasi Peraturan Presiden di Negara dan dua operasi militer: Operasi Bajrang (antara 27 November 1990 dan 10 Juni 1991) dan Operasi Rhino (antara 15 September 1991 dan 13 Januari 1992). Serangan militer ditargetkan ke kelompok pemberontak dan fasilitas di dalam Assam, memaksa kepemimpinannya untuk mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh dan Bhutan.

ULFA kemudian dilindungi oleh Inter Services Intelligence (ISI) Pakistan dan Direktorat Jenderal Angkatan Intelligence (DGFI) dari Bangladesh. Kelompok pemberontak menerima pukulan besar pada tanggal 15 Desember 2003 ketika operasi militer Bhutan copot mereka dari kamp mereka di Bhutan. ULFA, bagaimanapun, berhasil bertahan hidup dan terus melancarkan serangan periodik di Assam, sebagian besar dari fasilitas di divisi Sagaing di Myanmar. Pada tahun 2009, ada laporan dari ULFA mendirikan basis di provinsi Yunnan China, yang didirikan oleh kelompok kepala kemudian militer Paresh Baruah.²⁸

Pada bulan November 2007, pergerakan batalyon tanggal 28 ULFA (unit mogok paling ampuh kelompok) terganggu di Arunachal Pradesh dan Nagaland - sebuah wilayah yang digunakan oleh ULFA untuk perjalanan antara Assam dan Myanmar. Pada tanggal 11 November, NSCN (IM) melakukan penyergapan pada ULFA laki-laki dalam perjalanan di distrik Mon Nagaland dan menewaskan dua kader ULFA menjaga dua orang lain sebagai sandera sehingga membatasi gerakan ULFA ini. Ini rupanya hasil menghangat hubungan ULFA ini dengan NSCN (K) - kelompok saingan NSCN (IM). Mitra ULFA sebelumnya di teror, yang NSCN (IM) menolak hak gerakan untuk ULFA kader melalui wilayah Naga. Namun, rute ULFA untuk Bangladesh melalui Garo Hills of Meghalaya tetap undisturbed.

Selama bagian awal 2007, ULFA membentuk aliansi strategis dengan kelompok-kelompok ekstremis kecil seperti KLNLF dan AANLA. Drive kekerasan yang dilakukan oleh KLNLF terhadap komunitas perdagangan berbahasa Hindi di distrik Karbi Anglong pada bulan Agustus 2007 didukung oleh ULFA dan, pada beberapa kesempatan kader ULFA

²⁸ Ibid. hal:56

terlibat langsung dalam serangan. Sekali lagi, dukungan ULFA untuk AANLA, sebelumnya kelompok pemberontak baru lahir dengan sekitar 50 kader, sebenarnya mengubahnya menjadi sebuah kelompok kekerasan dengan akses ke senjata canggih dan amunisi.

Pada tanggal 24 Juni 2008, Alfa dan Charlie perusahaan dari Myanmar berbasis batalyon 28 ULFA itu menyatakan gencatan senjata sepihak dan datang-tanah mencari penyelesaian yang dinegosiasikan untuk masalah mereka tiga dekade-tua. Mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan dengan ULFA dan mereka disebut sebagai 'Pro-talk ULFA'. Mereka juga menyerahkan permintaan kedaulatan atau kemerdekaan dan mengatakan bahwa mereka ingin bekerja untuk mencapai otonomi yang lebih besar untuk Assam.

Di Bangladesh, tindakan keras terhadap Kelompok militant India oleh Pemerintah League Awami membawa hasil yang bagus menjelang akhir 2009, dengan penangkapan pemimpin atas ULFA. Pada 6 November 2009, ULFA itu 'menteri luar negeri' Sashadhar Choudhury dan sekretaris keuangan 'Chitraban Hazarika diserahkan kepada pemerintah India. Dalam waktu satu bulan dari penangkapan ini, pada tanggal 4 Desember 2009, ULFA 'Ketua' Arabinda Rajkhowa dan 'Wakil komandan-in-chief' Raju Baruah diserahkan kepada pemerintah India. Penangkapan ini telah melemahkan kelompok pemberontak dan Paresih Baruah, ULFA itu 'Komandan-in-chief', tetap pemimpin puncak tunggal di kelompok pemberontak tersebut.

Pembicaraan damai Pemerintah Uni diusulkan dengan ULFA pada tanggal 1 Februari 2010 Tapi ketua ULFA Arabinda Rajkhowa menolak tawaran yang menyatakan bahwa tidak mungkin ada pembicaraan saat dalam tahanan. ULFA komandan-in-chief Paresih Baruah, juga, merespons menyatakan bahwa tidak ada pertanyaan pembicaraan tanpa masalah kedaulatan dalam agenda. Pemerintah, bagaimanapun, membebaskan empat pemimpin-Raju ULFA terkemuka Baruah, Pranati Deka, Bhimkanta Buragohain dan Pradip Gogoi-pada tahun yang sama. Pemerintah memfasilitasi proses pembicaraan damai dengan melepaskan ketua ULFA Arabinda Rajkhowa (1 Januari 2011) dan ULFA 'menteri luar negeri' Shashadhar Choudhury (11 Januari 2011) memutuskan untuk tidak menentang aplikasi jaminan mereka.²⁹

Tidak diragukan lagi, kapasitas ULFA ini telah berkurang untuk sebagian besar, namun unsur yang masih hidup terus mempertahankan niat kekerasan. Pada tanggal 30 Juli 2010 ULFA memicu ledakan ranjau darat di Bhalukdubi di distrik Goalpara, menewaskan

²⁹ Ibid. hal: 76

lima Central Reservasi Kepolisian (CRPF) polisi dan melukai 40 lainnya. Pada bulan April 2010 kelompok pemberontak melancarkan pemerasan berkendaraan di bawah 'komandan' dari ULFA itu 'batalyon 709', Hira Sarania dari Guwahati dan disajikan pemberitahuan pemerasan di Assam. Menjelang akhir tahun 2010, kelompok garis keras ULFA bawah Paresh Baruah mulai drive perekrutan baru untuk membantu kekuatan kelompok pemberontak yang hilang. Namun, mereka gagal merekrut sejumlah besar pemuda. Sementara pada tahun 2011, kelompok garis keras ULFA bertanggung jawab atas empat ledakan bom di Negara, selama 2012 itu terlibat dalam 19 pembunuhan di 16 insiden kekerasan. Kelompok ini merupakan bagian dari Northeast United Front (NUF) dan melaksanakan kegiatannya bekerjasama dengan kelompok militan seperti Tentara Pembebasan Nasional Garo (GNLA). Sekarang dilaporkan telah mengamankan dukungan dari Cina.

Terjadi perpecahan dalam ULFA setelah penangkapan semua pemimpin puncak, pembatasan Paresh Baruah, diresmikan dengan Paresh Baruah mengusir ketua kelompok militan ini, Arabinda Rajkhowa, yang memimpin kelompok pro-perundingan. Paresh Baruah ditinggikan ketua bertindak Abhijeet Barman ('Asom') sebagai kepala baru dari kelompok militan. Dengan demikian, pada 23 November 2011, faksi anti-talk dari ULFA (ULFA Independen) mengumumkan 'komite sentral baru 16-anggota, dengan Abhijeet Barman sebagai' di-charge ketua '; Paresh Baruah sebagai 'komandan-in-chief' dan 'wakil presiden'; dan 'kolonel' Jiban Moran sebagai 'asisten sekretaris jenderal' dan 'di-charge keuangan sekretaris'.³⁰

Bodos

Dengan aspirasi untuk membentuk sebuah negara merdeka, suku Bodos, suku terbesar dataran suku di Assam, memulai gerakan Bodoland pada 2 Maret 1987 di bawah kepemimpinan Upendranath Brahma All Bodo Mahasiswa Union (ABSU). Selain ABSU, organisasi lain yang telah memimpin gerakan Bodo adalah Plains Tribal Council of Assam (PTCA). Bodo Komite Aksi Rakyat (BPAC) diciptakan untuk menjadi ujung tombak gerakan dengan slogan "membagi Assam 50-50".³¹

Bersamaan dengan itu, gerakan kekerasan dimulai untuk "Boroland ALLAH" dan "penentuan nasib sendiri dari Bodos". Pada tanggal 3 Oktober 1986, kelompok militan bernama Bodo Pasukan Keamanan (BdSF), di bawah kepemimpinan Ranjan Daimary, dibentuk yang dinamai kembali dirinya sebagai Front Nasional Demokratik Bodoland

³⁰ Ibid. hal: 65

³¹ Ibid. hal: 75

(NDFB) pada tanggal 25 November 1994 kelompok bersenjata di ABSU ini, Bodo Relawan Force (BVF), juga melancarkan gerakan kekerasan sampai 20 Februari 1993 ketika Bodo Accord telah ditandatangani antara ABSU dan Pemerintah Assam. Namun, alih-alih membawa perdamaian ke daerah bermasalah, bentrokan sengit perang saudara antara Bodos diikuti Accord. Sebuah bagian dari BVF menolak Accord dan membentuk Bodo Macan Pembebasan (BLT) tahun 1996 BLT terlibat dalam beberapa tindakan kekerasan, terutama di distrik barat dan utara Assam, khususnya Bodo jantung dari Kokrajhar. Kegiatan-kegiatan tersebut dari BLT yang diakhiri dengan perjanjian gencatan senjata dari 29 Maret 2000. Negosiasi antara pemerintah dan militan memuncak dalam penciptaan Bodoland Territorial Council (BTC) pada bulan Desember 2003. Pada bulan Oktober 2004, NDFB mengumumkan gencatan senjata sepihak. Perjanjian gencatan senjata resmi antara NDFB dan Pemerintah telah ditandatangani pada 25 Mei 2005.³²

Negara menyaksikan pembersihan etnis besar-besaran pada bulan Juli 2008. Sedikitnya 49 orang tewas dan lebih dari 100.000 orang meninggalkan rumah mereka dalam kekerasan antara anggota suku Bodo dan pemukim pendatang Muslim di distrik utara Udalguri dan Darrang. Dalam pembalasan, umat Islam juga menyerang Bodos. Pemerintah menyalahkan NDFB sebagai instrumental dalam memicu kekerasan. Bentrokan yang terbaru dalam konflik panjang-mendidih antara masyarakat adat di Assam, baik Hindu dan Kristen, dan para imigran Muslim. Penduduk setempat yang ditargetkan pemukim Muslim di masa lalu juga karena takut sedang dibanjiri oleh mereka. Pada bulan Februari 1983, lebih dari 2.100 orang, sebagian besar imigran Bangladesh tewas dalam bentrokan dengan suku di Nellie, di Nagaon-Morigaon daerah pusat Assam.

Meskipun tahun kekerasan, tidak ada yang pernah melihat sesuatu seperti sembilan ledakan terkoordinasi yang menewaskan 100 orang dan melukai lebih dari 545 di empat kota - Guwahati, Barpeta, Bongaingaon dan Kokrajhar pada 30 Oktober 2008 - sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa baik-bersenjata, lebih baik militan -trained telah ikut bergabung. Pada 25 Mei 2009, biaya CBI sheeted 19 anggota NDFB, termasuk Ranjan Daimary. Penyelidikan berikutnya mengungkapkan bahwa faksi NDFB anti-talk yang dipimpin oleh Ranjan Daimary terlibat dalam ledakan. Setelah 30 Oktober ledakan serial, Pemerintah Assam menyatakan "toleransi nol" kebijakan terhadap militansi di Negara. Assam Pencegahan Penahanan (Amandemen) Undang-Undang 2009 disahkan oleh DPR

³² Ibid. hal: 87

Assam pada tanggal 10 Januari 2009 Undang-undang mengangkat jangka waktu maksimum penahanan preventif tersangka teroris dari enam bulan sampai dua tahun.

Perbedaan internal dalam NDFB melebar setelah pengusiran presiden pendirinya, Ranjan Daimary, alias DR Nabla, menyusul tuduhan keterlibatannya dalam 30 Oktober serangkaian ledakan. Pada tanggal 15 Desember 2008, NDFB diganti Ranjan Daimary, dengan B. Sungthagra alias Dhiren Boro, sebagai presiden baru pada pertemuan yang diadakan di Kokrajhar. Beberapa hari kemudian, Daimary diusir dari grup. NDFB pecah menjadi dua faksi-faksi pro-talk yang dipimpin oleh Dhiren Boro dan faksi garis keras lain yang dipimpin oleh Ranjan Daimary yang mengaku mewakili 'nyata' NDFB.³³ Faksi anti-talk dari NDFB menerima pukulan besar ketika pemimpinnya Ranjan Daimari ditangkap di Bangladesh dan kemudian diserahkan kepada pemerintah India pada tanggal 1 Mei 2010. Selama interogasi, ia mengaku bahwa 30 Oktober ledakan berantai di Assam dilakukan di bawahnya instruksi express. Dia juga mengatakan bahwa dia siap untuk melakukan pembicaraan damai dan akan mampu membuat komandan dan kader-kadernya menyerah jika New Delhi sangat ingin untuk negosiasi.

Namun faksi anti-talk dari NDFB dilakukan pada kegiatan kekerasan tersebut. Pada tanggal 8 Juli 2010, kelompok ini memicu ledakan kuat yang melemparkan lokomotif dan dua pelatib dari Kolkata terikat Garib Rath Express dari trek, menewaskan seorang bocah enam tahun dan melukai 23 lainnya di Gossaigaon di distrik Kokrajhar. Pada 26 Juli 2010, itu menewaskan empat jawans dari Sashastra Seema Bal dan melukai dua lainnya dalam serangan di Amlaiguri di distrik Chirang berbatasan Bhutan. Fraksi kemudian melakukan serangan kekerasan antara 8 dan 10 November 2010, menewaskan 23 orang di 11 serangan terpisah di lima Bodo didominasi distrik Assam. Pembunuhan berada di pembalasan terhadap pembunuhan seorang NDFB anti-talk faksi kader pada tanggal 8 November 2010 oleh 51 Gorkha Resimen Angkatan Darat India. Sebelumnya, pada tanggal 1 November 2010, faksi anti-talk telah mengeluarkan peringatan kepada Pemerintah Negara itu jika ada kader NDFB dibunuh oleh tentara India dalam pertemuan palsu, sayap bersenjata NDFB akan mengambil tindakan terhadap 'India'.

Faksi anti-talk dari NDFB menderita pukulan besar lainnya pada bulan Desember 2010 ketika pasukan keamanan menangkap wakil komandan-in-chief B Jwangkhang alias George Boro di Aizawl, Mizoram.³⁴ Dia adalah salah satu kunci terdakwa dalam 30 Oktober 2008 ledakan bom berantai di Assam dan sekarang dalam tahanan pengadilan. Pada Januari

³³ Ibid. hal: 72

³⁴ Ibid. hal: 83

2011, fraksi menyatakan gencatan senjata sepihak dengan Pemerintah India dalam menanggapi panggilan pemerintah untuk negosiasi. Sementara itu, pada tanggal 4 Februari 2011 ini, ABSU dihidupkan kembali gerakan untuk negara Bodoland terpisah.

Antara 20 Juli dan 18 September 2012, Assam menyaksikan bentrokan berdarah di Bodoland Territorial Council (BTC) area di Assam bagian barat, antara Bodos dan imigran Muslim. Kekerasan menewaskan sedikitnya 109 tewas sementara 5.000 rumah dibakar di 244 desa. Sama seperti normal tampaknya dikembalikan, putaran kekerasan dimulai pada 10 November 2012, yang menewaskan 11 orang tewas dan enam luka-luka dalam sembilan insiden di distrik Kokrajhar dan Baksa. Kebakaran kedua, pada kenyataannya, terjadi sebagai akibat dari upaya oleh beberapa orang pengungsi untuk kembali ke rumah mereka pada saat panen.³⁵

Pada tanggal 1 Agustus 2011, faksi NDFB-R mengumumkan gencatan senjata sepihak, tapi operasi kontra-pemberontakan terhadap pemberontak terus karena keterlibatannya dalam beberapa insiden berikutnya kekerasan. NDFB-R menuju perpecahan sebagai IK Songbijit, para 'kepala' dari Bodoland Army (sayap bersenjata faksi), mengumumkan pembentukan sembilan anggota "dewan nasional interim" pada 20 November 2012, dengan Songbijit sebagai diri-proclaimed "presiden sementara". Myanmar berbasis IK Songbijit, yang benar-benar adalah Karbi suku, membatalkan gencatan senjata sepihak pada tanggal 8 Agustus 2012 dan telah muncul sebagai kelompok yang paling mematikan. Ranjan Daimary dibebaskan dari penjara dengan jaminan Juni 2013 untuk mempercepat pembicaraan yang diusulkan antara NDFB dan Pemerintah India. Pada 29 November 2013, faksi Ranjan Daimary dari NDFB dan Pemerintah India menandatangani perjanjian gencatan senjata resmi sehingga membuka jalan untuk pembicaraan damai.

Lainnya

Selain ULFA dan pemberontakan Bodo, Assam telah dipengaruhi oleh gerakan pemberontak yang diprakarsai oleh Karbi dan Dimas suku, yang Adivasis dan juga Islam. Karbi dan Dimasas menuntut otonomi bagi tanah air mereka sedangkan Adivasis menuntut pengakuan yang lebih besar dari hak-hak mereka. Namun, pemerintah telah mampu membawa kelompok ini ke meja perundingan.

Solidaritas Demokrasi Rakyat Bersatu (UPDS) dibentuk pada Maret 1999 dengan merger dari dua kelompok pemberontak Karbi Relawan Nasional (Qdmc`g) dan Karbi Front

³⁵ Ibid: hal 92

Rakyat (KPF). Karbi kelompok pemberontak Karbi Longri Utara Cachar Hills Front Pembebasan (KLNLF) adalah faksi yang memisahkan diri dari UPDS dan itu dibentuk pada 2004 Perpecahan dipicu oleh kesepakatan gencatan senjata antara UPDS dan pemerintah Uni pada tahun 2002 Pada 25 November 2011, Pusat dan Pemerintah Assam menandatangani kesepakatan dengan UPDS. Sementara itu, KPLT (Karbi Rakyat Macan Pembebasan) dibentuk pada 8 Januari 2011, dengan faksi anti-talk dari KLNLF dengan tujuan mengukir negara Otonom Karbi dari Assam. Setelah perjanjian tripartit dan menyerahkan selanjutnya oleh UPDS, dan penandatanganan penghentian operasional (Soo) perjanjian dengan KLNLF, KPLT tetap agen utama kekerasan di distrik Karbi Anglong Assam.³⁶

Di distrik Utara Cachar Hills, Dima Dalam Daogah (DHD) dibentuk pada tanggal 1 Januari 1995, menyusul penyerahan secara massal dari Pasukan Keamanan Nasional dimasa (DNSF) pada bulan November 1994 Setelah DHD menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah pada 1 Januari 2003, presiden mantan nya Jewel Garlossa membentuk faksi pecahan 'Black Widows', juga dikenal sebagai DHD (J) dan melepaskan teror di kabupaten tersebut. Dua faksi dari DHD, asli dipimpin oleh Dilip Nunisa (DHD) dan DHD (J), menjadi aktif. Ada peningkatan jumlah kegiatan militan, pembunuhan, penculikan, pemerasan, dll di wilayah tersebut. Ini telah melemparkan kunci pas dalam semua pekerjaan pembangunan di daerah bukit, termasuk bekerja pada proyek East West Corridor dari National Highway Authority of India (NHAI) dan proyek konversi mengukur kereta api. Namun, penangkapan Pemimpin Jewel Garlossa bersama dengan dua rekannya di Bangalore pada 4 Juni 2009 mengubah skenario pemberontakan di kabupaten. Segera setelah penangkapannya, para militan mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan pemerintah negara bagian. Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2009, 382 kader DHD-J meletakkan senjata mereka di depan pihak berwenang di Haflong, markas distrik NC Hills.³⁷

Pada bulan November 2009, Badan Nasional Investigasi (NIA), yang menyelidiki dugaan penyimpangan dana Utara Cachar Hills Otonomi Dewan ke DHD-J, biaya-sheeted kelompok ini 'kepala' Jewel Garlossa dan 'komandan-in-chief' Niranjan Hojai. Pada 16 Agustus 2011 kedua pemimpin dibebaskan dari penjara oleh perintah interim untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai formal. Selanjutnya, kesepakatan damai atau Memorandum of Settlement (MOS) telah ditandatangani antara DHD dan DHD (J) dan

³⁶ Bhawmik, S.K. (2002). 'Emerging Employment and Unemployment Scenarios in West Bengal: Implications for Policy', *Journal of Indian School of Political Economy*, July-September.

³⁷ Hindustan Times www.hindustantimes.com/rssfeed/Guwahati/NEI-Centre-peace-talks-tobegintoday/Article1-660389.aspx. Diakses 25 Februari 2013

Pemerintah Pusat dan Negara pada 8 Oktober 2012 di New Delhi untuk penciptaan Dima Hasao Territorial Council (DHTC).

Lima kelompok pemberontak dari Adivasi komunitas-Adivasi Cobra Force (ACF), Birsa Commando Force, Santhal Tiger Force, Army Adivasi Rakyat dan Tentara Pembebasan Nasional Adivasi juga dalam gencatan senjata dengan pemerintah dan menuntut hibah status Dijadwalkan Tribe (ST) ke Negara suku teh.

Penyebaran Naxalism ke Assam telah menambahkan dimensi keamanan baru di Negara yang sudah stabil. Penangkapan beberapa CPI (Maois) pemimpin tertinggi dari berbagai bagian Assam telah mengungkapkan bahwa Maois telah aktif di Negara sejak tahun sembilan puluhan. Fakta bahwa kegiatan Maois telah diambil serius oleh pihak keamanan telah ditunjukkan oleh fakta bahwa pemerintah Assam telah mengirimkan proposal kepada Pusat Mei 2013 untuk menyatakan sembilan kabupaten di Negara sebagai kabupaten yang terkena dampak Kiri sayap Ekstrimisme. Bandara sembilan kabupaten adalah: Tinsukia, Dibrugarh, Dhemaji, Lakhimpur, Golaghat, Sivasagar, Goalpara, Cachar dan Karimganj. Namun Pemerintah India mengatakan bahwa Maois berada dalam 'fase laten' di Assam, dan belum terlibat dalam kekerasan yang cukup, dan, karena itu, tidak tertarik dalam menyatakan sembilan kabupaten sebagai immediatey Maois yang terkena dampak. Pada bulan Februari 2014, Menteri Kepala Assam mengatakan bahwa Maois, selain memiliki perhubungan yang jelas dengan kelompok-kelompok pemberontak di Utara-timur seperti Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) dari Manipur, ULFA (Independen), dan NSCN (IM) , juga telah menjalin hubungan dengan Pakistan Inter Services Intelligence (ISI) serta 'elemen Jihadi.'

Antara 1992 dan Februari 2014, kematian terkait pemberontakan yang dilaporkan di Assam adalah 7840. Dari ini, 4.079 adalah warga sipil, 818 adalah kekuatan personel keamanan dan 2.943 tewas dalam kekerasan teroris. Di sisi lain, jumlah militan yang tewas di Assam pada periode yang sama adalah 2.943.³⁸

ULFA

Upaya membangun perdamaian di Assam telah dilakukan baik di pemerintah dan tingkat masyarakat sipil. Dimulai dengan akhir 1980-an, pemerintah berusaha untuk menjalin hubungan dengan ULFA melalui perantara. Pada tahun 1992, pemerintah bahkan membebaskan beberapa pemimpin ULFA ditangkap termasuk sekretaris umum Anup Chetia

³⁸ Baruah, S. (2005). *Durable Disorder: Understanding the Politics of northeast India*, Oxford University Press: New Delhi.

untuk memulai proses perdamaian. Chetia, bagaimanapun, melompat jaminan dan bergerak di bawah tanah. Kelompok pemberontak, sampai awal tahun 2001, mempertahankan berdiri bahwa pembicaraan damai dengan pemerintah hanya mungkin setelah tiga kondisi: pembicaraan harus di luar India, di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bahwa dialog harus pusat sekitar permintaan inti kedaulatan Assam. Ini tidak bisa diterima kepada Pemerintah. Pada tahun 2005, bagaimanapun, ULFA telah memberikan dua kondisi ini dan menuntut agar perundingan harus membahas masalah kedaulatan Assam.

Pada tanggal 8 September 2005, ULFA membentuk Consultative Group Rakyat (PCG), yang terdiri dari 11 mengangkat tangan orang-orang dari berbagai lapisan masyarakat untuk menyiapkan tanah-kerja untuk inisiasi mengakhiri pembicaraan dengan Pemerintah Union. PCG mengadakan tiga putaran dialog dengan pemerintah selama satu tahun di mana pemerintah mengumumkan enam minggu gencatan senjata panjang dengan kelompok pemberontak. Namun, proses ini runtuh pada tanggal 26 September 2006 dengan gencatan senjata yang dibatalkan oleh pemerintah karena kedua belah pihak menolak untuk menyimpang dari posisi mereka-ULFA menginginkan pembebasan atas lima pemimpinnya yang ditahan dan pemerintah bersikeras pada komunikasi tertulis karena kelompok tersebut memang tertarik berbicara mengenai perdamaian. Sementara itu, ULFA telah mengkonsolidasikan posisinya dan melanjutkan kegiatannya.³⁹

Sementara kelompok masyarakat sipil di Negara termasuk organisasi siswa seperti AASU, Assam Jatiyatabadi Yuba Chhatra Parishad (AJYCP), organisasi sastra termasuk Assam Sahitya Sabha (ASS) harus secara berkala berusaha untuk terlibat dalam proses perdamaian, sikap bandel ULFA memiliki masalah yang dibuat. Demikian pula, upaya oleh individu termasuk penyanyi Bhupen Hazarika belum diterima kelompok pemberontak. Organisasi publik seperti PU Assam (APW) telah banyak dilihat sebagai pro-pemerintah dan kegiatan mereka telah dibatasi untuk menciptakan kesadaran publik terhadap kekerasan ULFA. Di sisi lain, ULFA disangga tubuh seperti PCG dan PCIPIA yang (Komite Rakyat untuk Inisiatif Perdamaian di Assam adalah kelompok payung dari 27 hak asasi manusia Assamese dan kelompok aksi), juga belum benar-benar diterima kepada pemerintah untuk pro- ULFA outlook. Kontribusi organisasi berbasis masyarakat dalam membawa Bodo pemberontakan berakhir, di sisi lain, telah lebih berhasil. All Bodo Mahasiswa Union (ABSU), Bodo Sahitya Sabha (BSS) dan Bodo Komite Aksi Rakyat (BPAC) telah memainkan peran penting dalam membawa kedua BLT dan NDFB ke meja perundingan.

³⁹ Ibid. hal: 70

Pada 24 Juni 2008 Alfa dan Charlie perusahaan dari ULFA mengumumkan gencatan senjata, memicu harapan bahwa upaya perdamaian di negara bagian akan memperoleh momentum. Para pemimpin faksi pro-talk dari ULFA, seperti yang sekarang disebut, bertemu dengan kaum intelektual dan mahasiswa lembaga negara untuk memetakan peta jalan untuk mengantar perdamaian di Assam. Mereka juga mengadakan beberapa pertemuan di berbagai tempat untuk memahami perasaan umum di kalangan rakyat biasa dan melibatkan mereka dalam proses perdamaian. Mereka mengajukan piagam tuntutan kepada Perdana Menteri pada Februari 2009 menuntut 'otonomi penuh' ke Assam dalam kerangka Konstitusi. Piagam tersebut mengatakan bahwa otonomi penuh kepada negara dapat menjadi satu-satunya solusi untuk 'Assam-India konflik' karena akan menghapus rasa takut dan ketidakamanan dari pikiran orang-orang pribumi dan memberikan perlindungan terhadap tanah, bahasa, ekonomi dan hak self-determination.

Namun, dengan penangkapan pemimpin ULFA, harapan baru muncul untuk menemukan solusi damai untuk masalah ini. Pemerintah menunjukkan minat dalam mengadakan pembicaraan dengan kelompok pemberontak, dengan atau tanpa kehadiran ULFA 'komandan-in-chief' Paresh Baruah.⁴⁰

Sementara itu, sekelompok warga terkemuka dari negara, yang dipimpin oleh Dr terkemuka intelektual Hiren Gohain, membentuk Negara Tingkat Konvensi, 'Sanmilita Jatiya Abhivartan' pada bulan April 2010, dalam rangka untuk memulihkan perdamaian antara pemberontak dan pemerintah dan memfasilitasi lingkungan untuk pembicaraan perdamaian yang efektif antara keduanya. Konvensi dipanggil kedua New Delhi dan ULFA untuk maju ke depan untuk meja perundingan tanpa prasyarat (dan tanpa penundaan). Dalam rancangan resolusi, konvensi menyerukan kepada pemerintah untuk membuka jalan bagi ayat-ayat gratis untuk para pemimpin ULFA yang dipenjara karena konsultasi sebelum pembicaraan dengan New Delhi.

Tapi respon yang konvensi yang diterima dari Paresh Barua tidak menguntungkan. Dalam pernyataan yang cepat e-mail kepada media, ULFA 'komandan-in-chief' tidak hanya mengkritik konvensi untuk inisiatif, tetapi juga menyatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang 'gerakan kemerdekaan' dari ULFA. Ia juga menegaskan bahwa tidak akan ada pembicaraan tanpa masalah 'kedaulatan' sedang dibahas.

⁴⁰ Government of India (1997). Executive Summary of the Report of the High Level Commission on Tackling Backlogs in Basic Minimum Services and Infrastructural Needs in the northeast Region, Planning Commission, National Committee on the Development of Backward Areas: New Delhi.

Tanggal 26 Mei 2010, Assam Negara Kabinet memutuskan untuk memulai proses pembicaraan dengan ULFA tanpa Paresh Baruah. Namun, Pemerintah juga menjelaskan bahwa operasi anti-pemberontakan terhadap mereka yang mencoba untuk melakukan kekerasan akan terus berlanjut. Para anggota dewan yang tersedia umum ULFA bertemu pada 28 Mei 2010 di Guwahati Central Jail untuk mengambil keputusan mengenai pembicaraan damai dengan pemerintah. Namun, mereka memutuskan bahwa itu tidak tepat untuk memulai pembicaraan tanpa komandan-in-chief Paresh Barua nya. Para pemimpin ULFA juga menjelaskan bahwa hanya pembebasan para pemimpin komite sentral kelompok pemberontak akan memfasilitasi pembuatan kebijakan tubuh ULFA untuk mengambil keputusan penting. Pada tanggal 30 Mei 2010, Kepala Menteri Assam, Tarun Gogoi meminta ULFA untuk secara resmi memberitahukan keputusan pemerintah pada pembukaan pembicaraan damai. Ia mengatakan kelompok pemberontak harus memberitahu pemerintah apa yang mereka inginkan dan pemerintah akan membahas usulan mereka secara rinci dan melakukan apa pun yang mungkin untuk mendapatkan proses pembicaraan berjalan.

Pada tanggal 22 Juni 2010, delegasi enam anggota Sanmilita Jatiya Abhivartan (SJA), yang bertujuan untuk memfasilitasi perundingan damai antara Pusat dan ULFA, bertemu dengan Perdana Menteri Manmohan Singh dan memintanya untuk menghidupkan kembali pembicaraan damai antara Pemerintah dan ULFA. Delegasi tersebut juga membahas kemungkinan pelepasan dipenjara pemimpin ULFA untuk meningkatkan pembicaraan damai. Namun pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak akan melepaskan para pemimpin dipenjarakan. Para anggota konvensi lagi bertemu dengan Perdana Menteri, Ketua UPA Sonia Gandhi dan Menteri Dalam Negeri P. Chidambaram pada 21-26 Juli 2010 dan mendesak mereka untuk mempercepat proses untuk memulai proses perdamaian.⁴¹

Pada tanggal 15 Juli 2010 Pusat menunjuk Bapak PC Haldar, mantan Direktur (IB), sebagai lawan untuk mengambil ke depan proses memulai perdamaian dengan ULFA. Ia juga bicara untuk melakukan pembicaraan dengan NDFB, dan sebelumnya dengan DHD (J) dan UPDS. Ia bertemu dengan para pemimpin ULFA di Guwahati Central Jail pada tanggal 23 Juli 2010 dan mengatakan bahwa ia 'puas' dengan pembicaraan dan berharap bahwa proses perdamaian akan dimulai segera.

Pada tanggal 7 Mei 2011, SJA secara resmi menyerahkan piagam tuntutan kepada pimpinan ULFA untuk dipertimbangkan. Pada tanggal 12 Juli faksi pro-talk dari ULFA dinyatakan unilateral dan terbatas gencatan senjata dengan Pemerintah. Mendeklarasikan

⁴¹ Government of India (1981). Report on Development of Northeastern Region, Planning Commission, National Committee on the Development of Backward Areas: New Delhi.

gencatan senjata, ketua kelompok pemberontak ini, Arabinda Rajkhowa mengatakan bahwa dalam kepentingan menciptakan suasana yang menyenangkan untuk pembicaraan, ULFA telah menyatakan gencatan senjata sepihak. Dia mengatakan bahwa gencatan senjata itu sesuai dengan resolusi yang diadopsi di Dewan Umum ke-5 ULFA diselenggarakan pada 22 Februari 2011.

Pada 5 Agustus 2011, ULFA diserahkan piagam tuntutan ke Union Menteri Dalam Negeri, P. Chidambaram dan Menteri Besar Assam, Tarun Gogoi di New Delhi. Piagam, yang mereka sebut 'Kerangka Piagam Negosiasi mengatasi Isu antara Assam dan India, telah disampaikan oleh delegasi tujuh anggota ULFA, yang dipimpin oleh ketuanya Arabinda Rajkhowa. 12 kelompok luas di mana negosiasi diusulkan untuk memulai adalah:

- (A) Alasan untuk perjuangan ULFA dan keaslian mereka.
- (B) Laporan Status mengenai hilangnya pemimpin ULFA dan kader
- (C) pengaturan Konstitusi dan Politik dan Reformasi-termasuk perlindungan sumber daya identitas dan material dari penduduk pribumi lokal Assam.
- (D) Keuangan dan Pengaturan Ekonomi, termasuk penyelesaian semua royalti atas tambang / mineral termasuk minyak secara retrospektif kompensasi dan hak penggunaan independen untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan di masa mendatang.
- (E) Efek illegal migrasi / dampak dan diperlukan solusi termasuk penyegelan perbatasan internasional, patroli sungai, pengembangan kekuatan asli manusia perbatasan.
- (F) Masalah etnis dan restrukturisasi konstitusional termasuk penyelesaian sengketa perbatasan dan penghapusan perambahan.
- (G) Pendidikan dan Kesehatan-reformasi yang diperlukan untuk melestarikan identitas masyarakat Assam dan manfaat.
- (H) Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.
- (I) Tanah dan sumber daya-termasuk hak penduduk asli atas tanah, pengendalian banjir dan pengelolaan alam.
- (J) Pertumbuhan-Pengembangan Industri infrastruktur, penghapusan transportasi bottleneck, pengembangan keterampilan kewirausahaan dan efisiensi tenaga kerja, ketersediaan kredit, infus modal-yang mengarah ke industri lepas landas dan hak untuk terlibat dalam hubungan khusus dengan negara-negara asing untuk promosi perdagangan bersama, perdagangan dan hubungan budaya.
- (K) Restorasi, perlindungan, pelestarian dan penyebaran budaya asli Assam dalam semua ragam.

(L) Amnesty, re-integrasi dan rehabilitasi anggota ULFA dan orang-orang yang terkena dampak.⁴²

Pada 3 September 2011, kesepakatan tripartit untuk suspensi operasi (Soo) ditandatangani antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Assam dan ULFA di New Delhi. Pada tanggal 25 Oktober 2011, putaran resmi pertama dialog politik antara ULFA dan Pemerintah berlangsung di New Delhi. Pembicaraan diadakan berdasarkan piagam tuntutan yang diajukan oleh kelompok pemberontak.

Pemerintah Negara India, dalam rangka memfasilitasi pembicaraan damai dengan ULFA, telah sepakat memenuhi permohonan jaminan untuk para pemimpin ULFA dipenjara. Hal ini telah membuka jalan bagi pembebasan mereka dan sekarang semua pemimpin atas ULFA berada di luar penjara. Ini termasuk, ketua Arabinda Rajkhowa, wakil ketua Pradip Gogoi, kepala publisitas Mithinga Daimary, wakil komandan-in-chief Raju Baruah, sekretaris keuangan Chitraban Hazarika, menteri luar negeri Sasadhar Choudhury, sekretaris budaya Pranati Deka, dan ideolog politik Bhimkanta Buragohain (diberikan jaminan pada Desember 2010, meninggal pada Desember 2011). Ada juga kemungkinan Sekjen ULFA Anup Chetia diekstradisi ke India dari Bangladesh untuk membantunya mengambil bagian dalam pembicaraan damai yang diusulkan.

Sebuah celah dalam ULFA menjadi terlihat ketika ULFA mengirimkan pesan menyatakan kelanjutan dari perjuangannya untuk Assam berdaulat. Pesan itu disertai dengan foto Paresh Barua dan kader bersenjata ULFA seragam pertempuran. Untuk pertama kalinya sejak pembentukannya, ULFA juga mengirimkan rekaman video yang menunjukkan Paresh Barua dan kader ULFA. Video ditampilkan kader ULFA memberikan slogan-slogan menentang pembicaraan damai dan bersumpah untuk berjuang untuk Assam berdaulat. Foto ini dikirim pada 20 Januari 2011 dan video pada tanggal 21 Januari 2011 ULFA resmi berpisah pada November 2011 dan kelompok garis keras yang dipimpin oleh Paresh Barua kemudian dikenal sebagai ULFA Independen.

Pada 5 Agustus 2011, para pemimpin ULFA atas bertemu Menteri Dalam Negeri P. Chidambaram dan disajikan kelompok piagam tuntutan', pengaturan bola menggelinding untuk pembicaraan damai dengan pemerintah. Tuntutan meliputi, pengaturan Konstitusi dan

⁴² Hassan, M.S. (2006). 'Explaining Manipur's Breakdown and Mizoram's Peace: The State and Identities in Northeast India', Crisis States Programme Working Paper 79, London School of Economics: London.

politik dan reformasi, perlindungan identitas dan sumber daya material dari penduduk pribumi dari Assam.⁴³

Bodo Tribes

Proses perdamaian mengenai gerakan pemberontakan suku Bodo bisa benar-benar ditelusuri kembali ke awal 1990-an. Gerakan Bodo yang dimulai Maret 1987 untuk menciptakan sebuah negara merdeka dari Bodoland memuncak dalam bipartit Bodo Accord ditandatangani oleh Pemerintah Assam dan perwakilan ABSU dan BPAC pada 20 Februari 1993 membuka jalan bagi penciptaan Dewan Otonomi Bodoland (BAC). Ini pertama Bodo Accord dicapai dengan tujuan untuk memberikan otonomi maksimal kepada Bodos untuk kemajuan sosial, ekonomi, pendidikan, etnis dan budaya dalam kerangka Konstitusi India.⁴⁴

Namun, BAC menjadi percobaan gagal sebagai wilayahnya tidak sepenuhnya dibatasi, meninggalkan ruang untuk semua jenis kebingungan dan kebencian di antara kelompok-kelompok Bodo, pemimpin mereka dan orang-orang Bodo. ABSU, di bawahnya presiden Swambla Basumatary, ditolak dan mengecam Bodo Accord dan menghidupkan kembali permintaan untuk pembentukan sebuah negara terpisah dari Bodoland untuk diukir dari Assam, dan mengajukan memorandum kepada Perdana Menteri PV Narasimha Rao pada 19 Maret 1996 Swambla Basumatary dibunuh oleh militan NDFB pada 30 Juli 1996 BLT dibentuk pada 18 Juni 1996 melancarkan gerakan bersenjata untuk kenegaraan.

Pembicaraan informal antara Pemerintah dan BLT mantan dimulai pada tahun 1999 dan penghentian permusuhan formal dideklarasikan pada 15 Maret 2000 BLT menandatangani kedua Bodo perjanjian perdamaian dengan Pusat dan Pemerintah Negara pada 10 Februari 2003 yang mengarah pada pembentukan BTC (Bodoland Dewan Teritorial) di bawah diubah ketentuan Jadwal Keenam. Pada tanggal 6 Desember 2003, sebanyak 2.630 kader BLT meletakkan senjata. Komite yang mantan Koordinasi Gerakan Bodoland (CCBM) ABSU dan, yang dipelopori gerakan kenegaraan yang dihidupkan kembali secara demokratis, yang absen pada saat penandatanganan Accord meskipun mereka menikmati dukungan lebih populer daripada BLT mantan. Namun, mereka mendukung kesepakatan damai.

Segera setelah pembentukan partai politik Bodo disebut Bodoland Rakyat Progresif depan (BPPF) dari 12 April 2005 dibentuk oleh para pemimpin BLT mantan dan pemimpin ABSU-CCBM, menghadapi split: BPPF (Hagrama), yang dipimpin oleh Hagrama Mahilary, mantan yang Kepala BLT dan kepala anggota eksekutif ad hoc BTC, dan BPPF (Rabiram),

⁴³ Harriss, J. (2003). 'The State, Tradition and Conflict in the North Eastern States of India', Crisis States Programme Working Paper 13, London School of Economics: London.

⁴⁴ Hussain, M. (2005). 'Internally Displaced Person in India's North East', Economic and Political Weekly, 4 February, Mumbai.

yang dipimpin oleh Rabiram Narzary, mantan presiden ABSU. Meluasnya bentrokan antara dua faksi dirusak pemilu pertama ke BTC.

NDFB Pendiri Ketua Ranjan Daimary memulai proses perdamaian dengan menyatakan gencatan senjata sepihak pada tanggal 8 Oktober 2004, untuk jangka waktu enam bulan, yang diperpanjang sampai tiga bulan. Pada tanggal 25 Mei 2005, ia menandatangani perjanjian bilateral dengan Pemerintah Pusat pada Suspensi Operasi. Pada tahun yang sama, 855 kader NDFB dipimpin oleh sekretaris umum, Govinda Basumatary, pindah ke tiga kamp yang ditunjuk di kabupaten Kokrajhar, Baksa dan Udalguri. Tapi Ranjan Daimary tidak datang atas tanah dan terus beroperasi dari basis nya di Bangladesh bersama dengan kader bersenjata batalyon ketiga organisasi militan.

Daimary diusir oleh NDFB pada 1 Januari 2009 karena diduga terlibat dalam 30 Oktober 2008 serangkaian ledakan. Sebelumnya, Daimary diganti dengan pemimpin baru, B. Sunghagra alias Dhiren Boro pada tanggal 15 Desember 2008 Kelompok pemberontak dibagi menjadi dua faksi, satu dipimpin oleh Sunghagra dan dikenal sebagai NDFB (Gencatan Senjata) dan yang lainnya dipimpin oleh Ranjan Daimary. Kemudian, NDFB (Gencatan Senjata) kemudian dikenal sebagai NDFB (Progresif) dan faksi lain sebagai NDFB (Ranjan Daimary).⁴⁵

Setelah penangkapan kepala NDFB Ranjan Daimary Mei 2010, jantung Bodo tampaknya telah menghela napas lega. Daimary setuju untuk pembicaraan damai dan mengatakan bahwa ia akan mampu membuat komandan dan kader-kadernya menyerah jika New Delhi sangat ingin untuk negosiasi.

Pada 19 November 2010, sebuah organisasi payung baru Bodos, disebut Konferensi Nasional Bodo (BNC), dibentuk pada dua hari Bodo Konvensi Nasional di Kokrajhar. Tujuannya adalah menyediakan sebuah platform umum untuk semua organisasi Bodo -political dan non-politik - untuk memperjuangkan penyebab umum mereka, termasuk permintaan untuk sebuah negara terpisah dari Bodoland. Namun, NDFB (Progresif) menjauhkan diri dari BNC pada November 2011 dengan alasan bahwa BNC tidak memiliki masalah dari suatu Negara yang terpisah dari Bodoland pada agendanya. NDBF (Progresif) mengatakan telah mengadakan pembicaraan dengan Pemerintah India pada masalah dari suatu Negara yang terpisah.⁴⁶

Pada bulan Agustus 2011, faksi Ranjan Daimary dari NDFB mengumumkan penghentian permusuhan terbatas untuk menemukan solusi politik tahan lama dan

⁴⁵ Ibid. hal: 165

⁴⁶ Ibid. hal: 132

berkelanjutan konflik melalui dialog politik dan diskusi. Deklarasi tersebut datang setelah delegasi 11-anggota BNC bertemu Daimary di penjara pusat Nagaon pada 20 Juli 2011.⁴⁷

NDFB (R) faksi memiliki perpecahan terlihat pada bulan Agustus 2012 Myanmar berbasis IK Songbijit, yang benar-benar adalah Karbi suku, membatalkan gencatan senjata sepihak pada tanggal 8 Agustus 2012 dan telah muncul sebagai kelompok yang paling mematikan.

Ranjan Daimary dibebaskan dari penjara pada enam bulan jaminan sementara di Juni 2013 untuk mempercepat pembicaraan yang diusulkan antara NDFB dan Pemerintah India. Tiga minggu setelah berjalan keluar dari penjara, Ranjan Daimary duduk dengan Centre bicara PC Haldar pada 18 Juli untuk 'resmi' memulai proses perdamaian. Pada 29 November 2013, faksi Ranjan Daimary dari NDFB dan Pemerintah India menandatangani perjanjian gencatan senjata resmi sehingga membuka jalan untuk pembicaraan damai.

Lainnya

Pada tanggal 23 Mei 2002, Solidaritas Rakyat Demokratik Serikat (UPDS) menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah selama satu tahun yang mengarah ke perpecahan dalam kelompok. Faksi pro-talk dari UPDS mengadakan putaran pembicaraan damai dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Negara pada tanggal 22 Desember 2010 di New Delhi di mana semua tiga sisi menyetujui rancangan kesepakatan membuka jalan bagi penandatanganan nota kesepakatan (MoA). Pada 25 November 2011, Pusat dan Pemerintah Assam menandatangani kesepakatan dengan UPDS. Pusat menyatakan paket senilai lebih dari Rs 2.000 crore, dan Karbi Anglong Otonomi Dewan Distrik adalah telah dinamai kembali sebagai 'Karbi Anglong Otonomi Territorial Council (KAATC). KAATC yang diusulkan akan memiliki 50 anggota, dari yang 44 akan dipilih dan 6 dicalonkan oleh Gubernur Assam.⁴⁸

Suku Karbi membentuk kelompok pemberontak Front Pembebasan Karbi Longri Utara di Cachar Hills (KLNLF) memulai proses perdamaian pada tahun 2009 setelah menyatakan gencatan senjata sepihak pada bulan Januari tahun itu. Kelompok pemberontak meletakkan senjata pada 11 Februari 2010 untuk membuka jalan bagi pembicaraan damai.

Ada penyerahan secara massal dari Pasukan Keamanan Nasional dimasa (DNSF) pada bulan November 1994 di distrik Utara Cachar Hills. DHD (Dima Dalam Daogah), yang

⁴⁷ Ibid. hal: 141

⁴⁸ Laishram, B.S. (2004). 'Insurgency and the Collapse of Justice', IPCS Article 1491, Institute of Peace and Conflict Studies: New Delhi. Hal: 125

dibentuk pada 1 Januari 1995, menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan pemerintah pada tanggal 1 Januari 2003 yang mengakibatkan pembentukan DHD (Fraksi Garlossa Jewel). Kemudian, setelah penangkapan Jewel Garlossa pada tanggal 4 Juni 2009, kelompok pemberontak mengumumkan gencatan senjata sepihak dengan Pemerintah Negara Bagian. Akhirnya pada tanggal 2 Oktober 2009, 382 kader DHD-J meletakkan senjata mereka di depan pihak berwenang di Haflong, markas distrik NC Hills.

Pada 16 Agustus 2011 para pemimpin DHD-J yang bertanggung jawab sheeted oleh NIA, dibebaskan dari penjara oleh perintah interim untuk berpartisipasi dalam pembicaraan damai formal. Selanjutnya, kesepakatan damai atau Memorandum of Settlement (MOS) telah ditandatangani antara DHD dan DHD (J) dan Pemerintah Pusat dan Negara pada 8 Oktober 2012 di New Delhi untuk penciptaan Dima Hasao Territorial Council (DHTC).

Menurut laporan Pemerintah Negara, 13 kelompok pemberontak militan sekarang berbicara dengan Pemerintah. Saat ini, 12 kelompok militan yang masih aktif di Assam, yang enam dibentuk baru-baru ini. Jumlah kader yang tinggal di kamp-kamp yang ditunjuk di berbagai tempat di seluruh negara adalah 4158. Namun, 33 militan dari Pembicaraan Pro faksi NDFB, sembilan militan-Pembicaraan Pro faksi ULFA dan 116 dari KLNLF yang 'hilang' dari kamp mereka yang ditunjuk. Pembicaraan damai akan dilakukan, namun, belum mendapatkan momentum dengan salah satu kelompok pemberontak di Assam.

3.1.3.3 Pemberontakan di Manipur

Manipur tergabung dengan Uni India pada 15 Oktober 1949. Namun, hanya setelah agitasi berkepanjangan diselingi dengan kekerasan, itu dinyatakan sebagai negara terpisah pada tahun 1972. Munculnya pemberontakan di Manipur secara resmi ditelusuri munculnya United Nation Liberation Front (UNLF) pada 24 November 1964 yang diduga 'dipaksa' Merger dari Manipur dan keterlambatan dalam penganugerahan kenegaraan penuh untuk itu sangat dibenci oleh orang-orang dari Manipur. Sejak itu beberapa kelompok pemberontak lain, seperti Tentara Pembebasan Rakyat (PLA), yang didirikan pada tanggal 25 September 1978, Partai Rakyat Revolusioner Kangleipak (PREPAK) mengatur pada tanggal 9 Oktober 1977 dan Partai Komunis Kangleipak (KCP) yang terbentuk pada April, 1980 telah muncul di daerah lembah yang terdiri dari empat kabupaten Negara. Semua kelompok ini pemberontak telah menuntut Manipur independen yang terpisah.⁴⁹

⁴⁹ Phanjoubam, P. 'Manipur: The Search for Solutions', Faultlines 15; online version available at www.satp.org, Institute for Conflict Management: New Delhi. 2004

Daerah bukit Negara, yang terdiri dari lima kabupaten, telah dipengaruhi oleh berbagai merek militansi. Dari Nagaland, kekerasan oleh kelompok Naga juga telah menular ke Manipur, sebagian besar dari yang diklaim oleh faksi Isak-Muivah Nasional Sosialis Dewan Nagaland (NSCN-IM) sebagai bagian dari Nagalim, wilayah terpadu yang diusulkan Nagas seperti diklaim oleh pemberontak Naga. Beberapa bentrokan antara NSCN-IM dan faksi Khaplang Nasional Sosialis Dewan Nagaland (NSCN-K) telah dilaporkan dari distrik bukit Negara. Suku-suku Kuki di awal 1990-an dimulai merek mereka sendiri perlawanan terhadap dugaan penindasan oleh NSCN-IM. Setelah bentrokan etnis antara Nagas dan Kukis di awal 1990-an, sejumlah Kuki kelompok pemberontak dibentuk. Beberapa suku-suku lain, seperti Paite, Vaiphei dan Hmars juga telah membentuk kelompok-kelompok bersenjata mereka sendiri. Demikian pula, kelompok pemberontak Islam seperti Front Pembebasan Rakyat (People United Liberation Front-PULF) juga telah didirikan untuk melindungi kepentingan 'Pangals' (Muslim Manipuri).

Hari ini, Manipur adalah salah satu negara yang terkena dampak terburuk di timur laut di mana setidaknya 12 kelompok pemberontak yang aktif saat ini. Sebuah laporan dari Negara Indonesia departemen Mei 2005 menunjukkan bahwa 'sebanyak 12.650 kader kelompok pemberontak yang berbeda dengan 8830 senjata secara aktif beroperasi di Negara'.⁵⁰ Menurut sumber pemerintah, kekuatan yang terkonsentrasi di kabupaten lembah, dinilai sekitar 1.500 kader untuk Revolusioner Front Rakyat (RPF) dan sayap militer, PLA, 2500 kader untuk UNLF dan sayap militernya Tentara Manipur Rakyat (MPA), 500 kader untuk PREPAK dan sayap militernya Tentara Merah, sementara Kanglei Yawol Kanna Lup (KYKL) dan yang tentara Yawol Lanmi dinilai sebagai memiliki kekuatan 600 kader. Kekuatan Partai Komunis Kangleipak (KCP) 's dinilai pada 100 kader.

Di Manipur, kelompok pemberontak berbasis lembah tetap aktif dan operasi pasukan keamanan telah membuat sedikit perbedaan dengan kemampuan mereka. UNLF, PLA, KYKL, PREPAK dan KCP telah terlibat dalam beberapa serangan serius terhadap pasukan keamanan. Para pemberontak memiliki kebijakan diakui tidak menargetkan personil polisi negara bagian, kecuali dalam kondisi permintaan itu. Praktek mengarahkan serangan mereka di Angkatan Darat dan personil paramiliter sentral merupakan upaya untuk menciptakan perpecahan antara Manipur dan India dan untuk memperoleh dukungan rakyat vital.⁵¹

Tidak seperti teater konflik lain dari Timur Laut, tidak banyak 'penyerahan diri' telah dilaporkan dari Manipur, yang mengindikasikan kontrol ketat bahwa kelompok pemberontak

⁵⁰ Ibid. Hal 32

⁵¹ Ibid. Hal 32

telah dipertahankan selama kader mereka. Berbekal jaringan intelijen yang sangat efisien dan daya tembak yang unggul, militan telah mampu mengukir sejumlah zona dibebaskan di seluruh Negara. Pada akhir tahun 2007, namun, pasukan keamanan berhasil mengusir para militan dari sebagian zona tersebut kecuali untuk satu di daerah New Somtal di distrik Chandel. Pemerintahan teror telah diwujudkan dalam bentuk lain juga, karena kekuasaan pemberontak telah dikombinasikan dengan mundur lengkap pemerintahan sipil. Para pemberontak terus meneror dan memeras dengan impunitas, dan orang-orang memiliki sedikit pilihan kecuali untuk mematuhi diktat mereka.

Ada insiden di mana militan Negara telah menargetkan VIP. Salah satu serangan itu direncanakan pada Ketua Menteri Okram Ibobi Singh pada tanggal 23 November 2007. Insiden penembakan dan ledakan granat menargetkan kediaman Menteri dan Anggota Dewan Perwakilan Negara masih berlanjut. Saat ini, ada lebih dari 30 kelompok militan di Manipur (12 aktif tersebut di atas), termasuk 10 KCP faksi dan 19 Kuki kelompok pemberontak yang beroperasi di negara bagian. Naga kelompok pemberontak militan seperti NSCN-IM dan NSCN-K juga beroperasi di beberapa bagian kabupaten bukit Negara. Kelompok pemberontak Kuki sekarang dalam mode Penanggulangan Operasi (Soo) dengan Pemerintah.⁵²

Karena masalah militansi, investasi yang dimaksudkan untuk pembangunan infrastruktur sebagai cara melawan pengangguran telah didivestasi di wilayah Manipur. Peningkatan pemuda pengangguran terdidik di wilayah Manipur dapat dipekerjakan tetapi karena masalah tersebut mereka sekarang bahkan direkrut siap untuk menjadi militan. Kasus-kasus pemerasan juga meningkat. Militan terpaksa memeras dari hampir semua tempat termasuk tempat ibadah, lembaga pendidikan, pusat kesehatan dan perusahaan komersial. Hal ini telah menyebabkan penutupan beberapa usaha di Negara.

Menambah kesengsaraan Negara, para pemberontak Naga, beroperasi dari Nagaland dan bukit-bukit distrik Manipur, telah mendominasi dua National Highways, NH-39 dan NH-53, mengenakan pajak pada penggunaan jalan dan hukuman berikutnya pada tidak membayar itu. Ada 26 poin koleksi 'pajak' permanen dan sistematis di sepanjang jalan tersebut sehingga menghambat hubungan Manipur dengan Assam dan sisanya dari India.

Masalah lain yang serius yang diciptakan oleh militan adalah penculikan anak-anak untuk melatih mereka untuk menjadi anggota kelompok pemberontak. Ada juga insiden pembunuhan non-Manipuri oleh militan. Media di Negara juga telah menderita dan telah terjadi beberapa insiden di mana orang-orang media telah dibunuh oleh penjahat tak dikenal.

⁵² Ibid. Hal 52

Manipur telah dinyatakan 'daerah terganggu' secara keseluruhan pada tahun 1980 dan Angkatan Bersenjata Khusus Daya Act (AFSPA) 1958 diberlakukan di Negara pada tanggal 8 September 1980, yang terus berada di tempat sampai sekarang.⁵³ Pelaksanaan UU ini mengakibatkan Negara menyaksikan pemberontakan sipil belum pernah terjadi sebelumnya, termasuk yang terkenal "nude protes ibu" terhadap UU pada bulan Juli 2004 pada penemuan tubuh yang terpotong dari Thangjam Manorama, setelah dia dijemput oleh Assam Rifles dan kemudian ditemukan tewas. AFSPA masih terlibat dalam kontroversi dan orang-orang dari Manipur terus protes mereka terhadap UU.

Manipur berubah tegang pada berita tentang kunjungan Sekjen NSCN-IM Thuingaleng Muivah ke kampung Somdal di distrik Ukhrul Manipur pada minggu pertama Mei 2010. Manipur Negara Kabinet pada April 30, 2010 memutuskan untuk tidak mengizinkan masuknya Muivah di Manipur karena menganggap bahwa ada kemungkinan gangguan di negara bagian jika pemimpin NSCN-IM datang ke Manipur. Itu dijepit Bagian 144 dari Cr PC di distrik Senapati dan membawa pasukan tambahan untuk mencegah masuknya Muivah di Manipur. Setelah keputusan ini pemerintah, tujuh Naga MLAs mengundurkan diri memprotes langkah tersebut. Pada tanggal 6 Mei 2010, situasi di Mao gerbang perbatasan, di mana Muivah diharapkan untuk masuk Manipur, berubah tegang. Sejumlah penduduk setempat menyerbu sebuah barak keamanan sementara yang memimpin keamanan personil resor untuk menembak meninggalkan tiga penduduk setempat tewas dan lima puluh lainnya, termasuk perempuan, terluka. Setelah kejadian ini dan atas permintaan Kantor Perdana Menteri (PMO), Muivah menunda kunjungannya ke Somdal dan berkemah dirinya di desa Viswema dekat gerbang Mao di perbatasan antar-negara bagian Nagaland dan Manipur. Situasi ini masih pada jalan buntu dengan Muivah mengatakan ia akan mengunjungi desa asalnya dan pemerintah Manipur bertekad untuk tidak mengizinkan masuknya Muivah di negara bagian.

Setelah pemerintah Manipur ditolak masuk ke Muivah, berbagai kelompok suku Naga melancarkan blokade ekonomi terbatas di Manipur. Sebuah blokade ekonomi sudah di tempat di Manipur sejak 11 April 2010 oleh kelompok Naga yang berada di Manipur memprotes keputusan pemerintah negara untuk mengadakan pemilihan dewan otonom dan setelah pemerintah negara bagian menolak masuknya Muivah, kelompok Naga dilanjutkan dengan blokade. Ratusan truk yang mengangkut penting dan obat-obatan terdampar di negara sebelah Nagaland dengan pengunjung rasa memblokir Jalan Raya Nasional 39, jalur kehidupan

⁵³ Ibid. Hal 55

utama Manipur. Blokade ekonomi yang menyebabkan kekurangan akut komoditas penting di negara bagian. Pemerintah kini menerbangkan komoditas penting untuk Manipur dan menggunakan rute alternatif, seperti Jalan Raya Nasional 53, menghubungkan Assam dengan Manipur.⁵⁴

Akhirnya, pada tanggal 5 Juni 2010, Pemerintah Pusat membujuk Muivah meninggalkan desa Vishwema tempat ia berkemah sejak 6 Mei 2010 Blokade dari NH-39 diangkat pada 18 Juni 2010 setelah negosiasi dengan kelompok Naga yang berbeda.

Pada November 31, 2010 Rajkumar Meghen alias Sana Yaima, ketua UNLF, ditangkap dari Motihari di distrik East Champaran Bihar. Dia sebelumnya telah hilang setelah dilaporkan ditangkap di Bangladesh pada bulan September 2010.

Antara 1992 dan 2010, setidaknya 5.665 orang tewas dalam pemberontakan terkait insiden di Manipur. Namun, jumlah korban jiwa menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2008, ada 485 kematian terkait pemberontakan yang turun menjadi 416 pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 itu jatuh ke 138. Namun, Manipur tetap negara yang paling stabil di wilayah utara-timur.⁵⁵

Pemerintah, untuk memulai dengan, melihat masalah pemberontakan di hukum dan ketertiban paradigma murni. Penangkapan banyak pemimpin pemberontak selama perang kemerdekaan di Bangladesh pada tahun 1971, tampaknya telah menyebabkan penurunan bertahap dalam pemberontakan sebelum itu dihidupkan kembali oleh pembentukan PLA tahun 1978 ini mengharuskan deklarasi daerah lembah sebagai 'terganggu' dan penganan Angkatan Bersenjata (Special Powers) Act, 1958, pada bulan September 1980 kampanye pasukan keamanan melalui serangkaian manuver yang terkandung pemberontakan sampai setengah kemudian tahun 1980-an. Namun, kelompok-kelompok bangkit kembali, bersama dengan menjamurnya kelompok pemberontak dan internal yang konflik baru antara kelompok suku, melaju seluruh paradigma pemberontakan ke pesawat yang sama sekali berbeda di awal 1990-an.

Sedangkan kelompok pemberontak telah tetap benar-benar menentang pemerintah meminta perdamaian, pada 26 November 2000, UNLF yang diajukan tiga kondisi untuk pembicaraan dengan New Delhi. Kelompok pemberontak menuntut New Delhi harus mencakup agenda kedaulatan jika itu benar-benar serius tentang tawarannya pembicaraan menambahkan bahwa Pusat harus terlebih dahulu 'mendemilitarisasi' daerah dan negara

⁵⁴ Ibid. Hal 60

⁵⁵ Laishram, B.S. 'Insurgency and the Collapse of Justice', IPCS Article 1491, Institute of Peace and Conflict Studies: New Delhi. .2004. hal: 46

ketiga harus memantau pembicaraan. Ini tidak bisa diterima kepada pemerintah. Pada 28 Februari 2001, Menteri Kepala Radhabinod Kojiam menawarkan sebulan sepihak gencatan senjata, dimulai sejak 1 Maret 2001-17 kelompok pemberontak di Negara. Pada tanggal 19 Maret 2001, Gubernur Ved Marwah mengumumkan pembentukan kelompok kontak untuk hubungan dengan organisasi-organisasi ekstremis di Negara. Namun, langkah tersebut ditolak oleh kelompok pemberontak.

Lembaga masyarakat sipil dan organisasi berbasis masyarakat telah sangat berpengaruh di Manipur dan sering memainkan peran penting dalam penahanan konflik. Meira Paibis (pembawa obor perempuan) merupakan satu kekuatan tersebut. Mereka telah aktif dalam memprotes pelanggaran hak asasi manusia dan penangkapan dibenarkan oleh pasukan keamanan, dan dalam mengambil tindakan terhadap penyakit sosial seperti penyalahgunaan narkoba dan alkohol. Gerakan lain perempuan di Manipur, yang NUPI Gerakan (Wanita), juga diselenggarakan banyak demonstrasi untuk perdamaian dan untuk perlindungan hak asasi manusia di Negara. Manipur Chanura Leishem Marup (Macha Leima) adalah organisasi lain terkemuka perempuan, yang telah menyelenggarakan serangkaian lokakarya hak asasi manusia bagi perempuan di Manipur sejak 1997. Ada juga beberapa aktivis hak-hak sipil dan kelompok-kelompok termasuk Komite Serikat Manipur (UCM) di Negara. Keprihatinan mereka telah difokuskan pada kebebasan sipil dan pelanggaran hak-hak. Sebagian besar dari mereka telah berada di garis depan dari agitasi anti-AFSPA di negara bagian sejak Agustus 2004, setelah kematian dugaan PLA wanita kader Manorama Devi di tangan personil Assam Rifles.

Sampai klaim oleh pihak keamanan pada tahun 2005 dari beberapa kelompok pemberontak telah menandatangani gencatan senjata dengan pemerintah, pemberontak di Manipur tidak diketahui mengejar pendekatan yang lembut. Kementerian Pertahanan dalam siaran pers tanggal 7 Oktober 2005, mengungkapkan bahwa delapan Kuki dan satu Zomi kelompok militan di Manipur telah menandatangani 'gencatan senjata' informal dengan pemerintah. "Penghentian operasi 'perjanjian yang menyimpulkan dengan kelompok-kelompok ini dengan efek dari tanggal 1 Agustus 2005. Rasanya seperti secercah harapan untuk Manipur yang telah berada di bawah cengkeraman militan selama bertahun-tahun bersama-sama. Tapi, hal ini menyebabkan sedikit perbedaan dengan tingkat insiden-militansi terkait dan kematian karena kuat dan kelompok terkemuka seperti UNLF, PLA, yang PREPAK dan KYKL tidak bersedia untuk setiap jenis negosiasi.⁵⁶

⁵⁶ Ibid. Hal:63

Pemerintah telah saat ini menandatangani Suspensi Operasi (Soo) dengan pemberontak Kuki. Penundaan Perjanjian Operasi telah disahkan di New Delhi oleh utusan pemberontak Kuki, pemerintah Pusat dan Negara masing-masing pada tanggal 22 Agustus, 2008 Pada bulan Maret 2010, Uni Menteri Dalam Negeri GK Pillai mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin Nasional Kuki Depan (KNF) di Manipur dan pembicaraan antara pemerintah dan kelompok pemberontak diharapkan segera terjadi.

Pada bulan September 2006, UNLF, diteruskan formula empat titik untuk memulai proses plebisit untuk resolusi konflik di Manipur. Ini termasuk, (1) A plebisit di bawah pengawasan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memperoleh pendapat rakyat Negara pada masalah inti restorasi kemerdekaan Manipur. (2) Penyebaran kekuatan penjaga perdamaian PBB di Manipur untuk memastikan bahwa proses tersebut bebas dan adil. (3) Penyerahan senjata oleh UNLF ke pasukan PBB, cocok dengan penarikan pasukan India dan (4) Penyerahan kekuasaan politik oleh PBB sesuai dengan hasil plebisit. Usulan itu ditolak oleh pemerintah Negara.

Meskipun banyak menafsirkan langkah itu sebagai langkah maju menuju negosiasi perdamaian, itu untuk memastikan bahwa Pemerintah India tidak akan menerima intervensi dari PBB dalam apa yang selalu masalah internal. Dengan terus menempel kelompok pemberontak untuk kondisi seperti itu, negosiasi perdamaian tetap menjadi mimpi yang jauh di bawah keadaan seperti itu. Mirip halnya dengan PLA ketika yang 'sayap politik' presiden Irengbam Chaoren menegaskan bahwa kelompok pemberontak tidak akan duduk untuk pembicaraan damai dengan pemerintah saat berbicara di depan '29 penggalangan hari' Revolusi Rakyat depan (RPF) dari 24 Februari 2008 .

Dalam menghadapi oposisi keras kepala militan kelompok 'dengan ide negosiasi dengan operasi pemerintah, tentara dan polisi India terhadap mereka tetap kunci untuk proses pengelolaan konflik di Manipur. Beberapa operasi militer telah dipimpin oleh struktur komando terpadu, yang didirikan pada tahun 2004, melawan lembah berbasis kelompok militan. Prestasi mereka telah terbatas dan sementara.

Pada bagiannya, pemerintah Negara telah terus-menerus mendesak militan meletakkan senjata dan menyerah. Hal ini menawarkan Rs. 5 Lakh sebagai deposito dan gaji bulanan dari Rs.5,000 bagi militan yang menyerah.⁵⁷

⁵⁷ A. Basu and A. Kohli (eds), *Can Democracies Accommodate Ethnic Nationalism? Community Conflicts and the State in India*, Oxford University Press: Calcutta. Hal:76

3.1.3.4 Pemberontakan di Tripura

Demografi mayoritas penduduk di Tripura termarginal sebagai akibat dari migrasi tanpa hambatan dari Bengal Timur dan Bangladesh. Suku-suku didorong ke bukit-bukit, dan politik dan administrasi di Negara tersebut didominasi oleh penduduk setempat dan pendatang dari Bengali. Pemberontakan dimulai sebagai gerakan protes terhadap fenomena ini. Gerakan suku pertama yang diselenggarakan bersenjata Sengkrak berasal dari pertengahan tahun 1960-an sebagai reaksi terhadap menetap pengungsi non-suku di kawasan hutan cagar suku. Gerakan ini berakhir pada tahun 1968.

Selanjutnya, Bijoy Kumar Hrangkhawal mendirikan Relawan Nasional Tripura (TNV). Faksi ini dilarutkan pada bulan Desember 1980 kemudian dihidupkan kembali pada tanggal 10 November 1982 TNV melanjutkan kegiatannya sampai penandatanganan kesepakatan tripartit pada tanggal 12 Agustus 1988, membuka jalan bagi penyerahan kader TNV. Militer lainnya, All Tripura Organisasi Pembebasan Rakyat (ATPLO) tetap aktif antara Desember 1980 dan Juli 1983.⁵⁸

Front Pembebasan Nasional Tripura (NLFT) didirikan pada bulan Maret 1989 oleh kader TNV tertentu yang dipimpin oleh Dhananjay Reang. NLFT, sejak saat itu, telah mengalami beberapa perpecahan. Kepemimpinan faksi dan kader sebagian besar berbasis di Bangladesh. Faksi dominan di NLFT dipimpin oleh Biswamohan Debbarma tetap menjadi salah satu dari dua faksi aktif di Tripura. Faksi lainnya, selain NLFT, yang tetap menolak untuk ditarik ke dalam setiap perjanjian perdamaian dengan pemerintah, adalah Ranjit Debbarma dipimpin Semua Tripura Tiger Force (ATTF), ditemukan pada bulan Juli 1990 sebagai All Tripura Tribal Force. Bahkan, ATTF telah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah Tripura pada tanggal 23 Agustus 1993 Namun, sebuah faksi yang dipimpin oleh Ranjit Debbarma memutuskan untuk melakukan kampanye bersenjata mereka. Selama bertahun-tahun, faksi telah menemukan tempat berlindung di Bangladesh dan menuruti dalam tabrak lari kampanye dalam Tripura. Bahkan saat ini, Front Demokratik Rakyat Tripura (TPDF), sayap politik ATTF terlibat dalam kegiatan melawan negara.

Faksi militer lain yang aktif di negara bagian adalah Dewan Nasional Borok Tripura (BNCT). Itu datang menjadi ada pada tahun 1997 dan merupakan organisasi adik dari NLFT. Hal ini sebagian besar mengelola kegiatan penculikan dan pemerasan dari NLFT, terutama di distrik-distrik Tripura Utara dan Dhalai.

⁵⁸ Diversity and Minority Rights in a Democratic Nation-State', in W. Kymlicka and B. He (eds) Multiculturalism in Asia, Oxford University Press: Oxford.

Meskipun kegiatan terkait pemberontakan menurun di negara bagian, insiden kekerasan masih terjadi. Yang paling menonjol adalah serangkaian ledakan di ibu kota negara, Agartala pada tanggal 1 Oktober 2008. Dalam insiden ini, empat ledakan terjadi dalam rentang 45 menit di Radha Nagar, Gol Bazaar, GB Bazaar dan Krishna Nagar daerah dari Agartala, melukai 74 orang. Tidak ada organisasi yang mengaku bertanggung jawab namun penyelidikan selanjutnya menunjukkan keterlibatan ATTF dan HuJI, kelompok faksi meneror Bangladesh dengan ledakan.

Antara 1992 dan 2010 (sampai 31 Juli), setidaknya 3.479 pemberontakan terkait kematian dilaporkan dari Tripura. Tindakan polisi yang efektif sejak akhir tahun 2002, bagaimanapun, telah berhasil melemahkan faksi, yang mengarah ke penurunan tajam dalam kematian terkait pemberontakan. Dibandingkan dengan 296 kematian pada tahun 2003, tahun 2009 tercatat hanya 11 korban jiwa. Setelah dikenal sebagai pusat penculikan Timur Laut, Tripura telah melaporkan penculikan hanya 11 warga sipil pada tahun 2009 dan tidak ada penculikan selama tujuh bulan pertama tahun 2010. Pada tahun 2006, 43 orang diculik di antaranya 31 yang dibebaskan dan satu dibunuh oleh militan.⁵⁹

Dua kelompok faksi yaitu NLFT dan ATTF masih bertahan meskipun dari beberapa laporan ada kemungkinan kedua kelompok tersebut berkolaborasi, namun keduanya terus beroperasi secara independen. Serangan terutama ditujukan pada kekuatan personil keamanan, pekerja partai politik yang tergabung dalam Partai Komunis India-Marxis dan pengusaha. Di masa lalu, target penyerangan adalah pekerja yang bekerja di peletakan rel kereta api. Namun, serangan tersebut telah berkurang setelah polisi mulai menyediakan keamanan untuk proyek tersebut. Pada bulan Februari 2007, Menteri Transportasi Negara Manik Dey mengatakan bahwa pemerintah Negara telah menghabiskan Rs 400 juta untuk menyediakan keamanan yang diperlukan untuk pekerja konstruksi jalur kereta api dari Manu ke Agartala.

Pada tanggal 12 Maret 2009, Menteri Kepala Manik Sarkar mengatakan di Majelis Negara itu antara tahun 2006 dan 2008, sebanyak 871 militan milik ATTF tersebut, NLFT dan BNCT telah menyerah kepada pasukan keamanan. Dia juga mengatakan bahwa sekitar 180 sampai 200 NLFT dan 80 sampai 90 militan ATTF masih underground. Karena operasi kontra pemberontakan yang terjadi di negara, sebagian besar kader dan pimpinan kelompok militan tinggal di Bangladesh.

⁵⁹ Luithui, L., and N. Haksar (1984). Nagaland File: A Question of Human Rights, Lancer International: New Delhi.

Dengan kepemimpinan puncak dan sebagian besar kader dari dua kelompok militan yang berbasis di Bangladesh, yang terakhir tetap penting untuk kebijakan apapun sejauh mengakhiri militansi di Tripura yang bersangkutan. Setelah kemenangan partai Liga Awami dalam pemilihan parlemen di Bangladesh pada bulan Desember 2008, yang baru terpilih sebagai Perdana Menteri Sheikh Hasina Wazed yakin bahwa wilayah Bangladesh tidak akan diizinkan untuk digunakan untuk melancarkan serangan teroris di India. Hal ini memberikan dorongan lebih lanjut menjelang akhir pemberontakan di Tripura.

Pada 29 November 2009, NLFT supremo Biswamohan Debbarma ditangkap oleh petugas dari Direktur Jenderal Angkatan Intelijen (DGFI), badan intelijen Bangladesh dari daerah mewah dari Dhaka. Ini merupakan pukulan besar bagi faksi. Kebebasan bahwa kelompok pemberontak dari India dinikmati di Bangladesh juga dibatasi oleh pemerintah Bangladesh yang baru. Operasi berikutnya kontra pemberontakan terhadap kelompok ini juga melemah mereka, yang menyebabkan demoralisasi kader dan menyebabkan penyerahan diri skala besar. Pada tahun 2009, total 215 militan menyerah di Tripura. Ini termasuk 119 dari BNCT, 53 dari NLFT, 41 dari ATTF dan dua dari kelompok militan tak dikenal.

Tindakan resmi untuk mengakhiri pemberontakan melalui penciptaan lebih banyak jalan untuk suku-suku termasuk undang-undang Otonomi Dewan Distrik 1979 Tripura Wilayah Kesukuan. Hal ini dimaksudkan untuk meredakan perasaan keterasingan dan kekurangan antara suku-suku. Dampaknya terhadap pemberontakan dan polarisasi masyarakat di Negara tersebut, namun, terbatas.

Pada tahun 1987, pemimpin TNV, Bijoy Hrangkhawal dihubungi maka Kepala Menteri Mizoram, Lalthanhawla, untuk mengamankan 'penyelesaian terhormat' dengan pemerintah. Namun, harus menunggu selama satu tahun sampai pemerintah yang dipimpin Kongres berkuasa di Negara. Sebuah kesepakatan perdamaian tripartit ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1988, mengakhiri pemberontakan TNV. Pemerintah Front Kiri pada tahun 1993 melakukan negosiasi bipartit dengan ATTF, yang mengarah ke penyerahan dari sebagian besar kadernya. Re-merupakan ATTF dan NLFT telah, bagaimanapun, telah sepenuhnya menentang segala bentuk penyelesaian yang dinegosiasikan dengan pemerintah.⁶⁰

Keberhasilan terbaru dari pemerintah dalam melemahkan NLFT telah penyerahan Nayanbashi Jamatiya dan Montu Koloï faksi pemberontak. Pada tanggal 15 April 2004, Nayanbashi Jamatiya menandatangani perjanjian gencatan senjata setelah pertemuan tripartit

⁶⁰ Lahiri, A.S., S. Chattopadhyay and O.P. Bohra (2002). A Study of Fiscal Reforms in Manipur, National Institute of Public Finance and Policy: New Delhi. Hal: 133

dengan pusat dan perwakilan pemerintah negara di New Delhi. Meskipun Nayanbashi kemudian meninggalkan proses perdamaian dan melarikan diri ke Bangladesh, kader-kadernya tinggal dan penarikan manfaat dari skema rehabilitasi menyerah cum. Lain NLFT pemimpin faksi Montu Koloj juga bergabung dengan pembicaraan damai New Delhi dan mengikuti perjanjian gencatan senjata 72 kader fraksi menyerah pada tanggal 6 Mei 2004.

ATTF pada tahun 2004 diuraikan tiga kondisi untuk awal proses dialog, yaitu:

1. Mereka yang telah memasuki Tripura setelah 1949 dan yang namanya tidak tercantum dalam daftar pemilih dari 1952 harus dinyatakan sebagai orang asing.
2. Masalah kedaulatan harus tertera dalam proses negosiasi.
3. Seorang wakil Perserikatan Bangsa-bangsa terwakili dan Rakyat Organisasi (UNPO) a lembaga global non-pemerintah berusaha untuk mewakili kepentingan masyarakat adat di seluruh dunia-harus hadir selama pembicaraan perdamaian namun kondisi tersebut ditolak oleh pemerintah Negara.

Jamatiya Hoda, Dewan Tertinggi suku Jamatiya, kelompok suku terbesar ketiga di Tripura, memimpin gerakan perdamaian yang paling nyata di Negara, dalam bentuk oposisi terhadap terorisme. Pada konferensi 410 dari Hoda pada 13 Desember 2000, para pemimpin suku memutuskan untuk tidak membayar apapun 'pajak' ke kelompok pemberontak yang beroperasi di negara tersebut. Hoda menentang NLFT memaksa berkendara konversi dan ancaman konstan dan intimidasi. Pada tanggal 13 Februari 2001, Jamatiya Hoda menjanjikan dukungan kepada pemerintah dalam memerangi pemberontakan. Keberhasilan operasi kontra-pemberontakan, bagaimanapun, telah mendorong upaya masyarakat sipil untuk latar belakang dalam beberapa kali.

Perdamaian di Tripura dapat terutama disebabkan oleh operasi kontra pemberontakan sukses di negara bagian. Aparat keamanan telah mampu mengurangi kegiatan pemberontakan yang berkaitan dengan sebagian besar. Untuk mengatasi masalah pemberontakan, Polisi Tripura telah mengadopsi strategi multi cabang, mengambil tanggung jawab pada dirinya sendiri untuk menjadi kekuatan serangan utama terhadap pemberontak. Tentara dan paramiliter bertindak dalam koordinasi dengan polisi tetapi sebagai back-up tim benar-benar.

Selama beberapa tahun terakhir, insiden yang berkaitan dengan kekerasan ekstrimis telah menunjukkan penurunan tajam dan jumlah penculikan dan pembunuhan ekstrimis juga telah berkurang secara substansial. Jumlah militan menyerahkan diri kepada pasukan keamanan juga meningkat. Tripura juga mulai menarik investor, baik domestik maupun

asing, sebagian pemberontakan sedang menurun dan kegiatan pembangunan akan memberikan keuntungan di negara bagian.⁶¹

3.1.3.5 Pemberontakan di Meghalaya

Pemberontakan di Meghalaya dimulai sebagai gerakan melawan dominasi 'dkhars' (luar). Pembebasan Council Hynniewtrep Achik (HALC) mewakili kepentingan suku-suku yang dominan dari Negara, Khasis, Jaintias dan Garos. Namun, perbedaan suku menyebabkan perpecahan dalam HALC pada tahun 1992 ke Dewan Pembebasan Nasional Hynniewtrep (HNLC), mewakili Khasis dan Jaintias, dan Tentara Pembebasan Achik Matgrik (KLSLM) mewakili Garos. KLSLM kemudian berlalu terlupakan diganti oleh Achik National Volunteers Council (ANVC). Sedangkan HNLC bertujuan untuk mengkonversi Meghalaya "sebagai provinsi khusus untuk suku Khasi dan bebas dari 'dominasi' oleh suku Garo", tujuan yang diklaim para ANVC adalah untuk "mengukir tanah air disebut 'Achik Land' di bidang Garo Hills. "Kedua kelompok pemberontak menandatangani aliansi strategis dengan kelompok-kelompok lain seperti Front Persatuan Pembebasan Asom (ULFA), Dewan Sosialis Nasional Nagaland-Isak-Muivah (NSCN-IM) dan Front Demokratik Nasional Bodoland (NDFB), di kembali untuk memungkinkan mereka perjalanan yang aman serta menyediakan mereka dengan rumah-rumah aman di medan berbukit Negara. Kegiatan HNLC ini dibatasi ke bukit Khasi dan beberapa serangan yang terjadi di ibukota Shillong Negara. Pada tahun berturut-turut, itu menyerukan boikot perayaan Hari Kemerdekaan pada 15 Agustus dan diktat yang memiliki dampak yang baik pada orang-orang. Demikian pula, di Garo Hills, yang ANVC memegang kekuasaan.⁶²

Operasi kontra-pemberontakan Berkelanjutan, selama bertahun-tahun, melemahkan kedua kelompok pemberontak. Sejak 23 Juli 2004, yang berada di bawah ANVC perjanjian gencatan senjata diperpanjang dengan pemerintah. Namun, pemerasan di Barat Khasi Hills, East Garo Hills dan kabupaten South Garo Hills sedang dilakukan oleh kelompok. Para militan dari ANVC telah membentuk pemahaman berbagi keuangan-dengan NSCN-IM menargetkan daerah sabuk batubara dari West Khasi Hills dan East Garo Hill. Kedua ANVC dan NSCN-IM menggunakan baru terbentuk k militan, seperti Tentara Pembebasan Atong (ALA) di South Garo Hills, dan Achik Nasional Pertahanan Keamanan (ANSD) di West Khasi Hills, untuk mempertahankan pemerasan drive di daerah batubara-belt.

⁶¹ Lahiri, A.S., S. Chattopadhyay and O.P. Bohra (2002). A Study of Fiscal Reforms in Manipur, National Institute of Public Finance and Policy: New Delhi. Hal: 149

⁶² INDIA: AFSPA mendukung pemberontakan bersenjata di Manipur”, Pernyataan pers, 26 Juli, (2010). www.alrc.net/doc/mainfile.php/alrc_st2010/624/. Diakses 22 Februari 2013.

Namun, pimpinan puncak HNLC, yang berbasis di Bangladesh, terus menolak semua jenis tawaran perdamaian. Banyak kadernya, bagaimanapun, telah baik telah ditangkap atau menyerahkan diri. Sementara kepemimpinan puncaknya terus berbasis di Bangladesh, kelompok pemberontak telah diberikan tidak mampu mendalangi serangan. Ia menerima kemunduran lebih lanjut dengan 24 Juli 2007 penyerahan ketua kelompok pemberontak Julius Dorphan. Dia, bersama dengan empat militan lainnya meninggalkan kamp kelompok pemberontak di distrik Maulvi Bazar Bangladesh dan menyerah kepada pihak berwenang di Shillong.

Tangguh operasi kontra-pemberontakan dan penurunan kekuatan kader mereka telah menyebabkan HNLC untuk bergabung tangan dengan Front Pembebasan Nasional Tripura (NLFT), dengan yang sekarang menjalankan jaringan pemerasan di Barat Khasi Hills. HNLC juga telah memperbaharui aliansi dengan NSCN-IM, terutama untuk mempertahankan kontrol atas kader HNLC di ambang menyerah.

Setelah kesepakatan gencatan senjata antara pemerintah dan ANVC dan kurungan berikutnya dari kader ANVC di kamp-kamp yang ditunjuk, Garo Hills of Meghalaya telah damai. Sejak tahun 2004, mengambil keuntungan dari kekosongan yang ditinggalkan terbuka oleh ANVC, beberapa kelompok pemberontak kecil muncul dan menghilang secara berurutan. Menonjol di antara mereka adalah Retrieval Adat Bersatu depan (RIUF), Front Nasional A'chik (UANF), Tentara Pembebasan Hajong (HULA). Demikian pula, Angkatan Darat (HNSRA) Hynniewtrep National Special Red mulai beroperasi di daerah Khasi Hills.

Pada awal tahun 2006, Pembebasan Achik Elite Force (LEAF) dibentuk oleh mantan komando polisi, Peter Marak. Kelompok pemberontak, yang dikenal memiliki hubungan dengan Dewan Sosialis Nasional Nagaland-Khaplang (NSCN-K), telah terlibat dalam beberapa insiden di perbukitan daerah Garo. LEAF juga mempertahankan hubungan dengan NSCN-IM dan ULFA.

Operasi polisi terhadap LEAF bertemu dengan keberhasilan strategis dengan penangkapan ketua Peter Marak dan dua kaki tangannya dari tempat antara Jorabat dan Khanapara dekat ibukota Assam Dispur pada 21 Agustus 2007 Pada tanggal 7 Desember 2008, LEAF mengalami kemunduran dengan pembunuhan yang 'komandan-in-chief', Kimrey K. Sangma, selama pertemuan dengan pasukan keamanan di desa Damit dekat Shahlang di distrik Barat Khasi Hills. Sebelumnya, pada tanggal 1 Juli 2008, Polisi menemukan mayat kemudian 'komandan-in-chief' dari kelompok pemberontak, Nicheng Sangma alias Daria

Sangma. Dia tewas dalam bentrokan intra-kelompok pemberontak di Parasin di distrik East Garo Hills.⁶³

Pada November 18, 2008 sembilan kader LEAF senior, termasuk 'komandan daerah' ditangkap dari yang baru mendirikan kemah di Kadambari di distrik Ri-Bhoi bersama Meghalaya-Assam perbatasan. Pada tahun 2008, total 23 militan LEAF ditangkap dan dua menyerah kepada pasukan keamanan.

Antara 1992 dan 2009 (sampai Juli), setidaknya 383 pemberontakan terkait kematian tercatat di Meghalaya. Para korban militansi terkait telah menunjukkan tren terus menurun sejak tahun 2003. Dari 79 korban jiwa pada tahun 2003, jumlah berkurang menjadi 12 pada tahun 2008 ada kematian sipil pada tahun 2008 (Sumber: www.satp.org). Menurut catatan polisi, total 105 militan dinetralkan di negara tahun 2008. Dari jumlah tersebut, 78 ditangkap, 15 menyerah dan 11 orang lainnya tewas.⁶⁴

Meghalaya terus memberikan lintas transit untuk kelompok-kelompok seperti ULFA dalam perjalanan mereka antara Bangladesh dan Assam. Kelompok pemberontak diketahui telah menyiapkan rumah aman di Garo wilayah perbukitan dan sering menyimpan senjata dan amunisi di daerah. Selanjutnya, Blok-I dan Blok II-daerah Meghalaya yang berbatasan Assam telah menyaksikan kegiatan pemerasan oleh kelompok pemberontak seperti Solidaritas Rakyat Demokratik Serikat (UPDS). Sekali lagi, badan intelijen eksternal Pakistan, Inter-Services Intelligence (ISI), juga dilaporkan mengkonsolidasikan jaringan di Meghalaya. Ibukota negara bagian Shillong menjadi hub untuk perdagangan senjata ringan ilegal dan bahan peledak, yang dibawa melalui bukit Garo atau Mizoram.

Gereja telah memainkan peran penting menuju perdamaian di Meghalaya. Sementara Gereja Shillong Khasi Jaintia Forum Pemimpin secara resmi ditunjuk sebagai negosiator dengan HNLC, para Garo Baptist Convention berperan dalam membawa ANVC bagi perundingan perdamaian. Pada tahun 2003, individu seperti Garo politikus dan mantan ketua Lok Sabha PA Sangma menawarkan untuk menengahi antara Negara dan ANVC. Namun, usulan itu tidak diterima oleh pemerintah negara bagian. Demikian pula, pada tahun yang sama, Ketua Menteri Mizoram Zoramthanga menawarkan untuk bernegosiasi dengan negara. Usulan itu ditolak oleh pemerintah negara bagian yang mengatakan bahwa tidak akan mengizinkan pintu belakang negosiasi.

⁶³ Sahni, A. (2001). 'The Terrorist Economy of India's northeast: Preliminary Explorations', *Faultlines* 8; online version available at www.satp.org, Institute for Conflict Management: New Delhi. Hal: 88

⁶⁴ Sandham, O. (2004). 'Who Rules Manipur's Streets?', *IPCS Article 1835*, Institute of Peace and Conflict Studies: New Delhi. Hal: 90

ANVC menandatangani tripartit kesepakatan gencatan senjata diperpanjang dengan Pusat dan Pemerintah negara pada tanggal 23 Juli 2004 HNLC datang dekat dengan memulai proses perdamaian dengan pemerintah negara bagian pada tahun 2006 Pada minggu terakhir bulan April 2006, Ketua HNLC Dorphan diminta Ketua Menteri DD Lapang untuk mendesak Pusat untuk mempercepat proses perdamaian. Namun, pendapat dari polisi negara tidak mendukung memulai proses perdamaian dengan kelompok pemberontak dan membujuk Departemen Union Dalam Negeri yang menunda awal dialog. Kelompok pemberontak akhirnya mundur dari proses mengutip izin pemerintah negara kepada usaha sektor publik, Corporation Uranium India Ltd, untuk penambangan uranium di Domiasiat di distrik Barat Khasi Hills. Sekali lagi pada bulan Oktober 2008, HNLC menolak tawaran untuk pembicaraan damai oleh pemerintah negara bagian mengatakan bahwa ia tidak memiliki agenda untuk mengadakan pembicaraan dengan departemen kepolisian pemerintah negara bagian atau negara karena mereka hanya pelaku pemerintah India.

3.1.3.6 Pemberontakan di Mizoram

Pemberontakan di Mizoram yang dipimpin oleh Front Nasional Mizo (MNF), yang dimulai dengan terkenal Mautam Kelaparan tahun 1960-an, berakhir dengan Perjanjian Perdamaian Mizo dari 1986 Mantan pemimpin pemberontak yang diserap ke dalam aliran politik di negara, dan mengikuti itu, Negara tetap, lebih atau kurang, damai, kecuali untuk konflik perifer. Menonjol di antara mereka telah terjadi dari Brus atau Reangs, yang dipaksa keluar dari negara ke negara tetangga Tripura pada tahun 1997, menyusul dugaan kekejaman pada mereka. Hampir 17.000 dari mereka, yang jumlahnya terus bertambah menjadi sekitar 35.000 pada awal tahun 2000, ditempatkan di enam kamp bantuan di Kanchanpur sub-divisi dari distrik Utara di Tripura. Karena pemerintah Mizoram ragu-ragu atas pemulangan Reangs, mengutip alasan seperti jumlah meningkat dari pengungsi, kelompok militan seperti Front Pembebasan Nasional Bru (BNLF) dan selanjutnya, Bru Front Pembebasan Mizoram (BLFM) muncul keluar dari kamp dan terlibat dalam kekerasan intermiten dalam Mizoram dan juga di daerah perbatasan di Assam.

Pada 5 Juni 2009, Pemerintah Mizoram memutuskan untuk mengambil kembali para pengungsi Bru berada di enam kamp pengungsi Utara Tripura. Tapi repatriasi pengungsi dari Tripura ke Mizoram dihentikan pada bulan November 2009 ketika sekelompok massa di Mizoram dibakar sekitar 700 rumah suku setelah seorang pemuda Mizo 18 tahun ditembak mati oleh penjahat tak dikenal. Menyusul insiden itu, sekitar 5.500 lebih pengungsi suku-suku Bru / Reang berlindung dari awal di North Tripura. Proses pemulangan dimulai lagi

pada 21 Mei 2010 dengan 154 keluarga, yang melarikan diri dari negara pada bulan November 2009, kembali ke Mizoram. Oleh 26 Mei 2010, sekitar 235 keluarga yang terdiri dari 1.200 pria, wanita dan anak-anak telah dipulangkan dalam tiga gelombang kabupaten Mamit dari Mizoram barat.⁶⁵

Kelompok lain seperti Hmar Rakyat Konvensi-Demokrasi (HPC-D), namun, terus melakukan kegiatannya di luar perbatasan Mizoram, sebagian besar dalam Assam dan Manipur.⁶⁶

Pada bulan Mei 2007, baju baru yang disebut Singlung Tiger Angkatan dibentuk, yang kemudian menjadi Tentara Pembebasan Rakyat Singlung (SPLA). Ini adalah kelompok bersenjata yang kader diambil dari masyarakat Hmar memiliki basis di daerah perbatasan Manipur-Mizoram-Myanmar. Ideologi di balik pembentukan kelompok pemberontak adalah untuk membela hak-hak rakyat Singlung adat yang terkena dampak pembangunan yang diusulkan dari Tuirial dan Tipaimukh multi-tujuan proyek Hydel di daerah mereka termasuk daerah perbatasan sebelah Manipur dan Mizoram. Baru-baru ini, pada tanggal 17 Juli 2009, 64 kader SPLA meletakkan senjata mereka dan menyerah kepada Pemerintah Mizoram.

Namun, masalah yang mempengaruhi perdamaian di Mizoram adalah penyelundupan senjata melalui perbatasan berpori dengan Myanmar dan Bangladesh. Wilayah perbatasan internasional Mizoram ini sering digunakan oleh penyelundup senjata untuk membawa senjata ke wilayah timur laut.

Mizoram terus menjadi damai perbatasan pengalaman aneh dengan pemberontakan perifer. Ia telah berhasil membawa kedua BNLF dan BLFM ke flip perdamaian. Pembicaraan perdamaian dimulai antara pemerintah Mizoram dan BNLF pada 7 September 2001 Kedua belah pihak mengadakan beberapa putaran pembicaraan untuk mencapai solusi. Namun, terlepas dari kesepakatan damai antara BNLF dan pemerintah Mizoram pada tanggal 26 April 2005, pemulangan pengungsi ke Mizoram belum dimulai.⁶⁷

Polisi Negara tidak hanya disiagakan untuk pemberontakan di bawah tingkat yang dapat dikelola, tetapi upaya anti-pemberontakan yang memberikan hasil yang signifikan. Pada tanggal 22 April 2006, tim gabungan dari Mizoram Polisi dan Assam Rifles menangkap empat pemimpin atas BLFM, termasuk yang 'presiden' Vanlalliana, 'wakil

⁶⁵ India: North East Network ,2004. <http://ncw.nic.in/pdfreports/Violence%20against%20women%20in%20North%20East%20India%20-%20An%20Inquiry.pdf>. Diakses 21 Februari 2013.

⁶⁶ Hindustan Times www.hindustantimes.com/rssfeed/Guwahati/NEI-Centre-peace-talks-tobegintoday/Article1-660389.aspx. Diakses 25 Februari 2013

⁶⁷ Sandham, O. (2004). 'Who Rules Manipur's Streets?', IPCS Article 1835, Institute of Peace and Conflict Studies: New Delhi.

presiden' Vanrama, 'panglima militer' Romawia Meska dan 'letnan' Lallawma, dari tempat yang berbeda dari negara. Penangkapan kemudian menyebabkan penyerahan secara massal dari 802 kader BLFM pada 26 Oktober 2006.

Pada awal tahun 2007, pemerintah Mizoram memprakarsai serangkaian langkah-langkah untuk membawa HPC-D ke meja perundingan. Pada tanggal 5 Januari Ketua Menteri, Zoramthanga didelegasikan Charlton Lien Amo, seorang legislator dari Manipur, sebagai wakil untuk bernegosiasi dengan HPC-D. Kelompok pemberontak merespon dengan meminta keterlibatan Pemerintah Uni dalam pembicaraan perdamaian antara kelompok pemberontak dan Pemerintah Mizoram. Sebuah catatan yang dikeluarkan oleh kelompok pemberontak pada 11 Januari mengatakan, "Jika ada negosiasi untuk membahas pemenuhan ketentuan perjanjian 1994 yang ditandatangani antara pemerintah Mizoram dan HPC, Pusat harus turun tangan." Belum ada kemajuan dalam proses negosiasi.⁶⁸

3.1.3.7 Pemberontakan di Arunachal Pradesh

Awal dari pemberontakan pribumi di Arunachal Pradesh adalah munculnya Arunachal Naga Force (ADF), yang dinamai kembali sebagai East India Front Pembebasan (EALF) pada tahun 2001 kelompok pemberontak tersebut tetap aktif di distrik Lohit, sebelum dinetralisir oleh pasukan polisi negara.

Gerakan pemberontakan pribumi hanya sebagian kecil dari masalah yang dihadapi oleh Arunachal Pradesh pada tahun-tahun sebelumnya. Berbagai faktor termasuk kedekatan geografis dengan Myanmar dan kesamaan etnis antara warga di beberapa distrik Arunachal Pradesh dengan penduduk setempat di Nagaland telah menjadi alasan mengapa kelompok pemberontak dari Assam dan Nagaland telah mengeksploitasi Negara untuk kegiatan mereka.⁶⁹

Secara tradisional, kabupaten selatan-barat Tirap dan Changlang, dalam kedekatan Nagaland, telah perburuan yang menyenangkan bagi kedua faksi Dewan Sosialis Nasional Nagaland (NSCN). Sementara Khaplang (NSCN-K) membuat terobosan pertama ke dalam wilayah perawan di awal 1990-an, faksi NSCN-IM segera membuat langkah dan mengukir

⁶⁸ Das, J.N. (1990). A Study of Land System of Mizoram, Law Research Institute: Guwahati.

⁶⁹ Arachunal Pradesh pada mulanya merupakan distrik utama di wilayah Northeast India. Inggris menempatkan administrasinya di wilayah tersebut pada masa penjajahan. Maka dari itu pembangunan dan kesejahteraan tidak menjadi masalah bagi masyarakat di Arachunal Pradesh. (www.hindustantimes.com/rssfeed/Guwahati/NEI-Centre-peace-talks-to-begintoday/Article1-660389.aspx. Diakses 25 Februari 2013)

wilayah yang terpisah dari pengaruh di kabupaten tersebut. Dalam beberapa kali, kedua kabupaten telah menyaksikan bentrokan faksi sesekali antara kelompok. Kedua kelompok dikenal untuk menjalankan jaringan pemerasan yang luas di kabupaten tersebut. Menurut laporan intelijen, setiap pegawai negeri dan pengusaha di Tirap dipaksa untuk membayar hampir 25 persen dari pendapatannya sebagai pajak untuk kelompok pemberontak. Mematikan bank di daerah ini karena tuntutan pemerasan oleh kelompok pemberontak juga telah datang ke cahaya. Pada tahun 2001, Oil India Limited menghentikan kegiatan di distrik Changlang dan mengeluarkan 130 staf teknis dari daerah tersebut setelah NSCN-IM menuntut sejumlah USD 6 juta.

Arunachal Pradesh juga telah digunakan sebagai rute transit oleh Front Pembebasan Asom (ULFA). Sementara gerakan kader ULFA antara kabupaten paling timur dari Assam dan fasilitas kelompok pemberontak di divisi Sagaing di Myanmar melalui Arunachal Pradesh dapat ditelusuri kembali ke 1980-an, kepentingan strategis Negara untuk ULFA telah tumbuh berlipat ganda setelah kelompok pemberontak ini Desember 2003 pemecatan dari Bhutan, setelah tindakan keras militer. Ketergantungan kelompok pemberontak di batalion 28 yang bermarkas di Myanmar, untuk hit and run nya kegiatan di Assam, telah menjadi hampir ireversibel. Ada, bagaimanapun, menjadi kemunduran bagi ULFA setelah dua unit pemogokan utama kelompok batalion 28 mengadakan gencatan senjata dengan pemerintah pada bulan Juni 2008, mengurangi daya tempak kelompok pemberontak untuk sebagian besar. ULFA kader melintasi Assam-Arunachal Pradesh dan Myanmar dengan rute telah mendirikan kamp-kamp transit dan rumah aman di Manabhum Reservasi Forest, tersebar lebih dari 1500 kilometer persegi di kawasan Lohit.

Hal ini mengharuskan peluncuran beberapa operasi pasukan keamanan di wilayah ini, khususnya oleh 2 gunung Divisi Angkatan Darat, berdasarkan dekat Assam kota kabupaten timur Dibrugarh. 'Operasi Blazing Khukri' yang dilakukan oleh Angkatan Darat di pinggiran hutan Manabhum antara April 5 dan 10, 2007 dan menewaskan delapan kader ULFA, termasuk dua perempuan. Hal ini diikuti dengan 'Operasi Blooming Orchid', di dalam hutan Manabhum, antara 27 April dan 1 Mei, 2007 Dua kamp ULFA hancur dan daerah itu 'berhasil dibersihkan' selama operasi hampir 500 tentara. Membalikkan ini barangkali bertanggung jawab sampai batas tertentu dalam dua perusahaan dari batalyon 28 ULFA itu menyetujui gencatan senjata dengan pemerintah, meninggalkan kelompok pemberontak dengan perusahaan Bravo 'nya.

Ada beberapa pemberontakan insiden terkait di Arunachal Pradesh pada tahun 2008. Sebagian besar insiden melibatkan NSCN atau militan ULFA. Ada juga beberapa insiden yang mengungkapkan hubungan antara militan dan politisi, seperti penangkapan seorang NSCN (IM) militan dari kediaman mantan Menteri Arunachal Pradesh di Itanagar. Contoh perekrutan kuat pemuda suku oleh organisasi militan, terutama NSCN-K juga ditemukan.

Dalam Konferensi Kepala Menteri pada keamanan dalam negeri, diselenggarakan di New Delhi pada tanggal 17 Agustus 2009 dan dihadiri oleh Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, pemerintah Arunachal Pradesh meminta Pusat untuk menutup seluruh bentangan India 440-km panjang perbatasan -Myanmar sepanjang negara untuk memeriksa pergerakan kelompok pemberontak pemberontak.

Upaya kontra-pemberontakan Negara administrasi, terutama terhadap kelompok pemberontak Naga telah dicampur dengan nuansa politis. Misalnya, pada tanggal 24 Februari 2002 Menteri Negara mengeluarkan banding ke militan NSCN tidak mengganggu warga sipil. Sebulan kemudian, pada tanggal 22 Maret 2002 Menteri Dalam Negeri Negara dikaitkan ancaman pemberontak ke 'non-kooperasi oleh masyarakat. Pada bulan Agustus 2002, maka Kepala Menteri Mukut Mithi, diundangkan Arunachal Pradesh Pengendalian Organized Crime Act (APCOCA) untuk mengontrol hukum memburuk dan situasi ketertiban di Negara, terutama di distrik Tirap dan Changlang. Dengan perubahan formasi politik di Negara, pada tanggal 19 Agustus 2003, Kepala Menteri Gegong Apang, yang kabinetnya dituduh memiliki hubungan dengan simpatisan NSCN-IM sebagai menteri, mencabut UU terming sebagai 'kekejaman' Manuver militer terhadap ULFA dan dalam beberapa tahun terakhir tetap menjadi tanggung jawab aparat keamanan yang berbasis di Assam.⁷⁰

3.1.3.8 Pemberontakan di Sikkim

Sikkim, sampai saat ini, belum menunjukkan gerakan pemberontakan.⁷¹ Insiden satu-satunya mengenai pemberontakan adalah dari negara-negara tetangga yang telah melakukan penangkapan Front Nasional Demokratik Bodoland (NDFB) 'wakil presiden' Dhiren Boro alias Bipul Sonowal ditangkap pada tanggal 1 Januari 2003. Boro ditangkap bersama istrinya

⁷⁰ Hindustan Times www.hindustantimes.com/rssfeed/Guwahati/NEI-Centre-peace-talks-to-begintoday/Article1-660389.aspx. Diakses 25 Februari 2013

⁷¹ Sikkim adalah wilayah Northeast India yang paling dekat dengan Pemerintah India, wilayahnya kecil dan dapat dikontrol. (www.hindustantimes.com/rssfeed/Guwahati/NEI-Centre-peace-talks-to-begintoday/Article1-660389.aspx. Diakses 25 Februari 2013)

Pratima Boro, dua anak-anak dan dua pengawal dari apartemen sebagian dibangun dekat daerah flourmill di Gangtok.

3.2 Dampak Gencatan Senjata di Northeast India

Perjanjian terhadap kesepakatan damai dengan pemerintah pada masing-masing wilayah di Northeast India tidak membuahkan hasil yang positif. Perkembangan konflik antara pemerintah dan etnis-etnis di masing-masing wilayah meletus. Tidak hanya konflik antar pemerintah dan penduduk setempat tetapi juga konflik yang terjadi antar etnis yang masih memperebutkan wilayah dan kekuasaan di masing-masing perbatasan. Sensitifitas etnis meningkat menjadi bentrok antar agama, ras, dan kelompok keluarga. Hal ini dipicu adanya kecurigaan terhadap etnis satu dengan yang lainnya mengenai luas wilayah dan banyaknya ras yang seharusnya tinggal di wilayah tertentu.

Tabel 3.4: Fatalities in insurgencies and terrorist conflicts in India's Northeast, 1992-2001

		Assam	Manipur	Meghalaya	Mizoram	Nagaland	Tripura	Arunachal Pradesh	TOTAL	Annual CT
1992	C	80	84	0	0	34	59	0	257	492
	SF	34	30	0	0	33	18	0	115	
	M	19	51	0	0	29	21	0	120	
1993	C	74	266	0	0	62	148	1	551	913
	SF	24	91	0	0	43	28	2	188	
	M	33	66	0	0	68	7	0	174	
1994	C	173	189	4	0	110	206	3	685	1058
	SF	35	98	0	0	26	22	0	181	
	M	63	63	0	0	56	10	0	192	
1995	C	170	183	7	0	80	178	3	621	1071
	SF	73	64	0	0	25	34	0	196	
	M	27	74	0	0	108	45	0	254	
1996	C	302	117	3	0	144	140	4	710	1235
	SF	87	65	4	4	48	31	1	240	
	M	62	93	0	0	112	18	0	285	
1997	C	285	233	3	0	104	205	9	839	1680
	SF	85	111	0	0	38	50	1	285	
	M	167	151	1	0	218	19	0	556	
1998	C	531	87	5	0	26	214	2	865	1431
	SF	72	62	14	0	14	25	2	189	

	M	180	95	1	0	72	26	3	377	
1999	C	214	89	5	2	26	240	2	578	1216
	SF	77	64	17	5	4	41	0	208	
	M	212	78	0	0	118	22	0	430	
2000	C	366	93	12	4	13	453	7	907	1701
	SF	65	51	7	4	4	16	3	162	
	M	327	102	17	1	84	45	24	585	
2001	C	264	70	24	0	25	239	40	662	1380
	SF	59	25	8	0	2	31	12	137	
	M	283	161	8	0	76	42	11	581	
Total	C	2459	1411	63	6	624	2082	72	6717	12181
	SF	611	661	50	16	237	297	21	1892	
	M	1373	934	27	1	941	255	41	3572	
CT		4443	3006	140	23	1802	2633	134	12181	
State Wise										

Cumulative Total (All Categories) M: Militants; SF: Security Force Personnel; C: Civilians. (Ajai Sahni, "The Terrorist Economy in India's Northeast: Preliminary Explorations," *Faultlines: Writings on Conflict & Resolution*, vol. 8, New Delhi, April 2001, pp. 127-148).

Konflik Assam melibatkan rakyat Bodo, dimana Pasukan Macan Pembebasan Bodoland (Bodoland Liberation Tiger Forces - BLT) dibentuk tahun 1996 untuk memperjuangkan pemisahan negara bagian. Pada tahun 2003 ditandatangani gencatan senjata dan Badan Teritori Bodoland (Bodoland Territory Council - BTC) dibentuk sebagai badan otonomi administrasi didalam negara bagian Assam. Hagrama Mohilary, pemimpin BLT, diangkat sebagai ketua BTC yang baru dan pada pemilihan umum tahun 2006 kelompoknya bergabung dengan kekuatan politik papan atas dengan memenangkan kursi di Dewan Assam.⁷²

Kelompok lain, Gerakan Demokratis Nasional Bodoland (National Democratic Front of Bodoland - NDFB) tetap menuntut otonomi dan pengakuan yang lebih besar. NDFB yang dibentuk tahun 1986 bertanggung jawab untuk lebih dari 300 pembunuhan sebelum

⁷² Kumar, Anand, "Assam: Mantan Pemberontak Menjadi Raja", Laporan no.1836, Kelompok Analisis Asia Selatan, 7 Juni, (2006). [www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers19%5Cpaper 1836.html](http://www.southasiaanalysis.org/%5Cpapers19%5Cpaper%201836.html). Diakses 24 Juli 2013.

menandatangani gencatan bersenjata di bulan Mei 2005. Gencatan senjata dilanggar dan diperpanjang beberapa kali dan pada tahun 2010 konflik telah meningkat.⁷³

Pada November 2010 pemerintah pusat membuat rencana operasional baru melawan NDFB, setelah 2 hari kekerasan yang mengakibatkan 24 orang tewas.⁷⁴ Manipur mempunyai banyak gerakan pemberontakan – diperkirakan sekitar 39 kelompok yang ada saat ini atau sebelumnya.⁷⁵ Yang paling kuat adalah Gerakan Kesatuan Pembebasan Nasional (United National Liberation Front - UNLF) yang dibentuk tahun 1964 oleh kelompok muda yang menuntut kemerdekaan Manipur. Tentara Rakyat Manipur (Manipur's People Army - MPA) memulai perjuangan bersenjata tahun 1991. Kelompok penting lainnya termasuk Tentara Pembebasan Rakyat (People's Liberation Army - PLA), Partai Revolusi Rakyat Kangleipak (People's Revolutionary Party of Kangleipak – PREPAK), Partai Komunis Kangleipak (Kangleipak Communist Party – KCP) dan Kanglei Yawol Kanna Lup (KYKL).⁷⁶ Semua kelompok ini didominasi oleh mayoritas kelompok etnis Meitei. Namun, beberapa kelompok militan mewakili sedikit suku Kuki, Paite atau Zomi, menginginkan kemerdekaan dan/atau otonomi bukan hanya dari India tapi juga dari mayoritas Meitei. Ini termasuk Tentara Pembebasan Kuki, Tentara Nasional Kuki, Gerakan Nasional Kuki, Tentara Revolusi Kuki, Gerakan Pembebasan Kesatuan Kuki dan Tentara Revolusi Zomi. Selain itu, Gerakan Pembebasan Kesatuan Rakyat mewakili Muslim di Manipur dan kelompok Naga, khususnya NSCN-IM, menuntut wilayah Naga di Manipur agar masuk dalam kemerdekaan “Greater Nagaland”.⁷⁷

Semua aktivitas pemberontak ini membuat Manipur menjadi negara bagian yang paling keras di timur laut India pada tahun 2009.⁷⁸ Negara bagian Meghalaya keluar dari Assam pada tahun 1972, menjadi Negara bagian untuk rakyat Hynniewtrep di wilayah timur dan Garo atau Archik di bagian barat bukit Garo. Meghalaya telah terpengaruh oleh

⁷³ “Kejadian yang melibatkan National Democratic Front of Bodoland (NDFB)”, Portal Terorisme Asia Selatan www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/assam/terrorist_outfits/NDFB_tl.htm. Diakses 21 Februari 2013.

⁷⁴ “Pusat meminta pemerintah Assam untuk meluncurkan pertahanan terhadap pemberontak NDFB”, Daily News & Analysis, 10 November, (2010). www.dnaindia.com/india/report_centre-asksassam-government-to-launch-offensive-against-GDNB-rebels_1464813. Diakses 21 Februari 2013.

⁷⁵ Portal Terorisme Asia Selatan, “Kelompok Teroris/Pemberontak - Manipur”, 28 November (2010). www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/manipur/terrorist_outfits/index.html. Diakses 21 Februari 2013.

⁷⁶ Bhaumik, Subir (2007), hal 3, 7.

⁷⁷ Goswami, Namrata, “Kunjungan Muivah ke Manipur: Langkah-langkah menuju sebuah Rekonsiliasi yang Berarti”, 11 Mei, (New Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses, 2010). www.idsa.in/idsacomments/MuivahsVisittoManipurStepstowardsaMeaningfulReconciliation_ngoswami_110510 Diakses 21 Februari, 2013.

⁷⁸ Portal Terorisme Asia Selatan, “Teroris/Pemberontak – Manipur”, 28 November (2010). www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/manipur/index.html Diakses 21 Februari 2013.

pemberontak sejak akhir 1980an, dengan dua kelompok utama pemberontak yang mencerminkan pembagian etnis dan suku: Dewan Pembebasan Nasional Hynniewtrep (Hynniewtrep National Liberation Council - HNLC) dan Dewan Sukarelawan Nasional Archik (Achik National Volunteer Council – ANVC). HNLC dibentuk tahun 1992 dari perpecahan Dewan Pembebasan Hynniewtrep Archik (Hynniewtrep Achik Liberation Council - HALC), organisasi suku militan pertama di Meghalaya. Mereka menginginkan kedaulatan tanah dari India. ANVC dibentuk pada bulan Desember 1995 untuk mendapatkan pemisahan 'Tanah Archik' didalam India. Gencatan senjata tahun 2004 antara ANVC dan pemerintah Kesatuan terus menerus diperpanjang tapi kelompok yang memisahkan diri, Tentara Pembebasan Nasional Garo (Garo National Liberation Army, GNLA), menolak untuk mentaatinya. Pada bulan November 2010, pemerintah Meghalaya mengumumkan bahwa mereka mempertimbangkan permintaan ANVC, yang menerima otonomi Dewan Teritorial Bukit Garo sesuai Dewan Teritorial Bodoland di Assam.⁷⁹

Tabel 3.5: Fatalities in Terrorist Violence in India's Northeast: 2005-2013

Years	Civilians	SFs	Terrorists	Total
2006	232	92	313	637
2007	457	68	511	1036
2008	404	40	607	1051
2009	270	40	542	852
2010	77	22	223	322
2011	79	35	132	246
2012	90	18	209	317
2013	9	3	26	38
Total*	1618	318	2563	4499

Source: South Asia Terrorism Portal (SATP), * Data till February 24, 2013

Diperkirakan bahwa pada tahun 2008, sekitar 50.000 orang (termasuk warga sipil, pasukan keamanan India dan pemberontak) tewas karena konflik kekerasan di timur laut dan ratusan ribu orang mengungsi.⁸⁰ Jumlah anggota kelompok pemberontak bervariasi dan sulit untuk diketahui dengan akurat. Kebanyakan kelompok membiayai aktivitas mereka dengan pemerasan dan penculikkan. Situasi ini, bersama dengan korupsi administratif di daerah

⁷⁹“Pemerintah mempertimbangkan tuntutan ANVC”, The Telegraph (Calcutta), 30 November, (2010). www.telegraphindia.com/1101130/jsp/northeast/story_13238545.jsp Diakses 21 Februari 2013.

⁸⁰“India’s northeastern clashes: Tensions in the seven sisters”, AlertNet, 22 Oktober, (2008). www.trust.org/alertnet/crisis-centre/crisis/indias-northeastern-clashes#detail-section2. diakses 21 Februari 2013

tersebut, mendemoralisasi penduduk dan menghambat pembangunan ekonomi.⁸¹ Penggunaan Undang-undang Kekuatan Khusus Angkatan Bersenjata (1958) yang memberikan imunitas yang sah dari tuntutan kepada angkatan bersenjata merupakan keluhan terbesar di timur laut. Undang-undang ini dianggap sebagai inti budaya impunitas di timur laut (dan Kashmir).⁸²

3.3 Kondisi Wanita dan Anak-anak dalam Konflik di Northeast India

Konflik di wilayah Northeast India (NEI) telah berlangsung selama lima dekade hingga sekarang. Perempuan dan anak-anak adalah korban terburuk dari konflik bersenjata intensitas rendah dan terjebak di antara kekerasan oleh negara dan aktor non-negara. Akibatnya wilayah ini menyaksikan munculnya rumah tangga yang dikepalai perempuan dengan mengubah peran gender. Manipur secara khusus menyaksikan meningkatnya jumlah janda. Media dan organisasi hak asasi manusia melaporkan total 300 eksekusi di luar hukum per tahun di wilayah kecil. Kebanyakan korban adalah dari kelompok usia 25-40 tahun. Setiap kompensasi bagi janda tidak sepenuhnya memadai; itu tidak termasuk reparasi formal. Dengan demikian, banyak janda dan anak dipaksa untuk mencari pendapatan pengganti di tempat lain, menjalankan risiko dieksploitasi oleh pelaku perdagangan perempuan dan anak-anak, terutama untuk pekerja rumah tangga dan industri seks. Pada 2007, ada setidaknya 27.000 janda akibat konflik, 15.000 di Manipur dan lebih dari 1.000 di Assam. Konflik kekerasan dan pembunuhan di luar hukum telah menyebabkan adanya sejumlah besar janda di daerah konflik, banyak yang tidak diberikan bantuan atau ditolak permohonan bantuannya oleh Negara.

kelompok-kelompok pemberontak dan pasukan Negara itu dikerahkan untuk "memusnahkan mereka" dengan sengaja.⁸³ Beberapa temuan fakta media, laporan dan artikel mengungkapkan pelanggaran berat terhadap perempuan oleh Angkatan Darat. Hal ini semakin meningkat dalam 2 dekade terakhir. Korban konflik yang diungsikan ke wilayah india tengah mengalami kelaparan dan disiksa oleh orang-orang dari India mainland dan khususnya pengungsi perempuan, mereka terkadang ditemukan meninggal dunia setelah

⁸¹ Koijam, Shri Radha Binod, "Dampak kegiatan Pemberontakan di Timur Laut India terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi dan solusinya", Pidato tanggal 29 Januari 2010 di Konferensi NERCPA ke 12 di Shillong pada Pusat Studi Timur Laut dan Penelitian Kebijakan pada tanggal 13 Februari, (2010). www.cnes.org/nycu/539.html. Diakses 24 Juli 2013.

⁸² Asian Legal Resource Centre, "INDIA: AFSPA mendukung pemberontakan bersenjata di Manipur", Pernyataan pers, 26 Juli, (2010). www.alrc.net/doc/mainfile.php/alrc_st2010/624/. Diakses 22 Februari 2013.

⁸³ Walter Fernandes & Sanjay Barbora, Ed. *Changing Women's Status in India : Focus on the NorthEast*. North East Social Research Centre, Guwahati, Assam, 2002.

disiksa atau di perkosa. Namun, kekerasan yang skala ini masih belum diakui sebagai konflik di India tengah karena menurut masyarakat mainland, pengungsi bukan merupakan penduduk yang mendapatkan hak mereka selayaknya penduduk asli seperti keadilan dan keamanan.

Wanita yang aktif terlibat dalam konflik-konflik sebagai korban, mediator, aktivis pembangun kedamaian sering terperangkap di antara "dua patriarkis bersenjata" dan tidak pernah menjadi bagian dari negosiasi perdamaian atau mempertimbangkan masalah mereka sebagai salah satu "urusan perdamaian". Baru-baru ini, dengan adanya isu HAM dan perjanjian damai, gencatan senjata atau perjanjian kesepakatan dalam hal suspense operasi dengan kelompok-kelompok militan telah meningkatkan harapan untuk perdamaian di wilayah tersebut. Tapi kekerasan abadi terhadap wanita dan anak-anak di timur laut India tampaknya tidak bisa dipungkiri.

Penyerahan militan sering didorong oleh Pemerintah India melalui "perintah menyerah" dan "soft loan" yang bergabung dengan label "pahlawan" atau "anggota pelucutan senjata". Dengan demikian diakuinya peran "mantan militan" (kebanyakan laki-laki) sedangkan peran perempuan dalam konflik dan perdamaian benar-benar diabaikan.⁸⁴

Disamping semua perkembangan ini, proses perdamaian juga tidak dipandang sebagai hal potensial yang bisa dilakukan perempuan untuk memajukan hak-hak mereka dan mengambil peran yang lebih besar dalam pemerintahan dan politik, terutama dengan cara revisi konstitusi. Isu mengenai Perdamaian dan Keamanan bagi wanita hanyalah wacana saja. Partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik masih suram di Northeast India.

Pada awal tahun 1992, pemerintah India melakukan reformasi konstitusional untuk meningkatkan partisipasi perempuan "dalam pemerintahan melalui Amandemen ke-73 atas konstitusi India di mana satu kursi ketiga dicadangkan untuk perempuan dalam sistem pemerintahan daerah (Panchayati) dan ada usulan untuk meningkatkannya menjadi 50%.⁸⁵

Di Northeast India, proses itu tidak berlaku untuk negara bagian Nagaland, Meghalaya dan Mizoram, atau ke daerah bukit Manipur dan Assam karena perubahan tersebut tidak berlaku untuk "Suku" daerah (ras yang tidak berada di bawah Konstitusi India).

Di bagian lain India, perempuan anggota Panchayat dari komunitas Dalit sering ditolak dalam ruang pengambilan keputusan lokal dan sebagai gantinya nyawanya terancam,

⁸⁴ Kohli, A. (1998). 'The Rise and Decline of Self Determination Movements in India', in A. Basu and A. Kohli (eds), *Can Democracies Accommodate Ethnic Nationalism? Community Conflicts and the State in India*, Oxford University Press: Calcutta.

⁸⁵ Ibid. hal: 45

dilecehkan dan akhirnya tewas ketika berusaha untuk memunculkan peran dalam pemerintahan. Peran perempuan dikecualikan dari pengambilan keputusan dan daerah ini juga bergilir yang terkena dampak konflik.



BAB 4. PERAN NMA (NAGA MOTHER'S ASSOCIATION) DALAM PROSES PERDAMAIAN DI NORTHEAST INDIA

4.1 NMA sebagai Local Peace Comissioner Dengan Kampanye

4.1.1 “shed no more blood”

Antara tahun 1980 dan 1990an, sebagai tanggapan terhadap tingginya pembantaian yang meninggalkan mayat tak dikenal di pasar, NMA memimpin ritual duka bersama dengan gereja-gereja. Dengan memberikan pemakaman yang bermartabat kepada setiap korban dalam acara suku, mereka memberikan pernyataan bahwa setiap hidup adalah berharga. Pada tahun 1994, NMA meluncurkan kampanye “Hentikan semua pertumpahan darah” (shed no more blood).¹

4.1.2 “listen your mother before you kill your brother”

Kampanye tersebut dilaksanakan di gerbang Mao, pada bulan Mei 2010.² ‘aksi duduk’ ini pada akhirnya bermetamorfosis menjadi kebuntuan antar etnis Naga-Meitei, memperlihatkan batas gerakan ibu-ibu pada dua belah pihak untuk melampaui identitas afiliasi yang eksklusif. Namun bagaimanapun juga, perempuan Naga dikenal sebagai aktivis politik yang potensial, menegaskan hak mereka sebagai lawan bicara yang seimbang dalam proses rekonsiliasi antara pihak Naga dan negara. Narasi mengenai konflik Naga memperlihatkan perempuan yang melindungi pejuang lelaki, berbaring di jalan untuk menghalangi truk yang penuh dengan lelaki muda yang akan diinterogasi brutal, mengamankan pelepasan sandera dari kelompok militan yang tak terhitung dan diatas semuanya itu, menghentikan kekerasan faksional. Selama aksi duduk di Gerbang Mao pada Mei 2010, para perempuan bergabung dengan pemerintah lokal untuk mencegah konfrontasi antara penduduk yang emosi dan polisi bersenjata Manipur. Sanksi sosial untuk aktivitas perdamaian perempuan Naga

¹ Diskusi kelompok terfokus dengan para perempuan di desa Jotsomo bulan Mei 2003, dikutip di Rita Manchanda,(2004),http://ictp.gencat.cat/web/.content/continguts/publicacions/workingpapers/arxiu/wp10_5_an_g.pdf diakses 3 juli 2014

² Gerbang Mao adalah batas antara Nagaland dan Manipur dan dihuni oleh suku Mao Naga. Krisis ini berkobar karena Pemerintah Kesatuan menarik persetujuan Sekretaris Jendral NSCNIM Thuingaleng Muivah untuk mengunjungi desa leluhur di Manipur setelah absen selama 4 dekade. Perempuan Naga melakukan protes aksi duduk tak terbatas yang berakibat jam malam dan naiknya ketegangan dimana Batalion Pertahanan India pemerintah Manipur memaksa memukul para perempuan, menggunakan gas air mata dan membunuh dua mahasiswa. Federasi Mahasiswa Naga melakukan blokade dan menutup akses ke Manipur.(Ibid.hal 66)

berakar pada peran tradisional mereka sebagai pencipta perdamaian antara desa dan suku yang berperang – sebagai demi atau pukrelia yang maju ditengah pertempuran dan menghentikan kekerasan. Peran demikian diberikan oleh Neidonuo Angami, presiden NMA saat itu, yang maju diantara 2 pihak yang bertikai di wilayah Phek tahun 1998 dan meminta mereka untuk “dengarkan ibumu sebelum membunuh saudaramu”. Penekanan atas keibuan sebagai strategi mobilisasi mendapatkan pengesahan sosial, me-depolitisasi NMA dan mendukung klaimnya sebagai non partisan.

4.1.1 NMA sebagai local peace commission: Negosiasi antara NMA-NSCN(IM)

4 maret 1997, Pemerintah India sekali lagi menawarkan untuk mengadakan pembicaraan damai dengan kedua faksi Sosialis Dewan Nasional Nagaland. Perdana Menteri Gowda mengatakan bahwa ia telah melakukan pembicaraan awal dengan pemimpin Fraksi NSCN (IM) di Jenewa. Upaya untuk mempromosikan perdamaian juga didukung oleh NMA.³

Naga Mother Association, menjelaskan bahwa NSCN (IM) tidak boleh menarik diri dari perundingan, dan bahwa dialog dengan Pusat harus dilakukan. Sebelumnya, Mr Oscar Fernandes, yang menjadi wakil Pusat untuk perundingan damai, tidak dapat memenuhi permintaan pimpinan faksi NSCN Issac Muivah, dengan kegagalan dialog untuk menghentikan gencatan senjata. Oscar Fernandes mendesak faksi NSCN di Bangkok dan membujuk mereka untuk tidak mengambil tindakan kekerasan. Namun NSCN justru menempatkan tekanan pada Pemerintah India Pusat untuk sampai pada penyelesaian yang sulit karena permintaan NSCN justru meminta pemerintah mendukung integrasi semua bidang pemberontakan di Nagaland yang didominasi untuk membentuk faksi Nagalim lebih besar. Issac Muivah mengancam akan mengundurkan diri dari dialog jika permintaan faksi tidak terpenuhi dan akan membuat lebih banyak pemberontakan di Nagaland lebih daripada yang dapat dihadapi pemerintah.⁴

NMA sebagai pendukung dialog perdamaian mengadakan dialog khusus kepada pemimpin faksi NSCN tepat saat setelah dialog dengan Pemerintah India yang mengalami kegagalan. Dialog antara pimpinan NMA dan Issac Muivah tidak berhasil dalam satu kali dialog dikarenakan NSCN memiliki base militer di sepanjang sungai Nagaland dan

³“Ketua NSCN-IM mendarat di Manipur”, Assam Tribune, 2 Maret, (2011).www.assamtribune.com/scripts/detailsnew.asp?id=mar0311/oth05. Diakses 3 Maret 2011

⁴ Rita Manchanda. Kita Melakukan Lebih Karena Kita Bisa: Perempuan Naga dalam Proses Perdamaian, (Kathmandu: South Asian Forum for Human Rights, 2004), hal.67.

memiliki kepercayaan diri akan kemenangan atas Pemerintah India, meski pada akhirnya banyak korban jiwa yang jatuh baik dari NSCN maupun militer India.

Tahun 1998, NMA kembali melakukan dialog intensif dengan Issac Muivah. NMA membawa nama suku Naga dan mengadakan dialog pribadi dengan para istri-istri jendral faksi NSCN untuk membujuk suami-suami mereka agar tidak berperang (memberontak). Aksi gencatan senjata pada tahun 1998 pun setuju untuk ditiadakan dengan adanya perjanjian anti gencatan senjata tanpa perwakilan pemerintah India, meski begitu perjanjian tersebut dilanggar karena militer pemerintah India tidak menarik pasukan di wilayah Nagaland.

Perundingan yang terakhir diadakan tanggal 27 Februari 2011 di New Delhi antara Perdana Menteri Manmohan Singh dan Muivah dan Swu. Bersamaan dengan perundingan ‘meja tinggi’, pemimpin NSCN-IM melakukan serangkaian konsultasi warga; yang paling terstruktur adalah ‘Konsultasi Bangkok’ pada tahun 2002 (Januari dan Juni). Disini, mereka berbicara dengan organisasi sosial Naga, gereja-gereja dan kelompok-kelompok perempuan mengenai negosiasi formal. Sebagai gantinya, mereka mendengar kritik yang jujur dan ide-ide mengenai apa yang penting bagi rakyat, dan perubahan apa yang terjadi ketika pemimpin-pemimpin berkelahi di hutan selama lima dekade. Seperti yang dinyatakan Muivah pada saat konsultasi Januari, ‘tidak ada kesepakatan dapat terjadi tanpa pengertian penuh dari rakyat’; tidak ada kesepakatan sembunyi-sembunyi akan dilakukan. Kesepakatan damai dalam konflik Naga mendapat banyak pengkhianatan, sehingga membuat transparansi sangat penting. Kelompok masyarakat sipil, seperti Asosiasi Ibu-ibu Naga (Naga Mothers’ Association, NMA) dan afiliasi Manipur, Kesatuan Perempuan Naga Manipur (Naga Women’s Union of Manipur, NWUM) telah memainkan peran penting sebagai penjaga proses perdamaian pro rakyat.

Pada bulan Januari 2009, ratusan tentara paramiliter mengepung kemah kelompok bersenjata Naga yang terbesar, Dewan Sosialis Nasional Nagaland – Isak Muivah (National Socialist Council of Nagaland, NSCN – IM) dekat desa Shirui di Manipur, memperangkap penduduk sipil. Selama lima belas hari, perempuan Naga melakukan aksi duduk menuntut penarikan paramiliter tersebut – tekanan tersebut berhasil dan kekerasan dapat dihindari. ‘Kami hanya melakukan tugas kami sebagai penjaga keamanan’

demikian yang dikatakan perempuan-perempuan tersebut kepada komandan yang frustrasi.⁵

4.1.2 NMA sebagai local peace commission: Demonstrasi NMA kepada ASPFA

Pada tanggal 15 Juli 2004, dua belas perempuan dari kelompok ibu-ibu Manipuri yang juga dalam bergerak atas nama NMA, diketuai oleh Meira Paibis, menanggalkan pakaian di depan kantor pusat paramiliter Assam Rifles di Imphal, ibukota negara bagian Manipur. Mereka mengangkat tinggi-tinggi poster yang ditulis dengan tinta berwarna merah darah: 'Tentara India, Perkosa Kami'. Ibu-ibu tersebut mengutuk kasus pemerkosaan dan tewasnya Manorma Devi yang berumur 33 tahun dalam tahanan, yang mana dituduh oleh petugas keamanan sebagai bagian dari kelompok pemberontak.

Pada 2 November 2000, sepuluh orang warga sipil yang menunggu di halte bis di Malom dekat Imphal ditembak oleh pasukan keamanan karena diduga sebagai pemberontak. Kejadian ini merupakan perwujudan rutin dari penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan dibawah AFSPA. Sebagai balasan, Sharmila yang merupakan anggota NMA, memutuskan untuk berpuasa sampai mati untuk memprotes kekerasan negara setelah pembantaian di Malom. Belakangan ini, protes puasa pengikut Gandhi telah menjadi simbol pertahanan moral perempuan Manipur melawan militerisasi negara. Selama 10 tahun Sharmila berada dalam tahanan polisi di rumah sakit, dipaksa makan melalui infus, dan telah menjadi simbol mobilisasi nasional melawan AFSPA. Sharmila telah berulang kali meminta agar Laporan Komite Reddy mengenai AFSPA dirilis, bahkan melarikan diri ke Delhi pada tahun 2007 untuk meminta secara langsung ke pembuat kebijakan. Namun, Menteri Dalam Negeri Kesatuan, Shivraj Patil, terlalu sibuk untuk memperhatikan tindakan pembangkangan sipil Irom Sharmila. Kekuatan elit Delhi tetap tidak berubah, namun Sharmila yang terbaring lemah di Jantar Mantar (tempat protes demokratis yang terkenal) merupakan magnet bagi pembela hak asasi manusia. Pada akhirnya, surat kabar The Hindu membocorkan rekomendasi laporan tersebut, membeberkan bahwa Komite Reddy telah meminta agar AFSPA dihapus.⁶ Pada bulan November 2010, pada tahun ke sepuluh berpuasanya Sharmila, pembela hak asasi dari

⁵ Kanglaonline, "Putaran pertama perundingan tripartit tentang tuntutan diadakan di Senapati", 3 Desember, (2010). <http://kanglaonline.com/2010/12/first-round-of-tripartite-talks-on-uncdemands-held-at-senapati/> Diakses 25 Februari 2013.

⁶ meminta agar AFSPA dihapus karena "Undang-undang ini terlalu panjang, terlalu kosong dan tidak pantas". Ditambahkan juga bahwa Undang-undang ini "telah menjadi simbol penekanan, objek kebencian dan sarana diskriminasi." (Anuradha dan Ratna Bhuyan (Ed.), Perempuan dan Perdamaian: Bab-bab dari Timur Laut India, (New Delhi: Akamsha Press, 2008), hal.48).

seluruh negeri yang terinspirasi dengan kebenaran keberanian moralnya, berkumpul di Imphal dan sekali lagi menuntut berakhirnya AFSPA.⁷

4.1.3 Dialog pembebasan sandra (negosiasi) dengan Meira Paibis

NMA dan NWUM telah memulai beberapa inisiatif untuk membuka dialog dengan kelompok Meira Paibis, gerakan perempuan yang berpengaruh di Manipur. NWUM, sebagai contoh, bekerja sama dengan Meira Paibis untuk menyelamatkan sandera yang ditangkap oleh kelompok militan Naga dan bergabung dengan protes Meira Pabis untuk solidaritas. Namun, perempuan aktivis Naga mengeluh bahwa solidaritas ini sangat berat sebelah. Faktanya, ketidakpercayaan antara Naga dan Meitei telah melebar selama dekade terakhir, diendapkan oleh reaksi kekerasan kelompok Meitei terhadap pemerintah India pada tahun 2001, untuk memperpanjang gencatan senjata India-Naga melebihi batas teritori Nagaland. Mereka melihat hal ini sebagai wacana untuk pemecahan teritori Manipur. Ketegangan Naga-Meitei tahun 2010 telah dengan efektif mendorong hubungan mereka ke dalam krisis. Pada bulan September 2010, perundingan tripartit putaran pertama dimulai antara Pemerintah India, Naga di Manipur dan Meitei. Dua perempuan terlibat dalam perundingan ini, Gina Shankham dari Gerakan Rakyat Naga untuk Hak Asasi Manusia dan Grace Satsang dari Kesatuan Perempuan Naga Manipur. Namun yang membuat frustrasi, pada perundingan di bulan Desember, tidak ada perempuan yang terlibat. Pembagian antara kelompok etnis yang bersebelahan ini menjelaskan mengapa banyak komunitas etnis di timur laut bisa melawan AFSPA pemerintah yang represif, tapi mereka belum membentuk gerakan yang sama untuk melawannya.

4.2 NMA sebagai Prejudice Reduction Actor : Kitchen Politic dialog Antar Pemberontak (kelompok faksi)

Sebuah istilah yang digunakan oleh NMA untuk bentuk intervensi adalah 'dapur politik'. Para anggota NMA mengundang anggota kelompok pemberontak bawah tanah di wilayah suku mereka, di rumah mereka dan di dapur, jantung rumah suku Naga di mana api terbuka terbakar di tungku dan semua orang duduk di sekitar perapian, dalam suasana khidmad dan tenang mereka bicara terus terang dan mengkritik tindakan yang melanggar hak asasi manusia atau akan menyebabkan hilangnya dukungan dari masyarakat atas kecurigaan antar kelompok pemberontak. Pasca gencatan senjata antar faksi Kitchen

⁷ Tentara menolak gerakan untuk merubah apalagi mencabut Undang-undang. Pada tahun 2010 Menteri Dalam Negeri menyarankan untuk merubah Undang-undang tersebut. Jendral Ketua V K Singh secara langsung menanggapi dengan menyatakan secara terbuka bahwa perubahan terhadap AFSPA akan mengurangi kemampuan operasional angkatan. (Ibid. hal 54)

politic dilakukan untuk memfasilitasi dialog antara pemimpin tertinggi pemberontak yang saling bertikai.⁸ NMA sangat bangga dalam melayani jamuan makan di pertemuan tersebut. Makanan adalah penanda budaya penting kenyamanan, kepastian dan keamanan.

Meskipun mereka bertemu dengan para pemimpin penting dari kelompok faksi (pemberontak) dari konflik bersenjata mereka menjawab pertanyaan jika mereka pikir NMA bersifat politis: "Tidak, Kami hanya sekelompok ibu, kita hanya perempuan yang melakukan apa yang biasanya kita lakukan!" Para wanita menggunakan bahasa relasional terstruktur untuk keluarga sehingga menggambarkan diri mereka apa adanya: Dalam hal ini mereka mengatur kelangsungan hidup dan perlindungan dari "semua anak-anak mereka".

4.3 NMA sebagai Grassroot Trainer: Seminar "Journey of Conscience"

Para perempuan berada dalam posisi sulit budaya asli mereka di mana perempuan tidak diizinkan untuk bertemu dengan masyarakat desa satu sama lain atau berbicara di depan umum. Tidak ada wanita yang memiliki hak untuk menduduki posisi di pemerintah daerah atau negara, bahkan hanya untuk berbicara tentang parlemen nasional India. Banyak perempuan yang tidak mengerti potensi mereka untuk mempengaruhi suatu keadaan konflik yang selama ini telah kurang lebih 60 tahun berlangsung di Northeast India. Mereka pasrah akan nasib perempuan yang hanya mendukung suami-suami mereka di medan perang tanpa tahu mereka akan pulang atau tidak. Pemerintah India dengan militernya dan para pemberontak dengan kelompok-kelompok militan setiap hari mengadakan gencatan senjata yang memakan korban jiwa yang tidak sedikit, hal ini membuat miris aktifis perempuan seperti NMA.⁹

NMA dengan membawa agenda perempuan dalam proses perdamaian mengajak ibu-ibu/ kaum perempuan untuk mengedukasi mereka akan potensi perempuan dalam proses perdamaian. Pada tahun 2000, Angami, di bawah naungan NMA, meluncurkan sebuah inisiatif yang disebut Journey of Conscience, kegiatan ini berlangsung di gereja, kampus, bahkan pertemuan informal ibu-ibu di wilayah nagaland, pendidik dan politisi untuk bertukar pandangan mengenai peran perempuan dalam proses perdamaian.¹⁰ Angami juga

⁸ Pradeep, Kumar. 'Women's Human rights and the Feminist Movement in India: Some Issues', Journal of Politics, An Annual Publication of the Department of Political Science, Dibrugarh University, Vol. III, December, 1996.

⁹ Jean Dreze & Amartya Sen: Gender Inequality and Women's Agency, Manoranjan Mohanty(ed), Class, Caste, Gender Sage Publications, 2004. P- 338-387 hal.20-35

¹⁰ Ibid. hal 23

mengatur anggotanya untuk memperoleh keterampilan melalui pelatihan, workshop dan seminar.

4.4 Psychosocial Work Post-war Trauma: Pemulihan Psikologi korban kekerasan.

pada bulan Februari 2003 NMA telah memasukkan ke dalam rencana-10 proposal untuk mendirikan sebuah Rumah Sakit Jiwa Negara untuk menambah Rumah Sakit Jiwa yang ada di Kohima. Ibu Sano Vamuzo, pemimpin NMA pun menggambarkan dirinya sebagai penderita trauma setelah kejadian kekerasan berkata, saya tidak pergi untuk konseling. Semua orang menderita. Siapa yang akan memberi nasihat? Seorang korban penganiayaan berkata, aku pergi ke rumah sakit untuk pertolongan pertama namun tidak pergi untuk konseling apapun, karena tidak ada pusat konseling profesional yang tersedia, Meskipun teman-teman dan keluarga dan organisasi perempuan menawarkan bantuan dan menghibur saya. Seorang wanita yang saudaranya adalah salah satu dari lima pemuda yang telah diduga disiksa sampai mati oleh militer Pemerintah India. Ia mengatakan bahwa dia adalah satu-satunya anggota keluarga yang masih hidup dan mengalami trauma oleh insiden tersebut. Istri dan anak-anak mereka adalah orang-orang yang paling menderita, meskipun semua kerabat dan anggota keluarga menderita. Istri-istri almarhum telah berusia jauh meskipun mereka tidak benar-benar tua. Anak-anak mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak; mereka harus bekerja lembur di ladang. Kerabat juga harus berbagi beban mereka. Selama musim perayaan, ketika semua orang makan daging, anak-anak harus puas memakan sayuran karena mereka tidak mampu membeli apa-apa.

Saat ini konseling bagi penderita HIV-AIDS, pecandu Alkohol dan Penyalahgunaan Zat di wilayah Nagaland telah berada di dalam Nagaland State AIDS Control Society (NSACS) mereka memiliki 34 LSM termasuk NMA yang bekerja di bawah pratinjau dan melaksanakan program yang diprakarsai oleh mereka. Beberapa fasilitas yang disediakan oleh mereka adalah: klinik STD melekat pada semua rumah sakit sipil distrik di mana investigasi gratis dan obat-obatan yang tersedia untuk pengobatan STD; 9 konseling dan tes sukarela pusat; sebuah rumah sakit AIDS bekerja sama dengan NMA dan banyak program perawatan dan dukungan masyarakat. Mereka juga menjalankan dua puluh empat jam Helpline, bank darah serta penurunan pusat untuk orang yang hidup dengan HIV / AIDS. Ada 23 program intervensi yang ditargetkan dilakukan oleh 18 LSM di bawah NSACS sebagai berikut: Intravenous User of Drugs (IUD) Project Pengemudi truk, Project pekerja seks komersial, Proyek Narapidana, Project Anak-anak Jalanan, Project Sekolah Drop-Out. Sebuah proyek mengandung dan mencegah penularan ibu ke anak juga telah dimulai di rumah sakit kabupaten di mana semua wanita hamil bersama dengan

pasangan mereka didorong untuk menghadiri klinik antenatal dan di sini dukungan yang diperlukan dan bimbingan dan obat-obatan yang disediakan untuk perempuan HIV positif. Sejumlah inisiatif menargetkan anak-anak sekolah telah diluncurkan dalam terang data penelitian yang sangat meresahkan. Ada juga program yang disebut HIV-TB Program koordinasi untuk memastikan pengobatan gratis lengkap untuk kasus TB di semua kabupaten.¹¹



¹¹ Support Services to Counter Violence Against Women in Assam A Resource Directory, 2002. Published by North East Network. Supported by UNIFEM. Hal 66

BAB 5. KESIMPULAN

Upaya NMA dalam proses perdamaian di Northeast India adalah dengan mengadakan kampanye-kampanye seperti *shed no more blood* dan *listen your mouther before you kill your brother* kedua kampanye tersebut dimaksudkan agar tidak ada lagi kekerasan dan perang yang dapat merengut korban jiwa. Melewati batas gender mereka juga memberikan arahan kepada jendral-jendral pemberontak agar tidak melakukan kekerasan serta menghentikan perlawanan dengan melakukan *Kitchen politic*, yang merupakan cara NMA untuk memberikan pengertian arti keluarga dan kekerasan hanya akan menimbulkan kesedihan terhadap keluarga. Dalam suasana yang kekeluargaan mereka mengadakan dialog dari hati ke hati dengan para istri pemberontak serta pemerintah agar mengurangi konflik yang terjadi sehingga dapat menekan angka kematian di Northeast india dengan cara bernegosiasi. Acara seminar “*Journey of Conscience*” untuk menyadarkan peran perempuan di Northeast India untuk lebih terlibat sebagai pencipta perdamaian pun dilakukan di berbagai tempat. Peran NMA sebagai ibu dan juga sebagai tokoh pencipta perdamaian dalam level akar rumput tetap menyajikan penciptaan perdamaian dengan cara-cara perempuan tanpa kekerasan dan penuh kompromi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Literatur:

- Arivia.Gadis. 2000. Feminisme: sebuah kata hati.kompas pustaka gamedia: Jakarta).
- Bhaumik, Subir.2007.“Pemberontakan di Timur Laut India: Konflik, Pemilihan dan Perubahan”, East West Center Washington Working Papers No10.Washington: East West Center.
- Grant, R.1992. The Quagmire of Gender and International Security, V.S. Peterson (Ed.). Gendered States Boulder.Washington, D.C: Washington press.
- Gurr, Ted Robert. 1993. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical Conflicts. Washington, D.C.: United States Instituted of Peace Press.
- Koijam, Shri Radha Binod.2010.“Dampak aktivitas Pemberontak di Timur Laut India terhadap Pembangunan Sosial Ekonomi dan Solusinya ”.washington: east west center.
- Koentjoroningrat. 2000. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Lederach, Jhon Paul. 1997. Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societis. Washington, D.C: Unitate State Institute of Peace Press.
- Mas’oed, Mohtar. 1994. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia.
- Plano, J. C dkk. 1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta: CV Rajawali.
- Tong, Rosemarie Putnam. 2008. Feminist Thought: Pengantar Paling Komrehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Femins.Yogyakarta: Jalasutra.

Makalah:

- Kh., U. Maman. 2002. Menggabungkan Penelitian Kuantitatif dengan Kualitatif .Makalah Pengantar Falsafah Sains (PPS 702). Institut Pertanian Bogor.

Internet:

- PeaceWomanAcrossTheGlobe(http://www.1000peacewomen.org/eng/friedensfrauen_biographiengefunden.php?WomenID=1289:diakses 20 april 2013)

Hindustan Times www.hindustantimes.com/rssfeed/Guwahati/NEI-Centre-peace-talks-to-begintoday/Article1-660389.aspx. Diakses 25 Februari 2013

Research Associate, Institute for Conflict Management
(http://www.satp.org/satporgtp/sair/Archives/sair11/11_34.htm#assessment2: diakses pada 20 april 2013)

INDIA: AFSPA mendukung pemberontakan bersenjata di Manipur”, Pernyataan pers, 26 Juli, (2010). www.alrc.net/doc/mainfile.php/alrc_st2010/624/. Diakses 22 Februari 2013.

India: North East Network,2004.

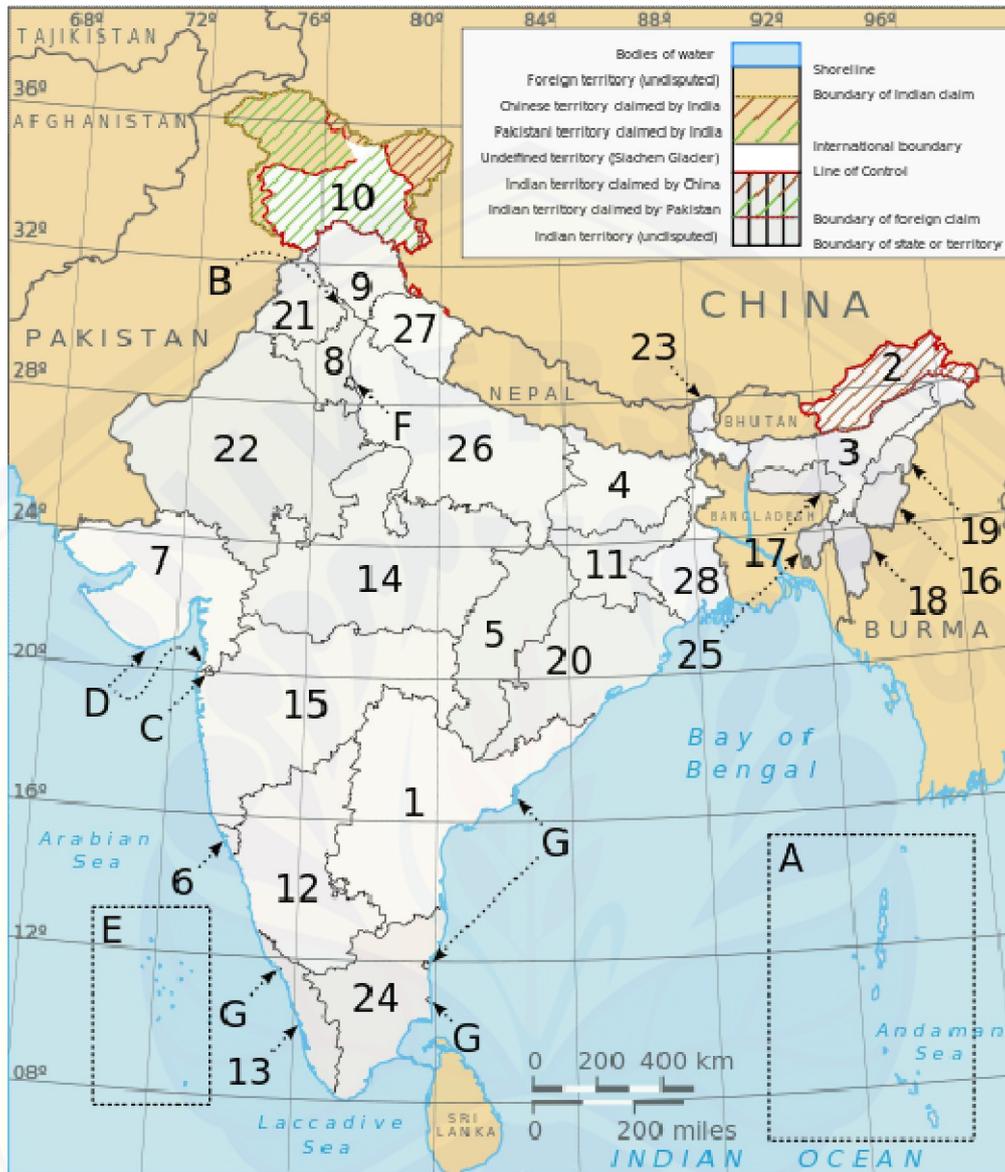
[.http://ncw.nic.in/pdfreports/Violence%20against%20women%20in%20North%20East%20India%20-%20An%20Inquiry.pdf](http://ncw.nic.in/pdfreports/Violence%20against%20women%20in%20North%20East%20India%20-%20An%20Inquiry.pdf). Diakses 21 Februari 2013.

Perspektif konflik dalam grassroot level

http://www.academia.edu/1144076/Peacebuilding_dan_Resolusi_Konflik_dalam_perspaktif_ (diakses pada 3 mei 2014)

LAMPIRAN

A. Peta Northeast India



B. Dokumentasi

